



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Portrait of A Decade

“Transforming Towards Excellence”

TRANSFORMASI KELEMBAGAAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN TAHUN 2023





TRANSFORMING TOWARDS EXCELLENCE

Proses metamorfosis yang dialami oleh ulat, mulai dari menetas, membentuk kepompong, hingga akhirnya berubah menjadi kupu-kupu yang indah, merupakan perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan. Setiap tahap transformasi ini membutuhkan waktu serta ketahanan untuk mencapai bentuk sempurna.

Dengan latar belakang proses metamorfosis ini, tema kupu-kupu dipilih sebagai inspirasi desain pada Buku Dekade Transformasi Kelembagaan. Setiap tahap metamorfosis mencerminkan perjalanan transformasi kelembagaan yang penuh tantangan dan dedikasi, membawa Ditjen Perbendaharaan dari reformasi awal menuju keunggulan melalui inovasi digital.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	6	Gambaran Umum	14
Kata Sambutan	8	Jejak Langkah Satu Dekade	16
Visi dan Misi DJPb	11	Pelaksanaan Inisiatif Strategis DJPb	18

00 Bagian I

Satu Dekade Inisiatif Strategis DJPb



00 Bagian II

Satu Dekade Quickwins DJPb



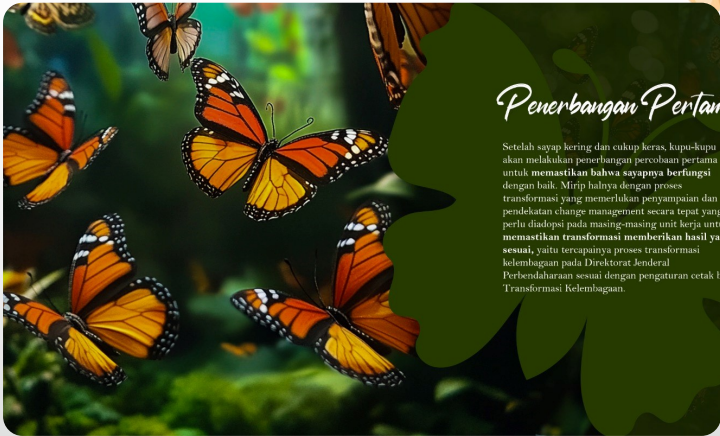
Gambaran Umum	42
Jejak Langkah Satu Dekade	42
Pelaksanaan Quickwins DJPb	43

00 Bagian III

Platform Pembayaran
Pemerintah



Gambaran Umum	78
Susunan Tim Pengelola	79
Dasar Hukum	80
Manfaat	83
Milestone Pengembangan	85
Pencapaian	87



Tim Penyusun

94

KATA PENGANTAR



“

Salah satu inovasi DJPb adalah dengan menginisiasi Quickwins untuk memastikan transformasi kelembagaan dapat diimplementasikan tanpa kendala yang berarti. Buku Dekade Transformasi Kelembagaan menyajikan kilas balik transformasi yang telah dicapai selama sepuluh tahun terakhir.

”

Sulaimansyah

Direktur Sistem Perbendaharaan

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dalam menjawab perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan yang semakin dinamis, diperlukan organisasi modern yang agile, terbuka, dan adaptif. Dalam sebuah organisasi modern, *Project Management Office* (PMO) memiliki peran sentral untuk memastikan program-program transformasi yang diinisiasi guna memenuhi kebutuhan tersebut dapat berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan. PMO Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) telah diberikan mandat untuk mengoordinasikan implementasi inisiatif transformasi dan *change management* pada lingkungan DJPb yang sejalan dengan Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan.

Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan, tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 36/KMK.01/2014. Melalui KMK dimaksud, program-program transformasi kelembagaan sesuai dengan *roadmap* transformasi kelembagaan digulirkan. Tahun 2023 menandai tahun ke-10 implementasi transformasi kelembagaan pada DJPb. Memasuki satu dekade, implementasi transformasi kelembagaan memasuki fase *sustaining* dengan berfokus pada mempertahankan dampak yang telah diciptakan dan melanjutkan perkembangan yang berkelanjutan.

Selama satu dekade, program transformasi berhasil diwujudkan melalui keseimbangan antara pengelolaan inisiatif bisnis inti (*core business*) dan pengelolaan dinamika organisasi. Dalam perjalanan mencapai transformasi tersebut tidak jarang ditemui tantangan-tantangan, baik dari sisi eksternal maupun internal yang perlu dihadapi. Oleh karena itu, PMO DJPb selalu berupaya menjawab tantangan tersebut dengan inovasi-inovasi responsif dan yang berorientasi kepada solusi. Salah satu inovasi DJPb adalah dengan menginisiasi Quickwins untuk memastikan transformasi kelembagaan yang tercermin dalam Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan, menjadi tanggung jawab untuk dapat diimplementasikan tanpa kendala yang berarti.

Selaras dengan memasuki tahun ke-10 Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan, disusun Buku Dekade

Transformasi Kelembagaan sebagai jejak transformasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam mewujudkan transformasi yang berada dalam tahapan digitalisasi. Buku Dekade Transformasi Kelembagaan menyajikan kilas balik transformasi yang telah dicapai selama sepuluh tahun terakhir dan juga menyampaikan komitmen berkelanjutan seluruh Insan Perbendaharaan untuk menjalankan transformasi di DJPb sehingga dapat terus berkembang dan menciptakan inovasi bagi pengelolaan keuangan negara.

Dikemas dalam tema **“Portrait of a Decade: Transforming Towards Excellence”** dan filosofi proses metamorfosis sempurna kupu-kupu, Buku Dekade Transformasi Kelembagaan mencerminkan sebuah refleksi perjalanan transformasi DJPb yang selalu berupaya untuk mengimplementasikan perubahan guna mencapai keunggulan selama satu dekade. Rangkaian proses panjang transformasi kelembagaan DJPb sejalan dengan proses metamorfosis kupu-kupu yang melalui tahapan perencanaan yang matang dan fokus pada tujuan akhir yang lebih baik.

Buku Dekade Transformasi Kelembagaan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan bermanfaat dalam memberikan arah transformasi DJPb ke depan bagi seluruh insan perbendaharaan dan semua pihak dalam mendukung dan mengimplementasikan Transformasi Kelembagaan.

Salam Transformasi!

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Ditandatangani secara elektronik

Sulaimansyah

Direktur Sistem Perbendaharaan
selaku Ketua PMO DJPb

KATA SAMBUTAN

“

Inisiatif strategis yang telah dilaksanakan DJPb dalam satu dekade ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional internal, tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan bagi pemerintah dan masyarakat luas.

”

Astera Primanto Bhakti

Direktur Jenderal Perbendaharaan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT. Berkat kuasa dan petunjuk Tuhan Yang Maha Esa, Direktorat Jenderal Perbendaharaan mampu menyelesaikan dan senantiasa mendukung setiap tahapan program transformasi kelembagaan dan Inisiatif Strategis baik di lingkungan DJPb maupun Kementerian Keuangan. Sebagai penanda satu dekade, tahun 2023 telah kita lalui dengan cukup baik meskipun tantangan yang kita hadapi sebagai organisasi juga cukup beragam.

"Plateau. a part of a graph in which the value of the ordinate shows **little or no change with increasing value of the abscissa**" | Oxford Reference.

Apabila kita tarik lagi ke periode monumental sebelumnya, yakni lahirnya paket hukum keuangan negara di tahun 2003 sebagai penanda reformasi keuangan negara, pada tahun 2023 kita sudah melewati dekade kedua. Setelah proses sepanjang ini, tidak berlebihan rasanya jika saya mulai mengingatkan mengenai adanya *plateau* dalam perjalanan proses apapun yang dilalui manusia. *Statistically proven*, semakin lama proses transformasi kita, kita akan menemui titik yang membuat kita merasa dengan upaya yang lebih besar, perubahan yang terjadi tidak lagi terasa signifikan. *Hitting a plateau is inevitable*. Perlu kita sadari bahwa fase *plateau* ini memang pasti akan kita temui. Harus kita lalui. Ciri berhasilnya kita melalui fase ini adalah kita tetap bertransformasi, tidak peduli efeknya terasa sebesar sebelumnya atau tidak. Melewati *plateau* adalah jalan menuju kesempurnaan karena fase setelahnya akan membuat kita kembali merasakan progres transformasi yang besar lagi.

Oleh karena itu, saya mengapresiasi tema yang diusung tahun ini, *Portrait of a Decade: Transforming Towards*

Excellence. Setelah satu dekade kita berjalan, kita bertemu *plateau* dan jika kita bisa melaluinya, kita *on the track towards excellence*. Beberapa inisiatif strategis yang berhasil diwujudkan mencakup implementasi penuh Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), pengembangan platform digital untuk menyederhanakan proses bisnis perbendaharaan, serta penguatan fungsi *Regional Chief Economist* dan *Financial Advisor* yang mendukung pengambilan kebijakan berbasis data dan analisis komprehensif. Inisiatif strategis yang telah dilaksanakan DJPb dalam satu dekade ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional internal, tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan bagi pemerintah dan masyarakat luas.

Selanjutnya, pada kesempatan ini, kami ingin sampaikan apresiasi kepada seluruh *Unit in Charge* (UIC), para Duta Transformasi (*Change Agent* dan *Lighthouse*), seluruh insan Perbendaharaan, dan para pihak yang terlibat dalam menyukseskan pelaksanaan program transformasi kelembagaan DJPb. Teruslah jaga api transformasi.

Saya ingin Buku Dekade Transformasi Kelembagaan mampu menjadi bekal dalam mengakselerasi transformasi DJPb yang saat ini kita lakukan secara fundamental dan menyeluruh. Oleh karena itu, seluruh insan Perbendaharaan agar senantiasa adaptif dan inovatif mendukung seluruh program Transformasi yang sedang berjalan, untuk menghadirkan layanan *Treasury* yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Salam transformasi!

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.



Ditandatangani secara elektronik

Astera Primanto Bhakti

Direktur Jenderal Perbendaharaan



“ Transformasi harus terus dilakukan, karena perubahan adalah suatu keniscayaan. Kita tahu organisasi Kementerian Keuangan harus terus melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada dalam ekosistem, baik ekosistem yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan sendiri maupun yang ada di lingkungan pemerintahan RI dan juga dinamika perubahan yang ada di dunia. Dalam perjalanannya DJPb selalu melakukan reformasi yang memberikan warna bagi Kementerian Keuangan.

Terus berkomitmen, memperbaiki organisasi melalui suatu transformasi yang berkesinambungan dan tentunya dengan semangat perubahan yang konsisten.

”

(Disampaikan Dirjen Perbendaharaan pada Class of Duta)

VISI DAN MISI

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

VISI

Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan



MISI

DJPb mendukung misi Kementerian Keuangan nomor 3 (memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif) dan no 4 (Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan resiko minimum) melalui:

1. Mewujudkan pengelolaan kas negara yang prudent, efisien, dan optimal;
2. Mendukung kinerja pelaksanaan APBN yang efisien, efektif, dan akuntabel;
3. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, andal, dan tepat waktu;
4. Mewujudkan tata kelola investasi pemerintah yang modern, inklusif, dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan layanan dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern;
6. Mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis, dan sistem teknologi informasi perbendaharaan yang modern, efektif, dan adaptif.



Larva (ulat)

Setelah telur menetas menjadi larva atau ulat. Ulat ini segera mulai memakan daun di sekitarnya. Selama menjadi ulat, akan terjadi fase molting yaitu pergantian warna kulit sebanyak 4-5 kali untuk **menyesuaikan diri** agar terhindar dari pemangsa. Demikian pula dengan proses implementasi dari pengaturan Cetak Biru Transformasi Kelembagaan yang harus **dilakukan penyesuaiannya** pada unit kerja agar dapat diterima oleh seluruh pihak yang terlibat, baik pihak internal (para pegawai) maupun para pihak eksternal (pemangku kepentingan) sehingga Transformasi Kelembagaan tersebut dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

BAGIAN I : SATU DEKADE INISIATIF STRATEGIS

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GAMBARAN UMUM INISIATIF STRATEGIS DJPB

Selama satu dekade terakhir, Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah melalui perjalanan transformasi yang panjang dan dinamis. Proses transformasi ini tidak sekadar perubahan administratif, tetapi juga melibatkan pembaruan menyeluruh pada sistem, teknologi, dan budaya kerja. Fokus utamanya ialah peningkatan transparansi, efisiensi, dan modernisasi pengelolaan keuangan negara sehingga mampu menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks. Sejalan dengan tema Buku Dekade Transformasi Kelembagaan yaitu *"Portrait of a Decade: Transforming toward Excellence"*, DJPb terus berkembang menuju kesempurnaan melalui inovasi digital dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Dengan mengintegrasikan teknologi digital dalam setiap aspek layanan, DJPb berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan akuntabel. Transformasi ini tidak hanya mendukung kelancaran operasional internal, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pemerintah, masyarakat, dan ekonomi secara keseluruhan, menjadikan DJPb sebagai institusi yang adaptif dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional.

DJPb berhasil memodernisasi proses pengelolaan keuangan negara melalui berbagai Inisiatif Strategis (IS) yang telah diimplementasikan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. IS

merupakan upaya terstruktur yang dilaksanakan oleh DJPb sebagai bagian dari Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan. Melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014, cetak biru transformasi kelembagaan dirancang dengan fokus pada modernisasi, peningkatan efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Inisiatif Strategis adalah serangkaian langkah yang dirumuskan untuk mentransformasi berbagai aspek penting dalam pengelolaan perbendaharaan negara yang mencakup perbaikan sistem, proses bisnis, dan integrasi teknologi guna mendukung pengelolaan anggaran, kas, dan aset negara secara lebih efisien. DJPb bertindak sebagai pengelola utama perbendaharaan, dengan tanggung jawab terhadap administrasi pembayaran negara dan pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. IS di DJPb berfungsi sebagai motor utama dalam mempercepat proses modernisasi sistem perbendaharaan, memperkuat kontrol, dan memastikan transparansi dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan negara.

Secara umum, cetak biru menekankan 3 (tiga) horizon waktu penerapan dalam bentuk membangun momentum untuk reformasi pada periode waktu jangka pendek, membangun keunggulan operasional dan layanan dalam skala yang lebih besar pada periode waktu jangka menengah, dan terakhir melembagakan terobosan dalam jangka panjang.

Fase Implementasi Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan:

Fase Jangka Pendek

Inisiatif-inisiatif fase jangka pendek berfokus pada pembuktian hasil-hasil nyata untuk memperoleh izin dan momentum untuk mengimplementasikan lebih lanjut perubahan dalam skala besar. Fase ini berfokus pada pelaksanaan inisiatif-inisiatif “beach-head” yang mungkin untuk dilaksanakan dan inisiatif-inisiatif transformasi nyata dengan dampak langsung pada para stakeholder utama. Beberapa inisiatif program pilot juga dilaksanakan untuk “pengujian lapangan” dan penyempurnaan inisiatif untuk penerapan dalam skala besar. Dalam fase ini, Kemenkeu juga menetapkan faktor-faktor keberhasilan agar sukses mengimplementasikan inisiatif-inisiatif “long and hard” yang memiliki dampak lebih besar tetapi sulit dan lebih memakan waktu untuk diimplementasikan.

Fase Jangka Menengah

Inisiatif-inisiatif fase jangka menengah berfokus pada penetapan keunggulan operasional dan layanan dalam skala besar, membangun momentum transformasi yang dimulai pada fase jangka pendek. Fase akan berfokus pada peningkatan skala reformasi di seluruh Kemenkeu (seluruh pegawai dan sendi *customer service*) serta seluruh Indonesia. Inisiatif-inisiatif transformasi yang sebelumnya dirintis pada fase jangka pendek dan telah dikembangkan dan disempurnakan lebih lanjut akan diterapkan dalam skala besar. Fase ini merupakan “pusat” terjadinya transformasi dan akan menunjukkan awal dari dampak nyata dan berskala besar.

Fase Jangka Panjang

Inisiatif-inisiatif fase jangka Panjang berfokus pada pelebagaan terobosan-terobosan yang telah diciptakan dengan mempertahankan dampak dan melanjutkan perkembangan yang berkelanjutan, misalnya membawa sistem dan proses-proses dari “sangat baik” menjadi “best-practice”. Dalam fase ini, Kemenkeu juga mengarah pada reformasi struktural substansial lebih lanjut jika dibutuhkan.

JEJAK SATU LANGKAH INISIATIF STRATEGIS DJPB

2014-2016

Dasar hukum: KMK Nomor 36/KMK.01/2014

1. Menyusun sistem pencairan dana yang tersentralisasi dan menggunakan saluran pembayaran modern.
2. Menyusun sistem penerimaan elektronik yang terintegrasi dan menggunakan saluran pembayaran modern.
3. Menyediakan *shared service environment* bagi fungsi *back office* Kementerian/Lembaga.
4. Meningkatkan proses pengelolaan likuiditas secara menyeluruh.
5. Meninjau kapabilitas TDR.
6. Mewujudkan perencanaan kas dengan target saldo kas yang ditetapkan secara jelas.
7. Memperluas cakupan TSA.
8. Memperbaiki akurasi perkiraan belanja satker.
9. Meningkatkan koordinasi pengelolaan likuiditas dengan Bank Sentral.
10. Memperluas strategi pengelolaan valuta asing.
11. Memperjelas tujuan, aspirasi dan strategi perangkat *special mission*.
12. Menerapkan kepemilikan, tata kelola, pelaporan dan struktur hukum yang jelas.
13. Menempatkan proses *special mission* yang tepat.
14. Implementasi roadmap pelaksanaan akuntansi berbasis akrual.
15. Integrasi sistem akuntansi pusat dan daerah.
16. Meningkatkan kualitas manajemen keuangan K/L dan BUN.
17. Meningkatkan pengendalian internal di K/L dan BUN.

2017

Dasar hukum: KMK Nomor 36/KMK.01/2015 dan KMK Nomor 974/KMK.01/2016

1. Menyediakan *shared services* bagi berbagai fungsi *back office* K/L.
2. Menerapkan kepemilikan, tata kelola, pelaporan dan struktur hukum yang jelas.
3. Menempatkan proses *special mission* yang tepat.
4. Pengintegrasian informasi keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
5. Meningkatkan pengendalian internal di KL dan BUN.
6. Pengelolaan keuangan negara yang modern dan terintegrasi.
7. Pengelolaan likuiditas keuangan negara dengan instrumen keuangan modern.

2018

Dasar hukum: KMK Nomor 36/KMK.01/2015 dan KMK Nomor 974/KMK.01/2016

1. Basis Data Penerimaan yang Terintegrasi Dengan Saluran Pengumpulan Modern.
2. Fungsi *Back Office "Shared Service"* untuk Seluruh K/L Dipusatkan di Kemenkeu.
3. Pengintegrasian Informasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan K/L dan BUN.
5. Pengelolaan Keuangan Negara yang Modern dan Terintegrasi.
6. Pengelolaan Likuiditas Keuangan Negara dengan Instrumen Keuangan Modern.

2019



Dasar hukum: KMK Nomor 302/KMK.01/2019

Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran melalui Penggunaan Teknologi Digital (*Shared Service* dan *Government Platform*).

2020



Dasar hukum: KMK Nomor 125/KMK.01/2020

1. Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran melalui Penggunaan Teknologi Digital (*Shared Service* dan *Government Platform*).
2. Pengintegrasian Informasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara.

2021



Dasar hukum: KMK Nomor 91/KMK.01/2021

1. Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran Melalui Penggunaan Teknologi Digital (*Shared Service* dan *Government Platform*).
2. Pengintegrasian Informasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara.
3. *Data Analytics* Tema Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas.
4. *Data Analytics* Tema Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali.

2022



Dasar hukum: KMK Nomor 88/KMK.01/2022

1. Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran melalui Penggunaan Teknologi Digital (Platform Pembayaran Pemerintah).
2. Pengintegrasian Informasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara.
3. Penguatan *Regional Chief Economist* dalam Rangka Kesenambungan Fiskal Berbasis Kewilayahan.
4. Sinergi Pemberdayaan UMKM.
5. Pengembangan *Business Intelligence* Pengelolaan Likuiditas.

2023



Dasar hukum: KMK Nomor 124 Tahun 2023

1. Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran melalui Teknologi Digital (Platform Pembayaran Pemerintah).
2. Pengintegrasian Informasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara.
3. Modernisasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).
4. Sinergi Pemberdayaan UMKM.
5. *Regional Chief Economist* (RCE) yang Optimal dalam Rangka Peningkatan Kualitas Perekonomian Daerah.
6. Analisis Data: Tingkat Efisiensi Belanja Badan Layanan Umum Rumpun Pengelola Barang dan Jasa Lainnya.



PELAKSANAAN INISIATIF STRATEGIS DJPB

Inisiatif Strategis DJPb Tahun 2014

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan berperan aktif untuk mendorong 4 (empat) fungsi treasury sebagai berikut:

1. Fungsi Pembayaran dan Penerimaan (*Disbursement and Receipt*)
2. Fungsi Pengelolaan Likuiditas (*Liquidity Management*)
3. Fungsi Akuntansi dan Pelaporan (*Accounting and Reporting*)
4. Fungsi Misi Khusus (*Special Mission*)

Secara keseluruhan empat fungsi tersebut dijabarkan ke dalam 17 (tujuh belas) inisiatif utama. Adapun penjabaran kegiatan pada masing-masing Inisiatif Utama adalah sebagai berikut:

Inisiatif Utama Fungsi *Disbursement and Receipt*

1. Menyusun sistem pencairan dana tersentralisasi dan modern;

Inisiatif ini mencakup beberapa kegiatan utama antara lain:

- implementasi penuh SPAN dan SAKTI
- penempatan langsung pembayaran gaji ke rekening penerima akhir
- pembayaran ke luar negeri
- penggunaan kartu plastik sebagai pengganti *petty cash*
- pengenalan opsi pembayaran bantuan sosial secara non-tunai

2. Menyusun sistem penerimaan elektronik terintegrasi dan modern;

Inisiatif ini diwujudkan dengan implementasi penuh MPN G-2 dan penyempurnaan lainnya, termasuk utilisasi penyaluran utama untuk pengumpulan penerimaan.

3. Menyediakan *shared service* bagi fungsi *back office* Kementerian/Lembaga;

Inisiatif ini mencakup beberapa kegiatan utama antara lain:

- meluncurkan dan memperbaiki data vendor
- sistem pembayaran gaji pegawai untuk seluruh pegawai pemerintahan dengan menggunakan basis data pegawai yang terpusat
- memusatkan penagihan, pembayaran dan pelaporan untuk pembayaran rutin
- pengadaan terpusat yang memusatkan komitmen dan proses pelaporan untuk item belanja umum

Inisiatif Utama Fungsi *Liquidity Management*

1. Meningkatkan proses pengelolaan likuiditas secara menyeluruh;

Inisiatif ini mencakup beberapa kegiatan utama antara lain:

- Meningkatkan kapabilitas SDM Direktorat PKN dan unit-unit pelaksana CPIN
- Mengembangkan kebijakan, SOP, uraian pekerjaan, dan pembiayaan CPIN
- Mengembangkan fleksibilitas dalam penerbitan SPN jangka pendek untuk perencanaan kas
- Implementasi proses ALM yang lebih detail di bidang kebijakan dan pertemuan anggotanya
- Koordinasi harian di antara CMO-DMO-BI

- Mengembangkan IT untuk melaksanakan CPIN data sharing
 - Pengintegrasian ALM CPIN/TI ke dalam SPAN
2. Meninjau kapabilitas TDR;
- Inisiatif ini mencakup beberapa kegiatan utama antara lain:
- Memastikan kehati-hatian dalam penempatan dana di luar Bank Indonesia
 - Menilai kapabilitas TDR secara keseluruhan dan langkah-langkah implementasi yang dapat digunakan
 - Menganalisis dan memilih metodologi reserve balance target
3. Mewujudkan perencanaan kas dengan target saldo kas yang ditetapkan secara jelas;
- Inisiatif ini mencakup beberapa kegiatan utama antara lain:
- Menghitung target saldo kas berdasarkan pola historis, kebijakan pemerintah, dan asumsi masa depan
 - Mengusulkan target saldo kas untuk komite ALM dan merumuskannya dalam kebijakan
4. Memperluas cakupan TSA;
5. Memperbaiki akurasi perkiraan belanja satker;
- Membuat AFS baru
 - Mendorong pengumpulan data perkiraan penarikan dana terutama dari satker dengan pengeluaran besar sebelum tanggal pembayaran sebagai panduan jumlah dana yang disiapkan
 - Mencatat kepatuhan dan akurasi satker dalam mengumpulkan data dan laporan dalam bentuk score card
6. Meningkatkan koordinasi pengelolaan likuiditas dengan Bank Sentral
- Inisiatif ini mencakup beberapa kegiatan utama antara lain:
- Membuat MOU dengan Bank Indonesia terkait penarikan dana harian dan memfasilitasi data sharing
 - Melaksanakan koordinasi dengan BI terkait aturan dan volume maksimal penempatan di bank umum oleh TDR
 - Koordinasi dengan BI dalam perdagangan valuta asing
 - Sharing data CPIN dengan BI
 - Memulai Data perkiraan Harian dengan BI
7. Memperluas strategi pengelolaan valuta asing
- Inisiatif ini mencakup beberapa kegiatan utama antara lain:
- Menganalisa berbagai kemungkinan strategi dan instrumen yang digunakan untuk mengelola valuta asing
 - Mengusulkan kebijakan pengelolaan valuta asing yang dapat disetujui oleh komite ALM
 - Memformulasikan kebijakan pengelolaan valuta asing ke dalam peraturan
 - Mengusulkan kepada Bank Indonesia untuk mengijinkan aturan perdagangan valuta asing yang lebih baik antara Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia
 - Koordinasi dengan Bank Indonesia dalam jumlah valuta asing yang diperdagangkan dan yang sesuai dengan strategi kebijakan moneter dan cadangan valuta asing Bank Indonesia

Inisiatif Utama Fungsi *Special Mission*



1. Memperjelas tujuan, aspirasi dan strategi perangkat *special mission*;

Inisiatif ini mencakup beberapa kegiatan utama antara lain:

- Memulai mengkaji strategi dan mandat perangkat *special mission* (berpotensi dipimpin oleh BKF)
- Bekerja bersama dengan stakeholder utama untuk memvalidasi temuan
- Tim transformasi memulai mengkaji kebijakan dan undang-undang yang mengatur perangkat *special mission* & menilai apakah mereka dapat ditingkatkan untuk memenuhi obyektifnya
- Mengkaji kebijakan dan undang-undang yang diidentifikasi sebagai penghambat perangkat *special mission* untuk memenuhi tujuannya

2. Menerapkan kepemilikan, tata kelola, pelaporan dan struktur hukum yang jelas;

Inisiatif ini mencakup beberapa kegiatan utama antara lain:

- Menentukan struktur tata kelola baru berdasarkan jumlah dan ukuran *special mission* yang tersisa
- Menugaskan pimpinan yang akan memimpin proses transformasi

3. Menempatkan proses *special mission* yang tepat

Inisiatif ini mencakup beberapa kegiatan utama antara lain:

- Menyertakan pengawasan proses transisi *special missions* sebagai agenda untuk steerco perbendaharaan
- Membentuk tim transformasi yang dipimpin oleh Sesditjen (DJKN, DJPJB, BKF dan KaRo Organta) yang terdiri dari anggota Es 2 dan Es 3 untuk mengusulkan dan mengimplementasikan proses transisi yang akan

disetujui steerco perbendaharaan.

- Merancang rencana transisi organisasi

Inisiatif Utama Fungsi *Accounting and Reporting*



1. Implementasi *roadmap* pelaksanaan akuntansi berbasis akrual

Inisiatif ini mencakup beberapa kegiatan utama antara lain:

- Menciptakan standar akuntansi berbasis akrual
- Merumuskan regulasi, panduan dan kebijakan untuk akuntansi akrual
- Pengimplementasian perubahan sistem IT untuk akuntansi akrual
- Membangun kapabilitas di K/L terhadap transisi menuju akuntansi akrual

2. Integrasi sistem akuntansi pusat dan daerah

Inisiatif ini mencakup beberapa kegiatan utama antara lain:

- Membentuk Tim untuk menilai kebutuhan pengembangan sistem IT untuk semua pemerintah daerah
- Mengembangkan, mengimplementasikan dan memonitor interface untuk data pemerintah daerah yang terkonsolidasi (SIKD)

3. Meningkatkan kualitas manajemen keuangan K/L dan BUN

4. Meningkatkan pengendalian internal di K/L dan BUN

Inisiatif ini diwujudkan dengan koordinasi bersama BPKP untuk tentang strategi reformasi dan menyusun sistem pengendalian internal untuk temuan audit.

Inisiatif Strategis DJPb Tahun 2015

Setelah berjalan selama hampir dua tahun sejak 2014 hingga 2015, Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah melaksanakan Transformasi Kelembagaan melalui inisiatif-inisiatif kegiatan strategis yang sesuai dengan KMK Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025.

Pada tahun 2015, Ditjen Perbendaharaan melanjutkan 17 (tujuh belas) Inisiatif Utama yang dilakukan pada tahun 2014. Inisiatif utama disajikan dalam 4 fungsi yaitu Fungsi *Disbursement and Receipt*, Fungsi *Liquidity Management*, Fungsi *Special Mission*, dan Fungsi *Accounting and Reporting*. Adapun rincian kegiatan pada masing-masing Inisiatif Utama adalah sebagai berikut:

1. Menyusun sistem pencairan dana tersentralisasi dan modern;
2. Menyusun sistem penerimaan elektronik terintegrasi dan modern;
3. Menyediakan *shared service* bagi fungsi *back office* Kementerian/Lembaga;

Inisiatif Utama Fungsi *Disbursement and Receipt*

Inisiatif utama tersebut diwujudkan dalam 11 kegiatan utama dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- Implementasi Penuh SPAN
- *Piloting* SAKTI
- *Pilot Project* pengalihan administrasi gaji Kementerian Pertahanan/TNI
- Meluncurkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Pembayaran APBN Perwakilan Luar Negeri
- Membangun modul dan infrastruktur kartu plastik untuk menggantikan *petty cash*

- Meluncurkan Peraturan Menteri Keuangan tentang mekanisme penyaluran bansos yang bersifat *cashless*
- Memperbanyak jumlah lembaga yang menggunakan MPN G2
- Memperbanyak jumlah *database vendor*
- Membangun pilot pembayaran gaji terpusat untuk pegawai Kemenkeu
- Mendesain *shared service* untuk memusatkan komitmen dan proses pelaporan untuk item belanja rutin
- Mendesain *shared service* untuk memusatkan komitmen dan proses pelaporan untuk item belanja umum

Inisiatif Utama Fungsi *Liquidity Management*

1. Meningkatkan proses pengelolaan likuiditas secara menyeluruh;
2. Meninjau kapabilitas TDR;
3. Mewujudkan perencanaan kas dengan target saldo kas yang ditetapkan secara jelas;
4. Memperluas cakupan TSA;
5. Memperbaiki akurasi perkiraan belanja satker;
6. Meningkatkan koordinasi pengelolaan likuiditas dengan Bank Sentral; dan
7. Memperluas strategi pengelolaan valuta asing.

Inisiatif utama tersebut diwujudkan dalam 13 kegiatan utama dengan rincian sebagai berikut:

- Memperbaiki CPIN
- Mengembangkan berbagai data CPIN melalui pemanfaatan TI
- Pengintegrasian Sistem CPIN ke dalam penempatan dana di luar Bank Indonesia

- Memastikan kehati-hatian dalam penempatan dana di luar Bank Indonesia
- Mengajukan target saldo cadangan baru ke komite ALM dan meresmikannya ke dalam sebuah kebijakan
- Memperkenalkan AFS baru
- Memastikan pengiriman data prakiraan yang tepat waktu dari para satker besar sebelum tanggal pembayaran berdasarkan jumlah SPM
- Memantau kepatuhan dan keakuratan para satker dalam mengirim data dan melaporkannya dalam format *score card*
- Mengembangkan MOU dengan BI untuk menyertakan mereka dalam *daily cash call* dan memfasilitasi pertukaran data
- Mengembangkan mekanisme koordinasi dengan BI untuk perdagangan valas
- Menganalisis probabilitas yang mencakup rekening yang berbeda yang saat ini tidak termuat dalam TSA, mencakup hambatan dan kemudahan penyertaan dalam hukum dan peraturan
- Mengembangkan mekanisme untuk dapat memperluas TSA ke dalam beberapa rekening tertentu
- Meresmikan kebijakan pengelolaan valas aktif dalam peraturan

Inisiatif Utama Fungsi *Special Mission*

1. Memperjelas tujuan, aspirasi dan strategi perangkat *special mission*;
2. Menerapkan kepemilikan, tata kelola, pelaporan dan struktur hukum yang jelas; dan

3. Menempatkan proses *special mission* yang tepat.

Pelaksanaan fungsi *Special Mission* diwujudkan dalam kegiatan utama dengan rincian sebagai berikut:

a. Perbaikan tata kelola PIP

- Koordinasi dengan pihak terkait untuk membahas transisi mandat PIP yang dialihkan ke PT SMI
- Koordinasi dengan Inisiatif Unit lain terkait dengan SMV dalam pembiayaan infrastruktur
- Koordinasi dengan DJKN, Setjen, BKF membahas monev pengelolaan keuangan dan investasi PIP
- Monev pengelolaan keuangan dan investasi PIP
- Koordinasi pengalihan dana investasi pada PIP ke PT SMI
- Kegiatan Tim Likuidasi PIP
- Koordinasi pembentukan LPPI

b. Perbaikan tata kelola LPDP

- Kajian atas peraturan pada LPDP
- Koordinasi dengan LPDP, Setjen, DJKN Kemenkeu terkait dengan mandat LPDP terkait dengan Perpres DPPN
- Koordinasi tentang tata kelola, pelaporan dan struktur hukum yang jelas pada LPDP (Perpres DPPN)
- Koordinasi tentang organisasi LPDP (PMK 252)
- Monev LPDP

c. Perbaikan tata kelola Direktorat SMI

- Koordinasi terkait dengan SMV pendukung infrastruktur (PPP, PT PII, VGF, Dit SMI)
- Kajian mengenai tata kelola, pelaporan dan struktur hukum regulator dan supervisor SMV
- Koordinasi terkait dengan tata kelola, pelaporan dan

struktur hukum regulator dan supervisor SMV

- Penyelesaian regulasi terkait penghapusan Bank Penata Usahaan dalam rangka penerusan pinjaman
- Proses penghapusan Bank Penata Usahaan (BPU) dalam rangka pengelolaan penerusan pinjaman

Inisiatif Utama Fungsi Accounting and Reporting

1. Implementasi *roadmap* pelaksanaan akuntansi berbasis akrual;
2. Integrasi sistem akuntansi pusat dan daerah;
3. Meningkatkan kualitas manajemen keuangan K/L dan BUN;
4. Meningkatkan pengendalian internal di K/L dan BUN

Inisiatif utama tersebut diwujudkan dalam 6 kegiatan utama dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- Pengimplementasian perubahan sistem IT untuk akuntansi akrual
- Membangun kapabilitas di K/L terhadap transisi menuju akuntansi akrual
- Pengguliran Proyek Pilot
- Mengembangkan, mengimplementasikan dan memonitor interface untuk data pemda yang terkonsolidasi (SIKD)
- Memulai melakukan komunikasi dengan BPKP terkait strategi reformasi bagi sistem pengendalian internal
- Mendorong BPKP untuk mengevaluasi permasalahan-permasalahan serupa yang muncul dengan sistem pengendalian internal

Inisiatif Strategis DJPb Tahun 2016

Pergantian pucuk pimpinan Kementerian Keuangan tahun 2016 dari Bapak Bambang P.S. Brojonegoro kepada Ibu Sri Mulyani Indrawati kemudian membawa sejarah baru dalam pengelolaan program RBTK Kementerian Keuangan. Ibu Sri Mulyani melakukan reformulasi terhadap program yang telah tertuang dalam Inisiatif Strategis (IS) transformasi kelembagaan. Reformulasi ini dilakukan dengan cara menambah ke dalam program RBTK 7 buah inisiatif strategis yang mendukung 87 inisiatif sebelumnya serta 20 inisiatif strategis baru yang akan diimplementasikan pada tahun 2017 – 2019. Penambahan inisiatif strategis baru ini diakomodasi dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 974/KMK.01/2016 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2017 – 2019.

Reformulasi IS RBTK baru ini didasarkan pada analisa SWOT untuk mengkaji kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Berdasarkan analisa SWOT kemudian dimunculkan IS baru tersebut dengan memperhatikan kriteria yaitu:

1. Berdampak langsung pada pencapaian *strategic outcomes* melalui optimalisasi peran Kementerian Keuangan;
2. Merupakan terobosan nasional dan memerlukan perhatian khusus Menteri Keuangan; dan
3. Memerlukan sinergi antar unit eselon I atau K/L (*Connecting the dots*).

Strategic outcomes baru yang ingin dicapai oleh Kementerian Keuangan pada prinsipnya terbagi menjadi 3 outcomes tematik dan 1 outcome pendukung. Outcomes tematik tersebut yaitu:

1. tema penerimaan dengan *strategic outcomes* "Pendapatan negara yang optimal" ;
2. tema perbendaharaan dengan *strategic outcomes* "Pengelolaan Keuangan Negara yang Akuntabel"; dan

3. tema penganggaran dengan *strategic outcomes* “Belanja Negara yang Efektif dan Efisien”.

Tema IS RBTK baru yang bersifat substantif ini didukung pula oleh IS RBTK tema sentral yang menjiwai, mendukung dan menggerakkan tema-tema tersebut.

Khusus *outcomes* tematik tema perbendaharaan diwujudkan melalui 7 Inisiatif baru yang memberikan peran utama kepada 3 unit eselon I di lingkup Kementerian Keuangan yakni Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko serta Ditjen Kekayaan Negara. Diantara 7 inisiatif baru tersebut, Ditjen Perbendaharaan mendapatkan tugas untuk menjadi penanggung jawab utama dari 2 inisiatif sebagaimana berikut:

1. Inisiatif nomor 10 “Pengelolaan Keuangan Negara yang Modern, Efisien, dan Terintegrasi”

Menggabungkan beberapa IS existing ke dalam satu IS baru meliputi fungsi *disbursement and receipt*, fungsi *accounting and reporting*, dan beberapa Inisiatif baru, antara lain:

- Sistem pembayaran pengumpulan yang terpusat dan verifikasi yang bersifat elektronik serta dengan saluran pembayaran modern.
- Basis data penerimaan yang terintegrasi dengan saluran pengumpulan modern.
- Fungsi *back office “shared service”* untuk seluruh KL, dipusatkan di Kemenkeu.
- Pengimplementasian *Roadmap Strategi Akuntansi*.

2. Inisiatif nomor 11 “Pengelolaan Likuiditas Keuangan Negara dengan Instrumen Keuangan Modern”

Pada tahun 2016 terdapat 17 (tujuh belas) Inisiatif Utama yang dilakukan. Inisiatif utama disajikan dalam 4 fungsi yaitu Fungsi *Disbursement and Receipt*, Fungsi *Liquidity Management*, Fungsi *Special Mission*, dan Fungsi *Accounting and Reporting*. Adapun rincian kegiatan pada masing-masing Inisiatif Utama adalah sebagai berikut:

Inisiatif Utama Fungsi *Disbursement and Receipt*

- Menyusun sistem pencairan dana tersentralisasi dan modern;
- Menyusun sistem penerimaan elektronik terintegrasi dan modern;
- Menyediakan *shared service* bagi fungsi *back office* Kementerian/Lembaga;

Inisiatif utama tersebut diwujudkan dalam 11 kegiatan utama dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- Piloting SAKTI untuk seluruh satuan kerja lingkup Ditjen Perbendaharaan
- Roll out pembayaran gaji via pembayaran langsung dari Perbendaharaan untuk satker Kementerian Pertahanan / TNI
- Meluncurkan kartu plastik untuk petty cash di beberapa satker
- Membangun *cashless choice* untuk pembayaran bantuan sosial
- Implementasi Penuh MPN G2
- Sentralisasi Pembayaran Gaji lingkup Ditjen Perbendaharaan
- Kajian Sentralisasi Pembayaran Belanja Rutin
- Kajian Sentralisasi Pembayaran Belanja Umum

Inisiatif Utama Fungsi *Liquidity Management*

- Meningkatkan proses pengelolaan likuiditas secara menyeluruh;
- Meninjau kapabilitas TDR;
- Mewujudkan perencanaan kas dengan target saldo kas yang ditetapkan secara jelas;

4. Memperluas cakupan TSA;
5. Memperbaiki akurasi perkiraan belanja satker;
6. Meningkatkan koordinasi pengelolaan likuiditas dengan Bank Sentral; dan
7. Memperluas strategi pengelolaan valuta asing.

Inisiatif utama tersebut diwujudkan dalam 7 kegiatan utama dengan rincian sebagai berikut:

- Melakukan integrasi ALM CPIN/TI ke dalam SPAN
- Menghubungkan SAKTI ke AFS setelah SAKTI berfungsi secara resmi
- Meninjau kapabilitas TDR dan memastikan prudensi dalam operasional TDR
- Panduan perencanaan kas dengan target saldo cadangan terdefinisi
- Memperluas jangkauan TSA kepada beberapa rekening tertentu
- Kajian evaluasi perluasan jangkauan TSA pada rekening bendahara pengeluaran
- Menetapkan strategi dan pedoman pengelolaan valuta asing jangka pendek untuk pengelolaan likuiditas.

Inisiatif Utama Fungsi *Special Mission*

1. Memperjelas tujuan, aspirasi dan strategi perangkat *special mission*;
2. Menerapkan kepemilikan, tata kelola, pelaporan dan struktur hukum yang jelas;
3. Menempatkan proses *special mission* yang tepat;

Inisiatif utama tersebut diwujudkan dalam 3 kegiatan utama dengan rincian sebagai berikut:

- Memperjelas mandat & strategi melalui penyusunan peraturan untuk mengubah kebijakan, peraturan dan SOP
- Menerapkan tata kelola, pelaporan dan struktur hukum melalui perancangan, pengajuan dan pelaksanaan rencana transisi organisasi
- Memastikan monitoring kinerja yang dilakukan secara teliti dan konsisten

Inisiatif Utama Fungsi *Accounting and Reporting*

1. Implementasi roadmap pelaksanaan akuntansi berbasis akrual;
2. Integrasi sistem akuntansi pusat dan daerah;
3. Meningkatkan kualitas manajemen keuangan K/L dan BUN; dan
4. Meningkatkan pengendalian internal di K/L dan BUN;

Inisiatif utama tersebut diwujudkan dalam 8 kegiatan utama dengan rincian sebagai berikut:

- Merumuskan regulasi, panduan, dan kebijakan untuk Akuntansi Akrual
- Pengimplementasian perubahan sistem IT untuk akuntansi akrual
- Membangun kapabilitas di K/L terhadap transisi menuju akuntansi akrual
- Pengguliran Proyek Pilot
- Mengembangkan, mengimplementasikan dan memonitor interface utk data pemda yg terkonsolidasi (SIKD)
- Membentuk Tim Kerja pengembangan sistem informasi

keuangan pemerintah pusat dan pemda yg terintegrasi

- Bekerja sama dgn BPKP utk memperbaiki panduan bagi sistem pengendalian internal khususnya untuk temuan audit
- Mendorong BPKP untuk membuat kriteria untuk penilaian dan penelusuran kualitas sistem pengendalian internal untuk temuan audit

Inisiatif Strategis DJPb Tahun 2017

Pada tahun ini kegiatan difokuskan pada implementasi 20 inisiatif strategis program RBTK serta beberapa inisiatif transformasi organisasi Kementerian Keuangan sebagaimana disepakati dalam *Leaders Offsite Meeting* (LOM) Kementerian Keuangan tahun 2016 dan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 974/KMK.01/2016 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program RBTK Kementerian Keuangan.

Ditjen Perbendaharaan menjalankan inisiatif strategis yang diamanatkan oleh dua sumber yakni KMK 36/KMK.01/2014 dan KMK 974/KMK.01/2016. Kegiatan utama dari IS baru yang berhasil diraih adalah:

1. IS Pengelolaan keuangan negara yang modern dan terintegrasi:
 - Implementasi simplifikasi proses pertanggungjawaban keuangan bagi penerima Bantuan Sosial.
 - Simplifikasi proses bisnis pertanggungjawaban keuangan Satker Piloting SAKTI.
 - Piloting SAKTI tahap III pada seluruh Satker DJPb.
 - Piloting Pembayaran Gaji terpusat untuk Kemenkeu di seluruh unit instansi vertikal DJPb.
2. IS Pengelolaan likuiditas keuangan negara dengan instrumen keuangan modern

- Piloting penggunaan Kartu Kredit dalam rangka penggunaan UP pada Satker Istana Kepresidenan, BKF, PPATK, DJPb, dan KPK.
- Penetapan skema Pemanfaatan dana BLU untuk likuiditas (PMK Nomor 98/PMK.05/2017).

Berikut laporan kinerja transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan 2017 Tema Perbendaharaan yang disajikan per fungsi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan:

Inisiatif Utama Fungsi *Disbursement and Receipt*

1. Menyediakan *shared services* bagi berbagai fungsi *back office* K/L; dan
2. Pengelolaan keuangan negara yang modern dan terintegrasi.

Inisiatif Strategis Fungsi *Disbursement and Receipt* dijabarkan dalam beberapa kegiatan utama sebagai berikut:

- *Grand design shared services*
- Simplifikasi proses bisnis pertanggungjawaban belanja
- Piloting SAKTI
- Piloting pembayaran gaji terpusat untuk Kemenkeu
- Portal Kemenkeu dan Single Sign-On Penerimaan Negara
- Interkoneksi SPAN dengan sistem LKPP (Data Vendor)
- Integrasi RKA-KL ke dalam SAKTI
- Interkoneksi SIMAN dengan SAKTI
- Penerapan SAKTI beberapa satker Kemenkeu dan beberapa satker K/L lainnya
- Interkoneksi SPAN dengan portal program K/L
- *Rollout* pembayaran (belanja gaji terpusat untuk Kemenkeu)

Inisiatif Utama Fungsi *Liquidity Management*

Pengelolaan likuiditas keuangan negara dengan instrumen keuangan modern (KMK 974/KMK.01/2016)

Inisiatif Strategis Fungsi *Liquidity Management* dijabarkan dalam beberapa kegiatan utama dengan rincian sebagai berikut:

- Pilot project penggunaan kartu kredit/pinjaman perbankan dalam dukungan belanja pemerintah.
- Optimalisasi peran BLU & lembaga keuangan lainnya atas dukungan likuiditas jangka pendek.
- Meluncurkan SOP Link dan Cash Mismatch Protocol BUN.
- Regulasi dan Implementasi Penggunaan Kartu Kredit/ Pinjaman perbankan dalam dukungan belanja pemerintah.

Inisiatif Utama Fungsi *Special Mission*

1. Menerapkan kepemilikan, tata kelola, pelaporan dan struktur hukum yang jelas (KMK 36/KMK.01/2014).
2. Menempatkan proses *special mission* yang tepat (KMK 36/KMK.01/2014)

Inisiatif Strategis Fungsi *Special Mission* dijabarkan dalam beberapa kegiatan utama dengan rincian sebagai berikut:

- Melaksanakan rencana transisi organisasi untuk penyempurnaan tata kelola *special mission*.
- Memastikan monitoring kinerja yang dilakukan secara teliti dan konsisten.

Inisiatif Utama Fungsi *Accounting and Reporting*

1. Pengintegrasian informasi keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (KMK 36/KMK.01/2014);

2. Meningkatkan pengendalian internal di KL dan BUN (KMK 36/KMK.01/2014); dan

3. Pengelolaan keuangan negara yang modern dan terintegrasi (KMK 974/KMK.01/2016).

Inisiatif Strategis Fungsi *Accounting and Reporting* dijabarkan dalam beberapa kegiatan utama dengan rincian sebagai berikut:

- Mengembangkan, mengimplementasikan dan memonitor *interface* untuk data pemda yang terkonsolidasi (SIKD)
- Membentuk TIM Kerja pengembangan sistem informasi keuangan pemerintah pusat dan pemda yang terintegrasi
- Mengembangkan, mengimplementasikan dan memonitor *interface* pengintegrasian informasi keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi (*interface* integrasi SPAN dengan Komandan SIKD)
- Mendorong BPKP untuk mengedukasi K/L dalam meningkatkan sistem pengendalian internal untuk temuan audit
- Simplifikasi proses bisnis pertanggungjawaban keuangan Satker Piloting SAKTI

Inisiatif Strategis DJPb Tahun 2018

Pada tahun 2018, Ditjen Perbendaharaan menjalankan inisiatif strategis yang diamanatkan oleh dua sumber yakni KMK 36/KMK.01/2014 dan KMK 974/KMK.01/2016. Adapun penjabaran pada setiap inisiatif strategis diuraikan sebagai berikut:

Pengelolaan Inisiatif Strategis yang diamanatkan oleh
KMK 36/KMK.01/2014



1. IS Basis Data Penerimaan yang Terintegrasi Dengan Saluran Pengumpulan Modern, diwujudkan dalam beberapa kegiatan utama sebagai berikut:
 - a. Implementasi penuh MPN G2 dan penyempurnaan lainnya, termasuk utilisasi penyaluran utama untuk pengumpulan penerimaan.
 - b. Pengembangan website penerimaan pemerintah yang memungkinkan pembayaran kartu kredit dan elektronik lainnya untuk pembayaran pajak, bea cukai, dan PNBPN pada berbagai lembaga pemerintah, khususnya satker PNBPN.
2. IS Fungsi *Back Office* "Shared Service" untuk Seluruh K/L Dipusatkan di Kemenkeu, diwujudkan dalam beberapa kegiatan utama sebagai berikut:
 - a. Penyiapan dan penyempurnaan sistem pembayaran gaji KPPN Terpusat.
 - b. Pusat pengadaan terpusat yang memusatkan komitmen dan proses pelaporan untuk item belanja umum.
3. IS Pengintegrasian Informasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diwujudkan dalam beberapa kegiatan utama sebagai berikut:
 - a. Membentuk Tim Kerja pengembangan sistem informasi keuangan pemerintah pusat dan pemda yang terintegrasi.
 - b. Mengembangkan, mengimplementasikan, dan memonitor interface pengintegrasian informasi keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi (interface integrasi SPAN dengan Komandan SIKD).
4. IS Meningkatkan Pengelolaan Keuangan K/L dan BUN, diwujudkan dalam kegiatan utama berupa koordinasi komite untuk mengevaluasi temuan audit.

Pengelolaan Inisiatif Strategis yang diamanatkan oleh
KMK 974/KMK.01/2016



1. IS Pengelolaan Keuangan Negara yang Modern dan Terintegrasi, diwujudkan dalam beberapa kegiatan utama dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Portal *Single sign-on* Penerimaan Negara
 - b. Interkoneksi SPAN dengan sistem LKPP (*data vendor*)
 - c. Integrasi Aplikasi KPJM ke dalam SAKTI
 - d. Interkoneksi SIMAN dengan SAKTI
 - e. Penerapan SAKTI ke seluruh satker Kementerian Keuangan
 - f. Interkoneksi SPAN dengan portal program K/L
 - g. Penyiapan dan penyempurnaan sistem pembayaran gaji KPPN Terpusat
2. IS Pengelolaan Likuiditas Keuangan Negara dengan Instrumen Keuangan Modern, diwujudkan dalam beberapa kegiatan utama dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Meluncurkan SOP Link dan *Cash Mismatch Protocol* BUN
 - b. Penyusunan dan publikasi strategi pengelolaan kas
 - c. Pengembangan instrumen jangka pendek dalam rangka pembiayaan
 - d. Pengembangan instrumen jangka pendek dalam rangka investasi
 - e. Regulasi dan Implementasi Penggunaan Kartu Kredit/ Pinjaman perbankan dalam dukungan belanja pemerintah
 - f. Penetapan cash buffer level dan opsi pemenuhan kas pada kuartal IV sebagai mitigasi tekanan kas akhir tahun
 - g. Peningkatan akurasi data Perencanaan Kas



Inisiatif Strategis DJPb Tahun 2019

Pada tahun 2019, Ditjen Perbendaharaan berperan dalam pencapaian inisiatif strategis sebagaimana yang diamanatkan oleh KMK Nomor 302/KMK.01/2019. Ditjen Perbendaharaan merupakan initiative owner pada ISRBTk Simplifikasi

Pelaksanaan Anggaran melalui Penggunaan Teknologi Digital (*Shared Service* dan *Government Platform*). Adapun capaian milestone tahun 2019 sebagai berikut:

1 Penyelesaian desain SSC dan *Government Platform*

- Pengumpulan bahan dan data
- Penyusunan draft kajian *government platform* untuk pembayaran *common expenses*
- Pemetaan *common expenses* yang dapat dikelola dengan *Shared Service*
- Penyelesaian desain proses bisnis pembayaran *common expenses government platform*
- Pembahasan/FGD proses bisnis pembayaran *common expenses government platform*

Penanggung Jawab :

- Direktorat Pelaksanaan Anggaran
- Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
- Direktorat Pengelolaan Kas Negara

5 Implementasi penuh KKP oleh seluruh K/L

Sosialisasi PMK tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan KKP

Penanggung Jawab :

Direktorat Pelaksanaan Anggaran

2 Penyelesaian kajian pembayaran gaji *fortnightly*

- Pengumpulan bahan dan anggaran
- Penyusunan kajian pembayaran gaji secara *fortnightly*
- Penyampaian rekomendasi

Penanggung Jawab :

- Direktorat Pelaksanaan Anggaran
- Direktorat Sistem Perbendaharaan

3 Pengembangan Aplikasi untuk KKP

Pengembangan aplikasi untuk KKP (penyesuaian sistem aplikasi SAS, SILABI, SAIBA dan SAKTI untuk *entry data* KKP)

Penanggung Jawab :

- Direktorat Pelaksanaan Anggaran
- Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan

4 Penyelesaian arsitektur bisnis, data, aplikasi dan teknologi (*BDAT*) ke dalam *Orbus iServer*

Penyelesaian arsitektur *BDAT* terkait *Shared Service* sesuai dengan *Framework Enterprise Architecture* ke dalam *Orbus iServer*

Penanggung Jawab :

- Direktorat Pelaksanaan Anggaran
- Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan



Gambar: Milestone Transformasi Kelembagaan DJPb Tahun 2019

DJPb selaku *initiative owner* dalam pencapaian milestone 2019 telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Penetapan *Blueprint* SSC dan *government payment platform* melalui Kepdirjen Perbendaharaan Nomor KEP-286/PB/2019;
- Penyelesaian risiko legal pada UU Keuangan Negara untuk layanan gaji, belanja melalui *marketplace*, dan e-katalog;
- Penyelesaian risiko legal pada UU ITE melalui Implementasi Digital Signature (DS). Dokumentasi digital harus tersertifikasi oleh CA. BSRE selaku CA siap mendukung, namun sistem BSRE masih relatif lambat dan kurang andal;
- Penunjukan Tim Teknis berdasarkan Keputusan Sesjen Kemenkeu dan dalam pelaksanaan tugasnya nanti akan dikuatkan dengan pembentukan tim asistensi lintas I yang melibatkan Setjen Kemenkeu, Itjen Kemenkeu, Pusintek, dan DJPb;
- Mitra *marketplace* sudah tersedia dan dapat mengakomodasi kebutuhan perancangan *government payment platform*;
- Peluncuran Sistem Aplikasi SAS, SILABI, SAIBA, OM SPAN, dan SAKTI untuk mendukung implementasi KKP pada tanggal 31 Mei 2019;
- Pelaksanaan koordinasi dengan Biro SDM terkait penyamaan standar data HRIS dengan GPP dan PBN Open;
- Penyampaian standar *database* dari Tim Pengembang GPP untuk dilakukan rekonsiliasi dengan tim pengembang HRIS, PBN Open, dan Tukin;
- Perancangan proses bisnis Tukin untuk diintegrasikan dalam GPP oleh Tim GPP;
- Sosialisasi KKP kepada KPPN, Bank, dan satker K/L serta dilakukan UAT dan *video conference* kepada satker K/L

yang akan menggunakan Aplikasi SAS dan SAKTI;

- Penunjukan unit pengembang SSC sesuai hasil BOD DJPb, yaitu Direktorat SITP. Adapun pengelola SSC sementara adalah tim *ad hoc* yang akan dibentuk dengan Kepdirjen Perbendaharaan;
- Usulan terobosan untuk menggunakan ESB SAKTI sebagai Sistem *Government Payment Platform*.

Inisiatif Strategis DJPb Tahun 2020

Pada tahun 2020, Ditjen Perbendaharaan berperan dalam pencapaian inisiatif strategis sebagaimana yang diamanatkan oleh KMK Nomor 125/KMK.01/2020. Ditjen Perbendaharaan merupakan *initiative owner* pada 2 (dua) Inisiatif Strategis yaitu Inisiatif Strategis Nomor 11 Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran melalui Penggunaan Teknologi Digital (*Shared Service* dan *Government Platform*) dan Inisiatif Strategis Nomor 13 Pengintegrasian Informasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara. Adapun penjabaran pada setiap ISRBTK dapat diuraikan sebagai berikut:

Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran melalui Penggunaan Teknologi Digital (*Shared Service* dan *Government Platform*)

1. Penyusunan dan penyelesaian regulasi *shared service*
 - a. Telah disahkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.05/2020 tentang Piloting Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Platform Pembayaran Pemerintah;
 - b. Telah diterbitkan peraturan pendukung untuk pelaksanaan Piloting Platform, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-25/PB/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Belanja Pegawai dan Belanja Barang Operasional dalam Piloting Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Platform Pembayaran Pemerintah;

- c. Telah dilakukan rangkaian rapat yang membahas berbagai aspek detil yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan *piloting* dan juga meminta pertimbangan dari Biro Hukum Kementerian Keuangan sebagai langkah pengamanan terhadap pelaksanaan *piloting* Platform Pembayaran Pemerintah.

2. Pembangunan sistem *Shared Service Center* (SSC) dan implementasi *Government Platform*.

Pembangunan sistem masih dalam proses, sistem integrasi tidak menghasilkan sistem baru dan rancangan *dashboard* masih dalam pembahasan. Pengembangan sistem *dashboard* dan rancangan probis untuk layanan operasional telah dilakukan sebagai sarana pendukung dan alat monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan *piloting platform*.

3. Pembentukan unit pengelola SSC (*ad hoc*)

- a. Unit *ad hoc* sudah dibentuk lintas direktorat melalui penetapan KEP Nomor 130/PB/2020 tentang Tim Pengelola Platform Pembayaran Pemerintah dengan menetapkan susunan Tim SSC *Ad hoc* dan Keputusan Direktur Sistem Perbendaharaan nomor KEP-36/PB.7/2020 tentang Keanggotaan Sekretariat Pelaksana Kegiatan Tim Pengelola Platform Pembayaran Pemerintah (*Ad Hoc*).

- b. Penyelesaian Kajian unit SSC *dedicated* sudah oleh Setditjen.

4. Implementasi SSC *Payroll* di Kemenkeu

- a. Telah dilakukan penyamaan data pegawai;
- b. Telah dilakukan pembuatan rekap gaji pada aplikasi Gaji; dan
- c. Telah dilakukan demo aplikasi sekaligus penyelesaian

SPP dan SPM gaji via PPP pada 23 Desember 2020.

5. Implementasi SSC *Non Payroll*

- a. MoU DJPb dengan PT PLN (Persero) telah ditetapkan tgl 23 Desember 2020 sedangkan MoU DJPb dengan PT Telkom sedang dalam proses penyusunan; dan
- b. *Integration Testing* dan UAT dengan Telkom dan PLN sudah dilakukan.

6. Implementasi penuh KKP

- a. Telah dilakukan sosialisasi edukasi kepada seluruh Kanwil DJPb dan KPPN melalui vidcon terkait implementasi KKP Lanjutan;
- b. Telah disusun laporan pemantauan dan evaluasi penggunaan KKP tahun 2019;
- c. Pengembangan/penyesuaian aplikasi Satker (SAS-Modul Silabi dan SAKTI) untuk memenuhi permintaan data DJP;
- d. Telah dilakukan survei ketersediaan mesin EDC kepada Satker mitra kerja;
- e. Telah ditetapkan PER-19/PB/2020 pada tanggal 30 September 2020 tentang Uji Coba Mekanisme Pembayaran dan Penggunaan KKP Atas Beban BA BUN;
- f. Sedang dikembangkan/disesuaikan aplikasi Satker (SAS-Modul Silabi dan Aplikasi SAKTI) dalam rangka implementasi KKP Satker BA BUN; dan
- g. Untuk satker biasa modul KKP sudah implementasi.

7. Sertifikasi Sistem Pembayaran Pemerintah

Telah dilakukan rangkaian rapat dengan agenda pembahasan rencana sertifikasi sistem yang akan dilakukan oleh pihak berwenang untuk melakukan sertifikasi.

8. Pembangunan interkoneksi sistem pengujian transaksi KKP dengan SAKTI, yaitu telah implementasi penuh SAKTI dengan KKP KPK.

Pengintegrasian Informasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara

Pada tahun 2020, terdapat target milestone yang dicapai yaitu pengusulan SIKRI sebagai platform integrasi keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (termasuk penetapan & penyesuaian BAS Pemda dengan BAS Pusat). Dalam rangka pencapaian *milestone* tersebut terdapat beberapa kegiatan utama yang telah dilaksanakan yaitu:

1. Telah ditetapkan KMK Nomor 5/MK.5/2020 tentang Pembentukan Tim SIKRI Tahun 2020.
2. Telah dilakukan simulasi Data Transaksi Keuangan pemda yang dikompilasi SIKD menjadi laporan keuangan oleh DJPK, sesuai UND15/PB.7/2020.
3. Telah dilakukan pembahasan dalam rapat Dit. ESI, Dit APK, Dit SITP, PMO DJPb dan PMO DJPK untuk membahas dan menyelaraskan interkoneksi antar kedua sistem.
4. Telah disusun rancangan *Blueprint* dan BDAT SIKRI (setelah melalui pembahasan dengan pihak terkait) dan telah disampaikan kepada Dirjen Perbendaharaan.
5. Telah diadakan pelatihan *capacity building* (SDM) analisis data, teknologi, dan infrastruktur pendukung, yang bekerja sama dengan *Brainmatic* dengan topik Training Systems Analysis and Design with UML;
6. Telah dikembangkan Modul Pelaporan SIKRI di level pelaporan dalam platform SPAN;
7. Telah dilakukan *Piloting* Modul Pelaporan SIKRI pada Kanwil DJPb pada bulan Agustus dan November 2020.

Inisiatif Strategis DJPb Tahun 2021

Pada tahun 2021, Ditjen Perbendaharaan berperan dalam pencapaian inisiatif strategis sebagaimana yang diamanatkan

oleh KMK Nomor 91/KMK.01/2021. Ditjen Perbendaharaan merupakan *initiative owner* pada 4 (empat) Inisiatif Strategis dengan penjabaran sebagai berikut:

Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran melalui Penggunaan Teknologi Digital (*Shared Service* dan *Government Platform*)

IS ini bertujuan untuk penyederhanaan proses bisnis pelaksanaan anggaran dengan penggunaan teknologi digital. Adapun capaian signifikan yang berhasil diraih pada tahun 2021 yaitu:

1. PPP telah berhasil melaksanakan pembayaran secara *full* elektronik menggunakan dokumen digital untuk pembayaran gaji untuk Satker lingkup DJPb dan Satker Setjen Kemenkeu (Biro Umum) mulai Gaji Januari 2021.
2. Telah berhasil dilaksanakan pembayaran secara *full* elektronik menggunakan dokumen digital untuk pembayaran *common expenses* (listrik dan telekomunikasi) pada 218 Satker Kemenkeu (1 satker Kantor Pusat Setjen dan 217 satker DJPb) mulai bulan Agustus 2021. Transaksi berhasil dilakukan melalui interkoneksi antara SAKTI dengan sistem PT PLN dan PT Telkom yang dilandasi oleh Perjanjian Kerja Sama (PKS).
3. PPP telah menggunakan dokumen elektronik disahkan dengan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi dan diamankan dengan OTP.
4. Telah berhasil dibangun *dashboard* pengawasan transaksi gaji dan *common expenses*.
5. Telah dilakukan *Soft Launching* Platform Pembayaran Pemerintah pada tanggal 5 November 2021 oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Hadiyanto, bersama perwakilan PT PLN (Haryanto WS, Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura, dan Bali) dan PT Telkom (Heri Supriadi, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko).
6. Telah dilakukan *quality assurance* oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan atas piloting PPP tahun 2021

dengan hasil 89% memenuhi kriteria yang didasarkan pada PMK 204/2020.

7. Implementasi *Digital Payment-Marketplace* pada satker lingkup Kemenkeu dan pada satker seluruh K/L mencapai 100%. Dari 1.200 satker yang ditargetkan, Digipay telah digunakan oleh 4.964 satker dari 76 K/L dan 920 vendor UMKM, serta telah berhasil menyelesaikan 11.467 transaksi dengan nominal Rp25,35 Milyar.
8. *Dashboard* monitoring penggunaan KKP telah selesai dan beroperasi. Ke depannya, kepatuhan pengguna KKP akan dipantau lebih baik.

Pengintegrasian Informasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara

IS ini bertujuan untuk mewujudkan terintegrasinya informasi keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Business Intelligence Pemerintah untuk mendukung pengambilan kebijakan fiskal yang komprehensif, dan meningkatkan sinergi keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Adapun capaian signifikan yang berhasil diraih pada tahun 2021 yaitu:

1. Konsolidasi laporan keuangan dan laporan statistik keuangan pemerintah secara terintegrasi melalui SIKRI Modul Pelaporan. Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia Modul Pelaporan (SIKRI MP) merupakan sistem informasi yang mengintegrasikan data keuangan Pemerintah Pusat pada SPAN & data keuangan pemerintah daerah dari SIKD di level laporan keuangan dengan tujuan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian dan laporan statistik keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
2. Penyusunan *Enterprise Architecture* SIKRI yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang menggambarkan gambaran dan arah pengembangan SIKRI.
3. Penyusunan draft Bagan Akun Standar Konsolidasian level

Akun yang akan menjembatani dan mengharmonisasikan perbedaan penggunaan BAS Pemerintah Pusat dan BAS Pemerintah Daerah.

4. Uji coba interkoneksi data pemerintah daerah (data Laporan Realisasi Anggaran) secara parsial dari SIKD ke SIKRI.
5. Pembentukan Tim Kerja Pengembangan SIKRI yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 165/KMK.5/2021 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Pengintegrasian Informasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021.

Data Analytics Tema Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas

IS ini bertujuan untuk pemanfaatan *data analytics* dalam pengelolaan belanja negara yang berkualitas. Adapun capaian signifikan yang berhasil diraih pada tahun 2021 yaitu:

1. *Big Data Analytics* BLU melakukan penentuan model analisis efisiensi dengan menggunakan *Data Envelopment Analysis* (DEA).
2. Otomasi pengelolaan data menggunakan mesin sehingga kecepatan pengolahan data meningkat 266 kali lebih cepat, menghilangkan anggaran lembur, efisiensi anggaran gudang dan arsip melalui digitalisasi data, serta penyediaan *dashboard financial advisor* sebagai *tools* untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah berbasis data.
3. Laporan evaluasi pendanaan terintegrasi antara Belanja K/L dengan DAK Fisik (Sektor Pendidikan dan Jalan).
4. Telah didapatkan dan dipelajari hasil evaluasi kinerja penganggaran K/L tahun 2020 yang disusun oleh DJA yang dilakukan dari aspek: konteks, manfaat, dan implementasi.
5. *Continuous* audit ketepatan pembayaran iuran jaminan kesehatan dengan temuan kompensasi pembayaran kelebihan lebih dari 10 Miliar Rupiah sampai dengan Triwulan II.

Data Analytics Tema Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali

IS ini bertujuan untuk mewujudkan efisiensi penganggaran dan pembiayaan, memperkuat pengelolaan risiko, serta meningkatkan kinerja investasi pemerintah. Adapun capaian signifikan yang berhasil diraih pada tahun 2021 yaitu:

1. *Data Analytics* Pemberdayaan Masyarakat melalui Bantuan Sosial dan Pembiayaan Pemerintah kepada UMKM telah mengumpulkan data terkait program bansos dan pembiayaan.
2. Pengumpulan data terkait modernisasi kegiatan analisis biaya dan risiko portofolio utang dan mengembangkan beberapa model proyeksi *yield* Surat Berharga Negara (SBN).
3. *Dashboard* dan *data analytics* prediktif potensi biaya rekonstruksi gedung perkantoran yang ada di daerah rawan gempa mampu memprediksi serta melihat potensi biaya rekonstruksi gedung perkantoran di wilayah rawan bencana sehingga dapat merekomendasikan prioritas objek yang perlu diasuransikan. Hal ini dapat dikembangkan tidak hanya di Kementerian Keuangan, tetapi juga secara nasional.
4. Analisis Prediktif Kualitas Pinjaman Pemerintah melakukan normalisasi *data training* dan *testing*.
5. Pemahaman bisnis terhadap *government investment* portfolio *analysis* dengan pelatihan manajemen portofolio investasi.
6. Telah ditemukan anomali-anomali dan telah dikoordinasikan dengan unit terkait pada *project Data Analytics continuous audit* atas pelayanan lelang melalui internet.
7. Hasil dari proyek *data analytics* pinjaman luar negeri dapat digunakan sebagai peringatan dini untuk memperkirakan apakah sebuah proyek yang dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri akan selesai tepat waktu atau tidak.

Inisiatif Strategis DJPb Tahun 2022

Pada tahun 2022, Ditjen Perbendaharaan berperan dalam pencapaian inisiatif strategis sebagaimana yang diamanatkan oleh KMK Nomor 88/KMK.01/2022. Ditjen Perbendaharaan merupakan *initiative owner* pada 5 (lima) Inisiatif Strategis dengan penjabaran sebagai berikut:

Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran melalui Penggunaan Teknologi Digital (*Shared Service* dan *Government Platform*)

IS ini bertujuan untuk penyederhanaan proses bisnis pelaksanaan anggaran dengan penggunaan teknologi digital. Adapun capaian signifikan yang berhasil diraih pada tahun 2022 yaitu:

1. Penyelesaian *User Requirement* interkoneksi HRIS – aplikasi Gaji Web.
2. Pengembangan *Dashboard Gaji* dan *Common Expense* versi 2.0.
3. Implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) Tertsertifikasi pada aplikasi Gaji Web, sistem Mitra (PLN dan Telkom), dan SAKTI.
4. Sosialisasi, *end user training* (EUT) dan survei readiness ke satker piloting tahap 1 fase 2 & 3 untuk gaji dan fase 2 untuk *common expenses*.
5. Perluasan piloting transaksi gaji ke seluruh satker lingkup Kemenkeu.
6. Perluasan piloting transaksi *common expenses* ke Unit Eselon 1 Kemenkeu non kantor vertikal (fase 2).
7. Penetapan PMK 182/2022 sebagai revisi dari PMK 204/2020.
8. Penyelesaian PER-20/2022 sebagai revisi PER-25/2020.
9. Penyelesaian *Business Continuity Plan* (BCP) PPP (ditetapkan

melalui KEP-300/2022).

10. Penyelesaian Kajian Belanja Perjalanan Dinas melalui Platform.
11. Penyelesaian Kajian Belanja Bantuan Sosial dan Bantuan Pemerintah melalui Platform.
12. Penyelesaian pengembangan *Digipay* Satu Terintegrasi.
13. Penyelesaian interkoneksi DIGIT sistem KKP Himbara (Bank Mandiri).

Pengintegrasian Informasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara

IS ini bertujuan untuk mewujudkan terintegrasinya informasi keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta *Business Intelligence* Pemerintah untuk mendukung pengambilan kebijakan fiskal yang komprehensif, serta meningkatkan sinergi keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Adapun capaian signifikan yang berhasil diraih pada tahun 2022 yaitu:

1. Penetapan KMK Nomor 556/KMK.01/2021 Tanggal 31 Desember 2021 tentang *Enterprise Architecture* Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia dan KMK Nomor 111/KMK.-5/2022 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Pengintegrasian Informasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022.
2. Pengembangan BAS Konsolidasian level Fungsi dan Subfungsi pada SIKRI dengan output Kertas Kerja LRA Per Urusan untuk jenis laporan LKPP, LKPDK, dan LKPK.
3. Interkoneksi SIKRI dengan SIKD telah dibangun, aliran data Pemerintah Daerah dari SIKD telah dapat diunduh di SIKRI melalui Menu SIKRI – *Raw Data* Pemerintah Daerah.
4. *Deployment Dashboard* Data Analytics SIKRI pada Online Monitoring SPAN Dev.

5. *Deployment Dashboard* Monitoring Pengawasan Data Keuangan Pemda pada Online Monitoring SPAN Dev.
6. Penyelenggaraan Kegiatan Training *Data Analytics and Business Intelligence* dalam rangka Pengembangan Data Analytics SIKRI Tahap I Tahun 2022.
7. Pengembangan Dashboard SIKRI MP *Framework OMSPAN* sebagai *interface* kepada stakeholder untuk memperoleh/ mengakses informasi terkait data maupun output dari SIKRI.

Penguatan *Regional Chief Economist* dalam Rangka Kesenambungan Fiskal Berbasis Kewilayahan

IS ini bertujuan untuk sinergitas Kemenkeu berbasis kewilayahan untuk mengoptimalkan peran *Regional Chief Economist*. Adapun capaian signifikan yang berhasil diraih pada tahun 2022 yaitu:

1. Penerbitan KMK Nomor 395/KMK.01/2022 tentang Program Penguatan *Regional Chief Economist* dalam Rangka Kesenambungan Fiskal Berbasis Kewilayahan.
2. Pembentukan standar kerangka kerja yang menjadi acuan pelaksanaan RCE lintas Unit Eselon I Kemenkeu sebagaimana yang telah tercantum dalam KMK Nomor 395/KMK.01/2022.
3. *Rollout* pelaksanaan ALCo Regional, penajaman KFR, dan implementasi FKPN.
4. *Deployment Dashboard* RCE yang dikembangkan pada platform *Executive Information System*.
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi fungsi Kemenkeu kewilayahan triwulan I s.d. triwulan IV tahun 2022.

Sinergi Pemberdayaan UMKM



IS ini bertujuan untuk sinergi Kemenkeu berbasis kewilayahan dalam mendukung UMKM. Adapun capaian signifikan yang berhasil diraih pada tahun 2022 yaitu:

1. Penetapan KMK Nomor 396/KMK.01/2022 tentang Program Sinergi Pemberdayaan UMKM Kementerian Keuangan.
2. Pembentukan *Liaison Officer* pada masing-masing UE-1/SMV/Perwakilan Kemenkeu.
3. Pembentukan peta proses bisnis serta rencana kerja program sinergi pemberdayaan UMKM di lingkungan Kemenkeu.
4. Pelaksanaan sinergi program pemberdayaan UMKM di beberapa wilayah/unit kerja sebanyak 319 kegiatan dan 2.116 UMKM binaan.
5. Pengumpulan data UMKM Binaan sebagai dasar pembentukan *database* UMKM Kemenkeu.
6. Pengembangan platform/portal umke.kemenkeu.go.id.
7. Penyusunan kaleidoskop sinergi pemberdayaan UMKM Kemenkeu Satu Tahun 2022.

Pengembangan *Business Intelligence* Pengelolaan Likuiditas

IS ini bertujuan untuk penyediaan perangkat (sistem) yang memberikan fleksibilitas penyajian data realisasi maupun proyeksi dan menghasilkan proyeksi menggunakan pendekatan *Learning Machine* sehingga mampu memberikan input dalam pengambilan keputusan. Adapun capaian signifikan yang berhasil diraih pada tahun 2022 yaitu:

1. Pengadaan lelang dan penetapan vendor *Business Intelligence*.
2. Analisis kebutuhan sistem pengembangan fungsi *Machine Learning*.
3. Pengembangan fungsi statistic.
4. Pengembangan *presentation layer*.
5. Transfer knowledge penyusunan report dan dashboard serta pengelolaan dan penyiapan data mendukung report dan dashboard.

Inisiatif Strategis DJPb Tahun 2023

Pada tahun 2023, Ditjen Perbendaharaan berperan dalam pencapaian inisiatif strategis sebagaimana yang diamanatkan oleh KMK Nomor 124 Tahun 2024 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan. Ditjen Perbendaharaan merupakan initiative owner pada 6 (enam) Inisiatif Strategis dengan penjabaran sebagai berikut:

Pengintegrasian Informasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara

IS ini bertujuan untuk mewujudkan terintegrasinya informasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Business Intelligence Pemerintah untuk mendukung pengambilan kebijakan fiskal yang komprehensif serta meningkatkan sinergi keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Adapun capaian signifikan yang berhasil diraih pada tahun 2023 yaitu:

1. Penyediaan data posisi keuangan dan realisasi anggaran.
2. Klasifikasi jenis belanja dan fungsi dengan data detail program sampai dengan output kegiatan.
3. Kompilasi data berbasis interkoneksi antara SPAN (data keuangan Pemerintah Pusat) dan SIKD (data keuangan Pemerintah Daerah) yang mengurangi proses input manual, lebih cepat, akurat, dan utuh.
4. Simplifikasi dan otomatisasi proses bisnis penyusunan laporan secara sistem sehingga optimalisasi sumber daya.
5. Output SIKRI digunakan sebagai sumber data analisis, evaluasi kebijakan, mendukung pengambilan keputusan kebijakan fiskal, dan mendukung GFS, RCE, dan FA.

Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran melalui Penggunaan Teknologi Digital (*Shared Service* dan *Government Platform*)

IS ini bertujuan untuk menyederhanakan proses belanja negara dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Adapun capaian signifikan yang berhasil diraih pada tahun 2023 yaitu:

1. Transaksi piloting *common expenses* (pembayaran tagihan listrik dan telekomunikasi) sudah seluruh satker Kemenkeu, sehingga piloting tahap I sudah selesai.
2. Proses Quality Assurance oleh Itjen atas piloting tahap I sudah selesai dengan hasil pemenuhan kriteria 100%.
3. Penyusunan regulasi, pengembangan sistem, dan transaksi piloting tunjangan kinerja fase 1.
4. Penyusunan regulasi, pengembangan sistem, dan transaksi piloting uang makan fase 1.
5. Penyusunan regulasi, pengembangan sistem, dan transaksi piloting lembur fase 1.
6. Penyusunan kajian unit dedicated pengelola PPP.
7. Pengembangan interkoneksi Digipay dengan SAKTI.
8. Pengembangan interkoneksi Digipay dengan Bela Pengadaan.
9. Interkoneksi DIGIT – Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Himbara.
10. Piloting penggunaan Government E-Wallet pada transaksi pembayaran lembur pegawai.

Modernisasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)



IS ini bertujuan untuk penyempurnaan integrasi dan interkoneksi pengelolaan perbendaharaan di Kementerian Keuangan dalam sebuah sistem informasi keuangan terintegrasi. Adapun capaian signifikan yang berhasil diraih pada tahun 2023 yaitu:

1. *Feasibility Study Pre-Upgrade Assessment.*
2. *SPAN Knowledge Repository Management.*
3. *Initial research: Policy Recommendation and Future Direction.*
4. *COTS Assessment: Proof of Concept and Assessment.*
5. *Resolution for Alternative Implementation SPAN Next Gen.*
6. *Software and Infrastructure Migration SPAN Next Gen.*

Sinergi Pemberdayaan UMKM



IS ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi Kementerian Keuangan yang berbasis kewilayahan dalam mendukung sinergisitas layanan, nilai keekonomian, serta efektivitas penyaluran bantuan pemberdayaan pada UMKM. Adapun capaian signifikan yang berhasil diraih pada tahun 2023 yaitu:

1. Pembentukan Tim Pembina UMKM lingkup DJPb oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan KEP-82/PB/2023 tentang Tim Taskforce Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2023.
2. Sosialisasi optimalisasi pengadaan barang dan jasa melalui market place dengan *Digital Payment* (Digipay) ke Kantor Wilayah DJPb dan KPPN.
3. Pendampingan dan pelaksanaan teknis registrasi UMKM Binaan Kemenkeu menjadi *supplier* pada Digipay.
4. Monitoring dan evaluasi optimalisasi pengadaan barang dan jasa melalui *market place* dengan Digipay.

Penguatan *Regional Chief Economist* dalam Rangka Kestinambungan Fiskal Berbasis Kewilayahan

IS ini bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan RCE lintas Unit Eselon I untuk dapat memberikan gambaran ekonomi makro dan fiskal di tingkat regional dalam rangka mendukung pengambilan kebijakan nasional dan regional, serta memetakan potensi daerah yang dapat digunakan untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi regional. Adapun capaian signifikan yang berhasil diraih pada tahun 2023 yaitu:

1. Telah dicapai beberapa hal yang dilaksanakan di Kanwil dan KPPN antara lain: masuknya Kanwil dalam forum strategis daerah seperti TPAKD, TPID, Forkopimda, dan lain-lain; penyertaan informasi KFR dalam Laporan Perekonomian BI; dan kajian digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Ranperda PDRD.
2. Telah terlaksana Training Penyusunan ALCo Regional, CPIN Regional, dan Training Perencanaan Kas dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Regional sebagai penguatan analisis konsolidasian APBN dan APBD.
3. Telah tersusun Analisis Peluang Investasi Daerah pada setiap provinsi.
4. Telah terlaksana kegiatan FKPKN dan keterlibatan local expert, serta keterlibatan unit vertikal Kemenkeu di daerah dalam tim/forum yang terbentuk di daerah (saat ini Kanwil DJPb berhasil dilibatkan secara resmi dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah [TIPD]).
5. Telah terlaksana Program *Secondment* Triwulan I sampai dengan III 2023 dengan melibatkan *seconded* dari DJPK dan BKF dan diseminasi hasil program *secondment* oleh *seconded* dan Tim Counterpart Kanwil lokasi *secondment*.

Analisis Data: Tingkat Efisiensi Belanja Badan Layanan Umum Rumpun Pengelola Barang dan Jasa Lainnya.

IS ini bertujuan untuk mewujudkan layanan masyarakat yang berkualitas melalui belanja BLU utamanya rumpun pengelola barang dan jasa lainnya yang efisien dan tepat sasaran. Adapun capaian signifikan yang berhasil diraih pada tahun 2023 yaitu:

1. Pemahaman proses bisnis BIOS dalam meningkatkan data BLU rumpun lainnya, dengan tahapan brainstorming atas pemetaan satker BLU pengelola barang dan jasa lainnya, pengumpulan belanja per bulan selama 6 tahun terakhir, pengumpulan data layanan 3 tahun terakhir, dan identifikasi literatur serta perencanaan dan persiapan penyediaan infrastruktur.
2. Pemahaman input, output, dan outcome BLU penyedia barang/jasa lainnya.
3. Penyiapan data keuangan BLU dan layanan BLU penyedia barang/jasa lainnya.
4. Design model analisis, output, dan dashboard untuk dashboard analisis barang jasa (Dashboard DEA BLU).
5. Uji model dengan menganalisis dashboard DEA BLU dan evaluasi output.
6. Finalisasi hasil olah data dengan output Laporan Data *Analytic* "Tingkat Efisiensi Belanja Badan Layanan Umum Rumpun Pengelola Barang dan Jasa Lainnya" Tahun 2023.



Imago

Setelah metamorfosis selesai, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong dengan sayap yang **masih basah dan kusut**. Serupa dengan awal proses transformasi masih kusut sehingga harus disampaikan dengan **pendekatan strategi komunikasi** yang tepat kepada seluruh insan Perbendaharaan supaya pesan transformasi yang tersampaikan dapat diterima serta diimplementasikan sesuai dengan tujuan transformasi kelembagaan yang akan dicapai.

BAGIAN II: SATU DEKADE QUICKWINS DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GAMBARAN UMUM QUICKWINS DJPB

Quickwins merupakan suatu inisiatif dengan karakter dapat direalisasikan dan cepat dicapai, yang mengawali suatu program besar dan sulit. Dalam hubungannya dengan Transformasi Kelembagaan. Quickwins berupa inisiatif atau inovasi untuk mendukung dan mengakselerasi pencapaian program Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan dan Transformasi Kelembagaan, baik secara langsung atau tidak langsung, ataupun kegiatan prioritas yang dapat dicapai dalam kurun waktu satu tahun.

Quickwins diusulkan oleh masing-masing unit eselon II Kantor Pusat DJPb kepada Ketua Project Management Office (PMO). Selanjutnya setelah dilakukan reviu oleh tim PMO DJPb terhadap

kesesuaian dengan kriteria pengusulan quickwins, usulan quickwins tersebut akan dibahas di Board of Director (BoD) Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. Setelah disetujui, quickwins akan dituangkan serta disahkan dalam dokumen berbentuk Treasury Charter, sebagai bentuk komitmen dari para Pimpinan DJPb untuk mencapai dan menyelesaikan quickwins tersebut. Treasury Charter ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dan seluruh Direktur/Sekretaris pada lingkungan Kantor Pusat DJPb. Kemudian setiap bulan, tim PMO DJPb akan melaksanakan one on one meeting untuk melaksanakan monitoring perkembangan quickwins.

JEJAK LANGKAH SATU DEKADE QUICKWINS DJPB



Gambar: Jejak Langkah Satu Dekade Quickwins DJPb

PELAKSANAAN QUICKWINS DJPB

Quickwins DJPb Tahun 2014

Sistem Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G2)

Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2) adalah penyempurnaan dari modul penerimaan Negara sebelumnya yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan berhubungan dengan penerimaan negara. Penyempurnaan dilakukan dengan menggunakan Electronic Billing System dan memanfaatkan channelling pembayaran perbankan dalam melakukan penyetoran penerimaan negara. Pada tahun 2014, jumlah Bank yang sudah melakukan transaksi melalui MPN G2 sebanyak 22 Bank dari 82 Bank yang melakukan penerimaan pada MPN versi terdahulu. Adapun manfaat yang diperoleh dengan adanya MPB G2 adalah sebagai berikut:

1. Lebih mudah: Transaksi dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja melalui ATM, Internet Banking, dan EDC.
2. Lebih cepat: transaksi pembayaran pajak/PNBP hanya dalam hitungan menit.
3. Lebih akurat: kesalahan data pembayaran seperti kode akun dan kode jenis setoran dapat diminimalisasi secara sistem.

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) adalah program transformasi berskala besar yang menempatkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Anggaran dan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan sebagai *leading institutions*, meliputi pembangunan sistem

perbendaharaan dan anggaran negara yang sesuai dengan best practices, serta didukung oleh sistem informasi yang modern, baik yang terkait dengan software maupun hardware.

Proses Penyelesaian SPAN membutuhkan perpanjangan waktu penyelesaian yang semula direncanakan full implementasi pada akhir 2014 menjadi tahun 2015 dikarenakan adanya isu Financial Integrity (Penyatuan Laporan Keuangan) yang belum terselesaikan sehingga memerlukan eskalasi dan dukungan dari *Steering Committee* dan Tim RPPN SPAN yang melibatkan pimpinan Kementerian Keuangan. Rollout I 2015 sebanyak 16 Kanwil dan 78 KPPN telah selesai dilaksanakan pada tanggal 2-17 Januari. Adapun rollout II 2015 direncanakan pada 25 Januari -7 Februari 2015 di 10 Kanwil dan 39 KPPN.

Treasury Dealing Room (TDR)

Treasury Dealing Room (TDR) merupakan tempat dilangsungkannya proses pengelolaan kelebihan kas negara. TDR berfungsi dalam mengelola likuiditas (merencanakan dan mengendalikan arus kas), mengelola reserved fund dalam bentuk aset portofolio yang menghasilkan serta mengalokasikan berdasarkan kondisi liability beserta risiko-risikonya sehingga mendapatkan sumber pembiayaan yang paling murah.

Dalam mewujudkan TDR yang modern dan unggul memerlukan persiapan yang matang dan berkesinambungan. Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah melakukan berbagai langkah dimulai dari mempersiapkan peraturan sebagai payung hukum pelaksanaan TDR, mendidik sumber daya manusia yang akan bertindak sebagai manajer investasi, mempersiapkan struktur organisasi pengelola TDR hingga mempersiapkan sarana dan prasarana gedung serta infrastruktur teknologi informasi yang akan digunakan. Namun pelaksanaan TDR belum dapat dilaksanakan secara penuh pada tahun 2014 karena masih hambatan. Operasional TDR ditunda dan ditargetkan *grand launching* TDR akan dilaksanakan pada tahun 2015.

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Pelaksanaan Akuntansi Berbasis Akrua berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor PP 71/2010 menegaskan bahwa Implementasi basis akrual dilaksanakan paling lambat tahun 2015.

Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015, Kementerian Keuangan menerapkan Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) yang menekankan penambahan menu transaksi Jurnal Penyesuaian untuk menghimpun transaksi-transaksi akrual yang di input secara manual dan penyempurnaan format laporan.

Quickwins DJPb Tahun 2015

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)

SPAN secara resmi diluncurkan oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara pada 29 April 2015. Selain penyelesaian pengembangan SPAN, DJPb juga mengembangkan Aplikasi Online Monitoring SPAN (OM SPAN), yaitu aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui jaringan intranet dan internet yang digunakan untuk melakukan monitoring transaksi SPAN dan menyajikan reporting sesuai kebutuhan. Bagi Kementerian/Lembaga, aplikasi OM SPAN bermanfaat untuk mengetahui kebutuhan informasi terkait Modul Penganggaran (DIPA), Modul Komitmen (Supplier dan Kontrak), Modul Pembayaran (Tagihan SPM) secara real time online kapan saja tanpa datang ke KPPN. Adapun bagi internal DJPb, Aplikasi OM SPAN bermanfaat untuk mengetahui kebutuhan informasi terkait Manajemen Pengguna

Aplikasi, Modul Penganggaran, Modul Komitmen, Modul Kas, Modul Pembayaran, dan Modul Penerimaan. Aplikasi OM SPAN dikembangkan dalam kerangka meningkatkan layanan publik dalam hal penyaluran APBN agar lebih transparan dan akuntabel.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)

SAKTI adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mengintegrasikan berbagai aplikasi yang saat ini digunakan oleh Satuan Kerja (Satker). Aplikasi SAKTI dirancang ber-interface dengan SPAN pada tiap tahapan siklus anggaran. Antara SPAN dan SAKTI terjadi pertukaran/komunikasi data secara berkala. Interkoneksi difasilitasi dengan beberapa jembatan komunikasi antara Satker dan KPPN untuk menerima dan mengirim data dari SPAN, sehingga terjadi pertukaran data secara berkala yang mempermudah satker. Beberapa Keunggulan Aplikasi SAKTI, yaitu:

1. Menggunakan satu database yang terpusat dan sama (single database);
2. Tingkat keamanan tinggi dengan proses enkripsi/dekripsi ADK;
3. Dapat diinstal di beberapa sistem operasi komputer (Windows, Linux);
4. Lebih mudah digunakan;
5. Dapat dijalankan dalam spesifikasi komputer yang murah dan sederhana;
6. Kinerja aplikasi yang konsisten/minim permasalahan;
7. Memiliki akurasi input dan output data yang baik.
8. Portal SAKTI yang terkoneksi dengan SPAN mempermudah satker dalam mengirimkan ADK ke Aplikasi SPAN.

Pembayaran Gaji Langsung ke Rekening Pegawai

Pengelolaan administrasi belanja pegawai Pusat masih dilaksanakan secara manual dan cenderung belum tertib serta tidak akurat, sehingga diperlukan perbaikan atas pengelolaan Gaji Pemerintah Pusat.

Proses pengalihan administrasi Belanja Pegawai untuk PNS Pusat telah mencapai angka 100% pada Juni 2010, untuk PNS dan Anggota Polri mencapai 100% pada Juli 2014, sedangkan untuk PNS Kemenhan dan Anggota TNI pada tahun 2015 ditetapkan 20 Satker pilot project dan ditargetkan mencapai 100% untuk anggota TNI serta PNS Kemhan pada akhir tahun 2016.

Pembayaran Langsung ke Rekening Penerima Manfaat di Luar Negeri Secara Penuh

Pembayaran langsung ke rekening penerima manfaat di luar negeri secara penuh dilakukan untuk transaksi pada Perwakilan RI dan Atase Teknis. Sesuai dengan perkembangan teknologi dan dalam rangka meningkatkan efisiensi Mekanisme Pelaksanaan APBN pada Perwakilan RI di Luar Negeri serta dengan memperhatikan kekhasan karakteristik Perwakilan RI di Luar Negeri, dipandang perlu pengaturan khusus.

Dasar hukum pembayaran langsung ke rekening penerima manfaat di luar negeri secara penuh telah ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 2015, yakni PMK Nomor 160/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN pada Perwakilan RI di Luar Negeri. Sosialisasi PMK 160/2015 telah dilaksanakan di tiga negara yakni di Spanyol, Uni Emirat Arab, dan Indonesia.

Implementasi E-Billing System pada Seluruh Bank/Pos Persepsi

MPN G2 sudah diluncurkan secara resmi pada tanggal 27 April 2014. Dengan diluncurkan secara resmi, diharapkan implementasi system MPN G2 akan dapat segera terlaksana,

sehingga kelemahan-kelemahan yang ada di sistem sebelumnya dapat diminimalisir. Pada tahun 2015, telah tergabung sebanyak 45 Bank/Pos Baru sehingga total dengan tahun 2014 menjadi 65 Bank Persepsi dan 1 Pos Persepsi. Dari 66 Bank/Pos Persepsi tersebut, hanya 11 Bank yang sudah lulus UAT untuk layanan dengan ATM, 9 Bank dengan Internet Banking serta hanya 3 Bank yang melayani dengan menggunakan mesin EDC.

Peluncuran Aplikasi Perencanaan Kas Versi Terbaru

Upaya untuk menyusun sebuah mekanisme perencanaan kas telah dimulai dengan diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas. Peraturan tersebut perlu mendapatkan penyempurnaan karena adanya hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan PMK 192/PMK.05/2009. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dihadirkanlah Aplikasi Perencanaan Kas Generasi Terbaru dengan beberapa kelebihan antara lain:

1. Memperbaiki informasi Rencana Penarikan Dana (RPD) dan Rencana Penerimaan Dana yang tercantum dalam DIPA;
2. Memperbaiki Rencana Pelaksanaan Kegiatan untuk mendukung pencapaian target kinerja;
3. Memberikan informasi bagi BUN/Kuasa BUN dalam rangka pengelolaan likuiditas;
4. Memberikan sumber informasi mengenai target penerimaan dan meningkatkan kepastian atas tercapainya target penerimaan tersebut.

Perluasan Tahap 1 Treasury Single Account (TSA) untuk Rekening Bendahara Pengeluaran

Upaya pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan kas negara berfokus pada penerapan TSA yang sesuai dengan praktik internasional yang baik. Tujuan penerapan TSA di Indonesia mencakup:

1. pengendalian saldo kas dan arus kas melalui ketentuan hukum yang mewajibkan seluruh penerimaan dan pengeluaran untuk melalui TSA;
2. mengkonsolidasikan saldo-saldo kas pemerintah dalam TSA setiap hari dengan menggabungkan saldo kas di berbagai rekening bank yang digunakan untuk membayar biaya operasional pemerintah;
3. meminimalkan kas mengambang di berbagai rekening bank pemerintah di luar TSA untuk mengurangi risiko dan mengoptimalkan imbalan atas sumber daya kas pemerintah;
4. meningkatkan akuntabilitas melalui transparansi dalam pengelolaan penerimaan dan belanja negara.

Klinik Akuntansi AkruaI sebagai Tempat Konsultasi seputar Laporan Keuangan

Klinik Akuntansi AkruaI menjadi salah satu strategi manajemen risiko dari Pemerintah untuk menghadapi perubahan basis akuntansi dari *Cash Towards Accrual* (CTA) menjadi basis akuntansi Accrual. Sejak diluncurkan pada bulan Juni 2015, Klinik Akuntansi AkruaI telah membantu Kementerian/Lembaga untuk konsultasi seputar penyusunan laporan akuntansi pemerintah. Diharapkan adanya Klinik Akuntansi ini dapat dijadikan pusat konsultasi dan edukasi pemahaman akuntansi akrual di lingkup Kementerian Negara/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam menyukseskan pelaksanaan akuntansi akrual sebagaimana diamanatkan oleh PP 71 Tahun 2010.

Online Serial Tutorial Aplikasi SAIBA

Dalam rangka Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI pada Pemerintah Pusat diperlukan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA). Tutorial Aplikasi SAIBA tersebut merupakan dokumentasi proses

bisnis dan tata cara pengoperasian aplikasi SAIBA yang dikemas dalam bentuk format video. Pada tanggal 10 November 2015, Tutorial Aplikasi SAIBA diluncurkan oleh Menteri Keuangan RI Bambang Brodjonegoro. Tutorial Aplikasi SAIBA terdiri dari beberapa seri episode dengan tema-tema tutorial yang saling berurutan sebagai satu kesatuan dalam contoh simulasi. Video Tutorial SAIBA ini terdiri dari 4 (empat) episode yaitu: proses bisnis, instalasi, jurnal balik, dan jurnal penyesuaian.

Website Pelaporan Data Pemerintah Pusat dan Daerah Konsolidasian

Dalam rangka mempermudah pelaporan GFS dan mendukung Transformasi Kelembagaan terutama pada inisiatif strategis “Pengintegrasian Informasi Keuangan Pemerintah dan Daerah”, dibangunlah Website Pelaporan Data Pemerintah Pusat Dan Daerah Konsolidasian. Website ini menyediakan data dan informasi serta Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia (SIKAPI).

Pengalihan Penatausahaan Penerusan Pinjaman dari Bank Penata Usaha (BPU) ke KPPN Khusus Investasi

KPPN Khusus Investasi mulai beroperasi pada Januari 2015. Awal pembentukan KPPN Khusus Investasi diisi 20 pegawai, 1 kasubbag umum, 4 kepala seksi, dan dipimpin Plt. Kepala Kantor Ismed Saputra. Dengan dibentuknya KPPN Khusus Investasi sebagai pengganti Bank Penata Usaha, proses pencairan DIPA Penerusan Pinjaman hingga repayment/setelmen saat closing date dan penutupan perjanjian ditangani oleh KPPN Khusus Investasi. Selain itu, aspek penagihan yang dahulu dilakukan oleh Bank Penata Usaha berdasarkan hasil rekonsiliasi jangka waktu sekarang dilakukan oleh KPPN Khusus Investasi tanpa menunggu rekonsiliasi jangka waktu.

BLU's Integrated Online System (BIOS)

BLU's Integrated Online System (BIOS) merupakan aplikasi yang dibangun Direktorat PPK-BLU dalam rangka menunjang pelaksanaan berbagai proses bisnis yang ada maupun dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada stakeholders. Sistem Informasi terintegrasi ini menghubungkan beberapa proses bisnis utama BLU sebagai satu kesatuan sistem yang saling terkoneksi, saling cross check dan menjaga konsistensi serta kevalidan atas informasi yang dihasilkan. BIOS terdiri dari beberapa modul antara lain: modul Profil, modul RBA, modul Tarif, modul Remunerasi, modul Penilaian Kinerja, modul laporan keuangan dan dashboard transaksi keuangan BLU.

Quickwins DJPb Tahun 2016

Layanan Bersama (Co-Location)

Dalam rangka memberikan pelayanan secara komprehensif kepada pengguna jasa di bidang keuangan negara, khususnya perbendaharaan dan kekayaan negara yang dilaksanakan oleh instansi vertikal di lingkungan Kementerian Keuangan, maka ditetapkan layanan bersama (co-location). Cakupan wilayah pelaksanaan layanan bersama tahun 2016, cakupan wilayah pelaksanaan layanan bersama adalah 23 provinsi. Adapun dampak atas implementasi layanan bersama (co-location) yaitu meningkatkan kualitas layanan bagi stakeholder di daerah (mudah, cepat dan sederhana), mendukung efisiensi pelaksanaan APBN, meningkatkan sinergi antar unit eselon I di Kementerian Keuangan (melibatkan DJPBN, DJKN, DJPPR dan Sekjen), dan mempersingkat waktu penyelesaian pekerjaan.

Pengembangan SDM melalui Pemilihan Pegawai Berprestasi

Pemilihan Pegawai Berprestasi berlangsung dari Bulan April hingga bulan Juni 2016. Selama periode tersebut sebanyak 76 nominator diusulkan oleh unit eselon II ke Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan untuk menjadi pegawai berprestasi. Selanjutnya, ditetapkan Pegawai Berprestasi Ditjen Perbendaharaan Tahun 2016 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 452/PB/2016.

Peluncuran Ikhtisar Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

Ikhtisar Pelaksanaan Anggaran (IPA) merupakan media edukasi publik sebagai wujud public participatory program dalam rangka melibatkan masyarakat untuk mengawasi/mengontrol jalannya pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). IPA merupakan laporan singkat yang menyajikan rangkaian informasi tentang progres pelaksanaan APBN, khususnya pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat (Kementerian Negara/Lembaga), disajikan secara informatif dan menarik untuk keperluan public report. IPA disajikan dalam dua versi yakni versi web dan versi cetak.

Peluncuran Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Satuan Kerja dan Kementerian Negara/Lembaga (e-Sintesa)

Sistem Informasi Terpadu satuan Kerja dan Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut SINTESA adalah sistem penyelesaian permasalahan pelaksanaan anggaran Satuan Kerja dan Kementerian Negara/Lembaga yang dilaksanakan oleh KPPN, Kanwil Ditjen Perbendaharaan, dan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat Pelaksanaan Anggaran secara terstruktur dan berkelanjutan. SINTESA telah dilegitimasi melalui Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-9/PB/2016.

Penempatan Uang Negara di Bank Umum

Sebagai petunjuk teknis PMK 77/PMK.05/2016, Ditjen Perbendaharaan telah menetapkan Perdirjen Nomor 30/PB/2016 tentang Petunjuk Teknis Penempatan Uang Negara pada Bank Umum. Penempatan perdana dana senilai Rp200 Milyar dengan masa tenor 7 hari dilakukan dengan instrumen *Deposito On Call (DOC)* menggunakan *Reuters FX Trading*, sebuah sistem *universal* yang digunakan dalam transaksi keuangan. Selama periode 29 Februari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 telah dilaksanakan 20 kali penempatan uang di BUMPUN dengan tenor penempatan antara 7 hari sampai dengan 21 hari. Selama periode tersebut, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihasilkan adalah sebesar Rp68,6 milyar, melebihi dari target PNBP sebesar Rp40 milyar.

Uji Coba Penggunaan *Cash Management System/Internet Banking* pada Rekening

Pengeluaran Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan Melalui Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-18/PB/2016, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja lingkup DJPBN berkesempatan untuk melakukan uji coba terhadap layanan *CMS/Internet Banking*. Uji coba telah dilaksanakan mulai bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 secara bertahap. Puncak dari rangkaian uji coba tersebut adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 yang selanjutnya menjadi landasan hukum diberlakukannya penggunaan *CMS/Internet Banking* bagi seluruh Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka pengelolaan APBN yang lebih transparan dan akuntabel serta dalam rangka mendukung gerakan *cashless society* yang merupakan gerakan nasional yang digagas oleh Bank Indonesia bersama dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Informasi Setoran Langsung ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN)

Sehubungan dengan kebutuhan pelayanan atas konfirmasi penerimaan negara yang disetorkan secara langsung ke RKUN, disediakan layanan menu FIRA (Informasi Setoran ke Rekening Kas Umum Negara) yang terintegrasikan dalam Online Monitoring SPAN (OM SPAN) yang dapat membantu mempercepat proses konfirmasi setoran yang sebelumnya dilakukan melalui surat menyurat. Uji coba penerapan FIRA pada OM SPAN tersebut telah selesai dilaksanakan bersama dengan Direktorat PKNSI Ditjen Kekayaan Negara, Direktorat Penerimaan Negara, Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM dan Direktorat SITP pada tanggal 23 September 2016.

Implementasi Sistem Informasi Kredit Program Tahap I melalui Fasilitas Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) merupakan suatu sistem aplikasi yang dibangun untuk mempermudah pelaksanaan Kredit Program khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selama tahun 2016, capaian SIKP sebagai berikut:

1. Sosialisasi KUR dan SIKP bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah dilakukan setidaknya 5 kali.
2. Training of Trainers (TOT) SIKP dilakukan oleh Direktorat SMI kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan pada bulan Maret dan Oktober 2016.
3. Sebanyak 226 Pemda yang telah menandatangani MOU penggunaan SIKP dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
4. Dit SMI telah memberikan 300 user id kepada Pemerintah Daerah sebagai hak akses penggunaan SIKP.
5. Monitoring dan Evaluasi Validitas Data SIKP melibatkan seluruh Kanwil DJPBN dengan jumlah responden sebanyak 971 debitur tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Badan Layanan Umum *Electronic Services*

BLUES adalah peningkatan layanan kepada stakeholder melalui pemanfaatan media elektronik fungsi-fungsi layanan yang diambil dari BIOS (BLU *Online Integrated System*) dan website BLU. Pada bulan Desember 2016 target 8 layanan yang terdapat dalam BLUES telah running diantaranya adalah Informasi Profil, Analisis Data, *Online Monitoring*, *Helpdesk*, Penyampaian, Laporan Keuangan, Penyampaian Usulan Tarif, Penyampaian Usulan Remunerasi, dan Pelaporan Pembinaan. Semua layanan tersebut dapat diakses pada: www.blu.djpbk.kemenkeu.go.id & bios.djpbk.kemenkeu.go.id. selain itu terdapat 4 fitur tambahan yang terealisasi, yaitu: Penyampaian RBA; Penyampaian Laporan Dewan Pengawas; Penyampaian permohonan penggunaan saldo; dan Penyampaian permohonan belanja di atas ambang batas.

Pedoman Telaah Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

Dalam rangka mengawal proses penyusunan laporan keuangan terdapat proses penelaahan. Direktorat APK menyusun Pedoman Telaah Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Basis Akrua sebagai panduan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Quickwin ini telah berhasil diselesaikan dan diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2016.

Pembayaran Gaji Langsung ke Rekening Pegawai Kemenhan/TNI Tahap II

Pada tahun 2016 merupakan fase yang sangat penting dari proses pengalihan yaitu pembayaran gaji prajurit TNI dan PNS Kemhan langsung ke rekening masing-masing prajurit TNI dan PNS Kemhan dan hampir seluruh pembayaran gaji (99,46%) dilaksanakan langsung ke rekening prajurit TNI dan PNS Kemhan. Pembayaran gaji langsung ke rekening Prajurit TNI/

PNS Kemhan diharapkan menjamin pembayaran gaji secara tepat waktu dan mengurangi risiko TGR bagi Bendahara Pengeluaran.

Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahap I

Pada Tahun 2016 Direktorat Sistem Perbendaharaan telah melaksanakan 2 fase penting dalam rangka Sertifikasi Bendahara. Pertama, penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2016. Kedua, telah diterima sebanyak 3.546 orang pendaftar Sertifikasi Bendahara yang terdiri dari 808 orang bendahara dan 2.738 orang calon bendahara. Selanjutnya ditetapkan sebanyak 1.396 dapat direkomendasikan untuk diterbitkan Sertifikat Bendahara.

Implementasi SAKTI secara Penuh di Seluruh Satker Lingkup DJPb

Aplikasi SAKTI diresmikan penggunaannya pada tanggal 29 Maret 2016 dalam acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) oleh Presiden Republik Indonesia didampingi Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Aplikasi Sakti telah melewati fase piloting sesuai dengan mandat dari PMK 131/PMK.05/2016. Pada tahun 2016, SAKTI telah digunakan oleh seluruh satker lingkup DJPb. SAKTI merupakan gabungan dari beberapa aplikasi yang telah digunakan pada tingkat satuan kerja. Selain itu, SAKTI juga mengadopsi proses bisnis yang baru sesuai dengan proses bisnis yang dianut oleh SPAN.

Pengembangan Portal Kementerian/Lembaga yang Terkoneksi dengan SPAN

Untuk mengakomodasi interaksi antara SAKTI dan SPAN disediakan jembatan komunikasi antara satker dan KPPN yaitu Portal SPAN, SPAN SMS dan Portal Konverter. Dengan Portal SPAN, satker tidak perlu ke KPPN secara langsung untuk

penyampaian data (ADK). Selanjutnya konversi Arsip Data Komputer (ADK) yang diunggah satker ke Portal SPAN dilakukan dengan Portal Konverter sehingga ADK tersebut bisa diterima oleh SPAN. Adapun untuk mendistribusikan informasi terkait interaksi SPAN dan SAKTI dilakukan melalui media SMS yang di-handle oleh jaringan seluler yaitu SPAN SMS.

HAI DJPb

HAI-DJPBN Secara resmi diluncurkan pada 29 Maret 2016. HAI-DJPBN merupakan service desk berbasis website yang dapat diakses melalui internet dan intranet. Dengan adanya HAI-DJPBN, setiap pertanyaan dan permasalahan yang disampaikan oleh mitra kerja (stakeholders) dapat diselesaikan dan terdokumentasikan dengan baik sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan untuk mewujudkan visi Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Online Monitoring SPAN

Pada tahun 2016 OM SPAN memasuki generasi kedua yang disebut OM-SPAN G2 atau OM-SPAN Next Generation. Keunggulan dari OM SPAN G2 antara lain:

1. Semakin cepat: OM SPAN G2 kompatibel dengan fitur bookmark pada browser web dan lebih hemat hingga 50% setiap bulan.
2. Semakin nyaman digunakan: Selain perubahan pada tampilan, didukung pula dengan cepatnya pencarian halaman dan menggunakan kata sandi untuk tetap berada di halaman yang diinginkan ketika sesi telah habis.

Quickwins DJPb Tahun 2017

Standardisasi Kompetensi Teknis Jabatan Instansi Vertikal DJPb

Salah satu upaya dalam mewujudkan strategi pengelolaan Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi adalah dengan menyusun standar kompetensi teknis jabatan. Standar kompetensi teknis jabatan telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal perbendaharaan Nomor 649/PB/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dengan penetapan standar kompetensi tersebut, diharapkan menjadi dasar dilaksanakannya pengukuran/penilaian atas kesesuaian profil kompetensi teknis pegawai di lingkungan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan kompetensi teknis yang dibutuhkan dalam jabatannya.

Implementasi Sistem Informasi Pengaduan

Dalam rangka mencegah dan mendeteksi secara dini terjadinya pelanggaran yang terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, kantor pusat memerlukan suatu alat manajemen pengelolaan pengaduan yang kemudian dikembangkan Aplikasi Pengelolaan Pengaduan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Setiap pengaduan yang diterima oleh aplikasi akan dianalisis oleh UKI-E1, kemudian diputuskan tindak lanjutnya melalui pemeriksaan langsung oleh UKI-E1, atau dilakukan pelimpahan kepada UKI-W atau UKI-P yang bersangkutan. Mengenai pengaduan yang diterima masing-masing UKI melalui sms, email, telepon, surat, tatap muka, dan lain-lain dimasukkan kedalam aplikasi sistem informasi pengelolaan pengaduan agar dapat dilakukan tindak lanjut secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Implementasi Simplifikasi SPJ Belanja Bantuan Pemerintah pada K/L

Simplifikasi SPJ pada Bantuan Pemerintah dilakukan melalui revisi PMK 168/PMK.05/2015 menjadi PMK 173/PMK.05/2016. Upaya ini dilakukan sebagai tindak lanjut Presiden yang menekankan penyederhanaan SPJ/Laporan Pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil survei terhadap 1.120 responden untuk mengukur keberhasilan implementasi Bantuan Pemerintah, diperoleh informasi bahwa adanya kemudahan dalam mengelola bantuan yang ditunjukkan dengan nilai 4,14 dari skala 1-5. Selain itu kesederhanaan pembuatan laporan memperoleh nilai 4 dari skala 1-5.

Pilot Project Penggunaan Kartu Kredit untuk Belanja Pemerintah

DJPb telah menetapkan Perdirjen Nomor PER-17/PB/2017 tentang Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan (UP). Pelaksanaan uji coba dilakukan secara bertahap dengan capaian:

1. Tahap I: diterbitkan 579 kartu kredit dengan total limit sebesar Rp. 47,78 miliar pada tiga Bank Penerbit Kartu Kredit yaitu BRI, Bank Mandiri, dan BNI.
2. Tahap II: diterbitkan 504 kartu kredit pada Kanwil DJPb dan KPPN dengan total limit sebesar Rp 3,2 miliar (seluruh Kanwil DJPb) dan Rp 4,8 miliar (seluruh KPPN) pada tiga Bank Penerbit Kartu Kredit yaitu BRI, Bank Mandiri, dan BNI.

Penyelesaian SPM Tanpa RPD Harian

Kementerian Keuangan telah mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara penyusunan rencana penarikan dana, rencana penerimaan dana, dan perencanaan kas dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.05/2017. Dalam

ketentuan baru tersebut terdapat beberapa penyederhanaan antara lain: penyederhanaan klasifikasi transaksi SPM, kemudahan pengajuan SPM apabila RPD belum disampaikan satuan kerja, kemudahan proses perubahan penetapan RPD Harian, perluasan sarana penyampaian RPD Harian. Dengan demikian diharapkan kegiatan di level satuan kerja terlaksana lebih cepat, KPPN dapat melayani satuan kerja lebih baik, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat mengelola kas lebih optimal berdasarkan perencanaan kas yang semakin akurat.

Integrasi Sistem Aplikasi Rekening Milik Satker Lingkup K/L

Dalam rangka penyempurnaan proses bisnis pengelolaan rekening milik satuan kerja lingkup kementerian negara/ lembaga, telah dikembangkan Aplikasi MITRA (Aplikasi Manajemen Informasi Terpadu Rekening dan Kas Bendahara). Aplikasi MITRA terdiri dari 3 modul yaitu: rekening satker (PBNOpen), aplikasi SILABUN, dan aplikasi *Treasury Notional Pooling* (TNP) yang saling terkoneksi, saling uji silang, menjaga konsistensi, dan validitas atas informasi yang dihasilkan. Aplikasi MITRA dirancang untuk digunakan oleh Kementerian Negara/ Lembaga, DJPb, dan Bank Umum.

Program (SIKP) Tahap II untuk Peningkatan Akurasi Data dan Ketepatan Sasaran Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

SIKP adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran Kredit Program. Kegiatan pengembangan dan implementasi SIKP Tahap II ini dilakukan secara berkesinambungan pada tahun 2017 dalam bentuk rangkaian rapat koordinasi dengan instansi terkait (DJP Kemenkeu, Dukcapil Kemendagri, BNP2TKI, Kemenko Perekonomian, BI, OJK, dan K/L lain, pelaksanaan host to host pada masing-masing Bank/Lembaga Penyalur KUR, sosialisasi/pelatihan kepada Pemda pada Kanwil DJPb, dan lain-lain. Pada tahun 2017, SIKP sudah mendapatkan akses untuk masuk dalam sistem NPWP milik Ditjen Pajak sehingga data

NPWP menjadi lebih andal. Selain itu, SIKP tahap II telah difasilitasi dengan validasi sektor usaha sehingga kini tidak ada sektor usaha diluar Permenko yang bisa mendapatkan KUR.

Sinergi Pengelolaan Kas BLU dan Kas Pemerintah

Pada tanggal 18 Juli 2017, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.05/2017 tentang Penarikan dan Pengembalian Dana pada Badan Layanan Umum. Fleksibilitas pengelolaan rekening serta bunga dan/atau jasa giro atas rekening diberikan kepada BLU untuk mendorong BLU mengoptimalkan seluruh potensi pendapatannya sehingga dapat mewujudkan kemandirian BLU dalam membiayai seluruh pengeluarannya tanpa bergantung pada dana yang disediakan oleh APBN. BLU diharapkan mampu mengelola kasnya berdasarkan praktik-praktik bisnis yang sehat serta menjalin sinergi yang baik dengan pengelolaan kas Pemerintah Pusat.

Aplikasi Remunerasi Badan Layanan Umum

Untuk mendukung sistem remunerasi di satker BLU tersebut maka penerapan tata kelola pemerintahan yang modern, handal dan aman dengan pengembangan Aplikasi Remunerasi. Aplikasi Remunerasi yang dikembangkan oleh Dit PPK BLU merupakan amanah dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017. Aplikasi Remunerasi versi 1.0 yang diterapkan mulai Desember 2017 dan dilakukan penyempurnaan berdasarkan masukan dari para pengguna di Dit PPK BLU dan *stakeholder*.

Register Satuan Kerja Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Buku Register Satuan Kerja Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 dan 2017 memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Mengetahui daftar satuan kerja tidak aktif (tidak menerima alokasi DIPA) Tahun 2016 dan 2017 yang masih memiliki saldo yang masuk dalam konsolidasi LKKL/LKBUN dan satker aktif yang menerima alokasi DIPA Tahun 2016 dan 2017 yang berkewajiban menyusun LKKL/LKBUN.
2. Memantau transparansi dan akuntabilitas satker untuk penyusunan LKKL/LKBUN dalam mempertanggungjawabkan keuangan negara.
3. Memastikan proses likuidasi penyusunan laporan keuangan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

Forum Koordinasi Keuangan Negara Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Forum Koordinasi Keuangan Negara merupakan suatu wadah yang dibentuk di tingkat Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk melakukan koordinasi secara intensif antara unit terkait pemantapan pemahaman hal-hal yang berkaitan dengan Keuangan Negara. Pada tanggal 20 September 2017 telah ditetapkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2017 tentang Forum Koordinasi Keuangan Ditjen Perbendaharaan. Selanjutnya ditetapkan Kepdirjen Perbendaharaan Nomor KEP-667/PB/2017 tentang Keanggotaan Forum Koordinasi Keuangan Negara Ditjen Perbendaharaan.

Launching Treasury Management Representative (TMR) Pro

TMR Pro merupakan kegiatan standardisasi dan pengembangan kapasitas TMR yang dilaksanakan secara masif dan sistematis, mulai dari perencanaan dan analisis kebutuhan, desain diklat sampai dengan pelaksanaan diklat TMR. Diklat Substantif dan Diklat Refreshment dilaksanakan pada tanggal 25 s.d. 29 September 2017 di Jakarta. Hasil penyelenggaraan diklat substantif TMR adalah 100% (50 orang) dinyatakan lulus dengan

nilai rata-rata 89.1, sedangkan hasil diklat refreshment TMR adalah 100% (50 orang) dinyatakan lulus dengan nilai rata-rata 88.3.

Layanan Call Center HAI DJPb

Layanan Call Center HAI DJPb telah berkembang sejak pertama kali diresmikan pada awal September 2017. Semakin beragamnya pengguna layanan yang mengakses Layanan Call Center HAI DJPb diiringi dengan semakin meningkatnya jumlah call yang masuk (1148 telepon, data per 28 Desember 2017) dengan jenis permasalahan yang semakin beragam, membuat Layanan Call Center HAI DJPb harus selalu melakukan inovasi-inovasi untuk menghadapi fenomena tersebut. Layanan Call Center HAI DJPb juga harus senantiasa meningkatkan kapasitas dari sumber daya manusia (SDM)/agen-agen Call Center HAI DJPb untuk menyukseskan program-program yang akan diluncurkan oleh Ditjen Perbendaharaan.

Implementasi Standar WBK/WBBM pada KPPN

Akselerasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan DJPb pada tahun 2017 diikuti sebanyak 66 (enam puluh enam) KPPN di seluruh Indonesia. Sebagai bentuk evaluasi, dilakukan penilaian secara internal oleh Setditjen Perbendaharaan bersama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Dari hasil penilaian dan revidi tersebut, diperoleh 43 KPPN yang memenuhi nilai standar pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dan telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor Kep-549/PB/2017.

Implementasi Standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada KPPN

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan unit-unit pelayanan di lingkungan DJPb dan sebagai bagian dari *quality assurance* dari Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan serta pengakuan atas pelayanan publik terbaik yang memenuhi standar pelayanan. Total KPPN yang mengimplementasikan standar SMM ISO 9001:2008 sebanyak 146 KPPN (pencapaian 80,66% dari target 50% untuk tahun 2017). Dengan mengimplementasikan standar SMM ISO 9001:2008, berarti tata kelola/proses bisnis dan sistem manajemen mutu yang ada di KPPN telah diakui dan sesuai dengan standar sistem manajemen mutu internasional.

Quickwins DJPb Tahun 2018

Pengembangan Aplikasi INCRIMA Tahap II

Aplikasi INCRIMA Tahap II merupakan pengembangan dari Aplikasi INCRIMA Tahap I yang telah lebih dulu dikembangkan pada tahun 2017 dan telah diimplementasikan ke seluruh unit kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada tahun 2018. Pengembangan Aplikasi INCRIMA tahap II telah sampai pada pengembangan 2 Submodul utama dalam kerangka kerja pemantauan pengendalian intern sesuai KMK Nomor 940/KMK.09/2017 yaitu EPITE dan PPITA.

Implementasi Aplikasi Kearsipan melalui Aplikasi e-Office

Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor SE-40/PB/2018, DJPb telah mengimplementasikan aplikasi kearsipan secara bertahap mulai bulan Mei 2018. Aplikasi kearsipan ini dinamakan e-Office yang memiliki tiga modul, yaitu modul surat masuk, modul surat keluar dan modul arsip.

Keunggulan dan keuntungan yang diperoleh dari penerapan aplikasi e-Office adalah cepat, efisien, mendukung implementasi ISO, aman dan terdokumentasi, dapat diakses kapanpun dan dimanapun, dan mendukung program Go Green.

Implementasi Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah

Pada akhir tahun 2018, Kementerian Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah yang merupakan landasan bagi setiap Satker K/L dalam melakukan pembayaran atas belanja negara dengan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Pokok pengaturan yang antara lain mengatur tentang proporsi Uang Persediaan (UP), yang dibagi menjadi Proporsi UP Tunai sebesar 60% dan Proporsi UP KKP sebesar 40% dari besaran UP yang telah ditetapkan.

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga

Pelaksanaan monev anggaran K/L oleh BUN secara teknis operasional telah dilakukan oleh Direktorat PA dan Bidang PPA Kanwil Ditjen Perbendaharaan melalui 4 tools yaitu reviu belanja, pemantauan dan evaluasi kinerja, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, dan telaah makro pelaksanaan anggaran. Adapun dasar hukum dalam pelaksanaan monev adalah PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Uji Coba Penggunaan Kartu Kredit untuk Pembayaran Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor atas Barang Bawaan Penumpang ke Rekening Bendahara Penerimaan

Uji coba dilaksanakan selama tahun 2018 di KPU Tipe C

Soekarno Hatta, Cengkareng dan KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai, Denpasar. Kedua bandara tersebut telah mulai mengimplementasikan fasilitas kartu kredit sebagai alat pembayaran penerimaan negara. KPU Soekarno Hatta bekerja sama dengan BRI Cabang Soekarno Hatta yang bersedia menanggung segala biaya transaksi yang timbul. KPPBC Ngurah Rai telah bekerja sama dengan Bank Mandiri Regional Bali dan Nusa Tenggara. Pengenaan MDR disepakati sebesar 1,6% per transaksi.

Pengembangan SIKP UMI

Sesuai dengan amanat dalam PMK 95 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro pasal 8 yang menyebutkan bahwa Penyalur Pembiayaan Ultra Mikro harus memiliki system yang terkoneksi dan atau kompatibel dengan sistem informasi yang digunakan oleh BLU PIP. SIKP UMi dikembangkan untuk dapat menjadi sistem yang menyimpan data penyaluran Pembiayaan UMi, mulai dari data calon debitur, data akad, dan data transaksi (pembayaran cicilan). SIKP UMi telah memiliki fitur pelaporan penyaluran Pembiayaan UMi yang dapat dilihat berdasarkan Penyalur dan Wilayah Penyaluran. Untuk dapat melakukan monitoring atas penyaluran Pembiayaan UMi hingga ke level end-user /debitur, PIP memanfaatkan *Virtual Account* (VA).

Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008

Secara substansi, revisi PP Nomor 1 Tahun 2008 dimaksudkan untuk menciptakan ekosistem investasi pemerintah, sehingga tata kelola *existing* seperti PMN, penjaminan dan penerusan pinjaman (SLA) tetap berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses penyusunan Revisi PP Nomor 1 Tahun 2008 dilakukan melalui pembahasan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari internal Kemenkeu maupun eksternal Kemenkeu. Draft Revisi PP Nomor 1 Tahun 2008 telah

disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-1030/MK.05/2018 tanggal 28 Desember 2018 dimintakan penetapan oleh Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara.

Standardisasi Kompetensi Dewan Pengawas Badan Layanan Umum

Kompetensi Standar Dewan Pengawas BLU disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas BLU. Kegiatan dimulai dari perumusan Kompetensi Standar Dewan Pengawas BLU, penyusunan kurikulum pelatihan Dewan Pengawas BLU, kemudian penyusunan kerangka acuan pelatihan Dewan Pengawas BLU. Pelatihan Dewan Pengawas BLU diselenggarakan pada tanggal 19 s.d. 20 April 2018. Peserta pelatihan terdiri dari 14 orang Dewan Pengawas BLU Rumah Sakit Vertikal di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Penyusunan Buku Saku Penggunaan Data LKPK dan LSKP/GFS

Penyusunan Buku Saku GFS dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang LKPK dan LSKP serta memberikan pedoman penggunaan data LKPK dan LSKP untuk analisis dan kebijakan ekonomi fiskal, baik nasional maupun regional. Tahun 2018 merupakan Buku Saku GFS edisi pertama dengan tema ‘Sebuah Pengantar untuk Penggunaan Data LKPK dan GFS untuk Analisis dan Kebijakan Ekonomi Fiskal Nasional dan Wilayah’. Buku Saku GFS edisi pertama ini terbagi menjadi 6 (enam) bagian, yaitu: Sekilas tentang GFS, Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK), Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP/Laporan GFS), Memahami Laporan GFS, Kerangka Analisis GFS, dan Previu GFS Sektor Publik.

Bagan Akun Standar Berbasis Android

Pada tahun 2018, DJPb meluncurkan aplikasi Bagan Akun Standar (BAS) berbasis Android sebagai inovasi untuk mempermudah akses informasi terkait kodefikasi dan klasifikasi akun bagi para pemangku kepentingan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Aplikasi ini dirancang agar user friendly, dengan fitur utama seperti menu narasi, daftar akun kas dan akrual, serta daftar pertanyaan dan jawaban, yang membantu pengguna mendapatkan informasi secara cepat dan efektif. Diluncurkan secara resmi oleh Menteri Keuangan pada Rapat Pimpinan Nasional II 2018, aplikasi ini menandai langkah penting dalam transformasi digital DJPb, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung modernisasi pengelolaan keuangan negara.

Penyusunan Buku Sejarah Akuntansi Pemerintah di Indonesia

Secara garis besar, buku ini membagi cerita dalam tiga fase sejarah, yakni masa pra-reformasi, masa reformasi dan masa setelah reformasi akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan. Penyusunan buku dimulai pada bulan Februari tahun 2017 menggunakan teknik studi pustaka dan wawancara. Buku Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Indonesia Dari Masa Ke Masa diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan dengan International Standard Book Number (ISBN) 978-602-51083-1-0. Buku ini diluncurkan oleh Ibu Menteri Keuangan pada acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018.

Implementasi Aplikasi Database Peraturan Perbendaharaan (DPP)

Sistem Informasi Peraturan Perbendaharaan Berbasis Web yang selanjutnya disebut Treasurypedia adalah aplikasi berbasis web yang secara lengkap dan update menginventarisasi dan mempublikasi peraturan di bidang Perbendaharaan. Aplikasi

Treasurypedia telah dapat diakses dan digunakan oleh pengguna melalui alamat treasurypedia.kemenkeu.go.id. Peraturan yang telah diinventarisasi dan teridentifikasi dalam Aplikasi Treasurypedia sebanyak 10.747 peraturan yang merupakan peraturan penerbitan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2018.

Implementasi Forum Kajian Perbendaharaan

Pada tahun 2017, DJPb meluncurkan Implementasi Forum Kajian Perbendaharaan (FKP) sebagai platform untuk mendukung penelitian dan pengembangan di bidang perbendaharaan, mendorong budaya ilmiah, serta memperkuat komunikasi dan sosialisasi terkait kebijakan berbasis evidence-based policy. FKP ini diresmikan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-526/PB/2017, dan dilengkapi dengan berbagai kegiatan seperti pengenalan FKP melalui website, pembuatan poster, internalisasi ke Kanwil DJPb, survei minat, seminar, dan penyusunan buku FKP. Dengan menyediakan ruang publik yang interaktif dan terintegrasi, FKP berperan penting dalam mendorong partisipasi pegawai DJPb dan meningkatkan kualitas proses kebijakan melalui pertukaran ide dan hasil penelitian.

Penyusunan IT Blueprint Direktorat Jenderal Perbendaharaan

IT Blueprint disusun sebagai panduan strategis dalam pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Proses penyusunan melibatkan tiga tahap utama: analisis dokumen strategis, perancangan dokumen dengan penyesuaian rencana organisasi, dan finalisasi yang mencakup pengajuan serta pengesahan. IT Blueprint disahkan melalui Keputusan Dirjen No. KEP-627/PB/2018, menjadi cetak biru bagi pengembangan sistem TIK yang mendukung transformasi digital DJPb periode 2018–2023.

Penerapan ISO 9001:2015 pada Lingkup Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan melalui HAI-DJPb

Pada tahun 2018, DJPb berhasil menerapkan ISO 9001:2015 untuk layanan HAI-DJPb, yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna di Seksi Layanan Pengguna. Implementasi ini meliputi beberapa tahapan, yaitu: analisis gap; Job Analysis dan Awareness Training; Perancangan Program Standar Manajemen Mutu; Implementasi SMM ISO 9001:2015 dan Pengolahan data hasil survey kepuasan; evaluasi /audit internal; evaluasi /audit eksternal; dan Sertifikasi. Layanan Helpdesk HAI-DJPb diharapkan dapat bermanfaat bagi organisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada umumnya agar ke depannya lebih efisien, efektif, sehat, responsif, transparan, dan akuntabel.

Launching Digital Treasury

Pada tahun 2018, DJPb meluncurkan inisiatif Digital Treasury yang mencakup implementasi eOffice untuk mendukung pengelolaan administrasi secara digital di seluruh unit Kantor Pusat dan vertikal. Langkah ini meliputi persiapan perangkat dan infrastruktur, pelaksanaan bertahap, serta penerapan penuh sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-40/PB/2018. Sejak operasionalnya, sistem eOffice berhasil memproses lebih dari 21 juta transaksi dan menghemat penggunaan kertas hingga 1.038 rim. Implementasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mempercepat penyelesaian dokumen, mengintegrasikan informasi rapat, dan mengurangi biaya pengiriman fisik, sehingga mendukung DJPb dalam mengadaptasi teknologi modern dan memperkuat efisiensi operasionalnya.

Program Perbendaharaan Go Green 2018

Program Perbendaharaan Go Green 2018 merupakan upaya DJPb dalam menerapkan konsep perkantoran ramah lingkungan

yang efisien dan hemat energi. Inisiatif ini mencakup enam kegiatan utama, termasuk penghematan listrik, kertas, serta program employee one tree di mana seluruh unit kerja, termasuk 181 KPPN dan 34 kantor wilayah, berpartisipasi dalam penanaman pohon di berbagai lokasi. Penggunaan aplikasi e-DJPb mendorong pengurangan penggunaan kertas dalam laporan, dengan hasil efisiensi kertas mencapai 30% lebih rendah dibandingkan tahun 2017. Program ini berhasil meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan pegawai, mendukung prinsip e-government, dan diharapkan dapat menginspirasi mitra kerja untuk melestarikan lingkungan bagi generasi mendatang.

Program Perbendaharaan Menulis di Lingkungan DJPb Tahun 2018: Ikhtiar dalam Membangun Komunikasi dan Diseminasi

Pada tahun 2018, DJPb melaksanakan Program Perbendaharaan Menulis yang bertujuan untuk meningkatkan literasi dan komunikasi di lingkungan DJPb. Program ini diatur dalam SE-4/PB/2018 dan mencakup kegiatan seperti penyusunan karya tulis, pengembangan perpustakaan, optimalisasi media sosial, serta perlombaan menulis. Program Perbendaharaan Menulis terdiri dari kegiatan antara lain: Budaya Kerja Sharing Informasi; Penyusunan Karya Tulis/Artikel; Pengembangan dan Revitalisasi Perpustakaan; Optimalisasi Website dan Media Sosial Resmi Kantor; Perlombaan Menulis; dan Penyusunan Buku dan Bedah Buku. Salah satu hasil program ini adalah penyusunan buku profil Kanwil yang mengulas prestasi, sejarah, serta kiprah kantor, yang tidak hanya menjadi sarana diseminasi pengetahuan tetapi juga upaya membangun kebanggaan dan pengakuan atas peran regional dalam pembangunan.

Quickwins DJPb Tahun 2019

Kerangka Penguatan Integritas

Kerangka Penguatan Integritas (Integrity Framework DJPb) yang bertujuan untuk memperkuat integritas terutama dalam meningkatkan pencegahan korupsi atau penyalahgunaan wewenang dalam unit organisasi DJPb. Kerangka ini menyediakan panduan komprehensif bagi first-line dan second-line untuk menjalankan perannya secara efektif, serta membantu unit kepatuhan dalam merancang langkah pencegahan, pemantauan, dan penindakan. Implementasi ini meliputi tahap kajian, penyusunan modul, dan finalisasi yang berujung pada penetapan Peraturan Dirjen PER-30/PB/2019. Dengan penerapan kerangka ini, DJPb berkomitmen menciptakan budaya organisasi yang sehat, memupuk kepercayaan publik, dan memastikan birokrasi bersih serta bebas dari praktik korupsi.

Otomatisasi Maksimum Pencairan (MP) PNBP Terpusat Fase I

DJPb melaksanakan Otomasi Maksimum Pencairan (MP) PNBP Terpusat Fase I sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan PNBP. Inisiatif ini bertujuan menyederhanakan proses bisnis administrasi pengajuan dan persetujuan MP PNBP melalui sistem aplikasi yang terotomatisasi, yang sebelumnya dilakukan secara manual. Implementasi ini dibagi ke dalam tiga tahap utama: kajian, perancangan, dan regulasi, serta diharapkan mampu mengurangi beban kerja pada akhir tahun anggaran, mempercepat eksekusi kegiatan, dan meningkatkan pengelolaan anggaran yang efisien.

Implementasi e-commerce sebagai *Collecting Agent* (CA) Penerimaan Negara

Quickwins ini bertujuan untuk mempermudah proses pembayaran penerimaan negara secara elektronik. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2018, Lembaga Persepsi Lainnya (LPL) termasuk e-commerce seperti Tokopedia dan Bukalapak diakui sebagai agen pengumpul (CA) untuk penerimaan negara. Implementasi ini melibatkan beberapa tahap, termasuk persiapan regulasi, uji coba, dan penetapan perusahaan e-commerce sebagai LPL. Sejak peluncuran pada Agustus 2019, jumlah transaksi dari Tokopedia dan Bukalapak mencapai total 72.653 transaksi dengan nilai lebih dari Rp182 miliar, menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengembangan sistem penerimaan negara yang lebih inklusif dan modern.

Restrukturisasi dan Konsolidasi Rekening Pemerintah Pusat

DJPb melaksanakan Restrukturisasi dan Konsolidasi Rekening Pemerintah Pusat untuk mengatasi pengelolaan kas yang belum memadai seperti yang ditemukan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP 2018. Inisiatif ini bertujuan mengubah rekening giro pengeluaran menjadi rekening virtual untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Program ini dimulai dengan *pilot project* pada 219 satuan kerja DJPb dan diuji coba dengan dukungan perbankan. Evaluasi menunjukkan manfaat signifikan, termasuk pemantauan *real-time* oleh Kuasa BUN, peningkatan transaksi non-tunai, serta pengelolaan saldo yang lebih efisien. *Roll out* proyek ini dipersiapkan untuk dilaksanakan penuh pada 2020, sesuai PMK Nomor 183/PMK.05/2019.

Digitalisasi Impact Analysis Pembiayaan Ultra Mikro/UMi

Tahun 2019, Digitalisasi *Impact Analysis* Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dengan melaksanakan survei *baseline* uji dampak program Pembiayaan UMi. Survei *baseline* telah dilaksanakan di 50 wilayah dengan 172 sampel debitur. Hasil survei menjadi *baseline* uji dampak program pembiayaan UMi yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 (*endline*).

BLU *Integrated Online System* 2.0 Go Live

BLU *Integrated Online System* (BIOS) 2.0 merupakan sebuah sistem berbasis web yang mengintegrasikan data layanan dan keuangan BLU secara elektronik. BIOS 2.0 dikembangkan melalui beberapa tahap antara lain: penyusunan *user requirement*, pengujian, dan pengembangan *dashboard* untuk manajerial serta versi *mobile*. Aplikasi ini bertujuan untuk mempercepat pengumpulan data profil satker BLU, pengajuan usulan, pengelolaan kinerja, dan digitalisasi proses bisnis yang lebih efisien. Hasilnya, BIOS 2.0 memungkinkan *stakeholder* mengakses data dengan cepat dan akurat, serta mendukung pengambilan keputusan manajerial yang lebih efektif.

ApkPedia 1.0

ApkPedia 1.0 merupakan sebuah *Knowledge Management System* berbasis web yang dirancang untuk mendukung penerapan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

pemerintah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. ApkPedia memanfaatkan metode SSAD (*Structured System Analyst and Design*) dalam pengembangannya dan bertujuan sebagai platform berbagi informasi internal antar pejabat/pegawai Dit. APK. Dengan desain yang *user friendly* dan sistem pencarian yang efisien, apkPedia memungkinkan akses cepat dan akurat terhadap informasi terkini terkait standar, kebijakan, dan peraturan akuntansi, serta membantu proses bisnis dan pengambilan keputusan yang lebih efektif di lingkungan Direktorat APK.

Sistem Informasi Pengelolaan Pensiun

Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pensiun (SIPP) di Direktorat Jenderal Perbendaharaan meliputi peningkatan akurasi dan validasi data dalam proses pengajuan dan pengujian pembayaran belanja pensiun dari PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero). SIPP dikembangkan sebagai sistem terintegrasi yang menyediakan database penerima pensiun, memungkinkan proyeksi kebutuhan dana dan pelaksanaan skema baru pembayaran kontribusi pemerintah terkait pensiun dan jaminan hari tua. Tahapan pengembangan mencakup persiapan, pengembangan sistem, dan pengumpulan data, dengan progres signifikan mencapai 91,67% hingga tahap tertentu. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan validasi tagihan dan akuntabilitas pembayaran pensiun serta mendukung kebijakan pemerintah yang lebih efisien.

Launching MPN G3: NOW

Dalam rangka mewujudkan modernisasi sistem penerimaan negara yang semakin cepat, aman, dan mudah, diluncurkan MPN G3. Program ini melalui tahap persiapan dengan penguatan infrastruktur di Pusintek Jakarta dan DRC Balikpapan. *Piloting* dan *rollout* dilakukan secara bertahap pada bank persepsi dan platform digital seperti PT. Tokopedia dan PT. Bukalapak. Adapun *launching* dilakukan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 23 Agustus 2019. Keunggulan MPN G3 mencakup kapasitas transaksi tinggi, pengembangan saluran pembayaran hingga 1.000 transaksi per detik, serta inovasi SSO yang mempermudah masyarakat dalam mengakses pembayaran multi-jenis melalui satu portal.

Hai DJPb Goes to Social Media

Capaian quickwins haiDJPb Goes to Social Media berhasil meningkatkan jangkauan layanan kepada masyarakat luas dengan memanfaatkan platform media sosial. Program ini mengedepankan respons cepat, penyebaran informasi yang efisien terkait kebijakan perbendaharaan, serta upaya edukasi masyarakat mengenai peran dan fungsi Ditjen Perbendaharaan dalam mengelola APBN. Puncak pencapaian ditandai dengan pertumbuhan jumlah pengikut media sosial, yaitu Instagram dengan 4.909 pengikut, Twitter dengan 614 pengikut, dan Facebook dengan 1.046 pengikut per 6 Januari 2020.



Quickwins DJPb Tahun 2020

Optimalisasi dan Pemanfaatan BMN secara Efektif dan Efisien



Maksud dan tujuan pelaksanaan optimalisasi BMN secara umum adalah mendayagunakan BMN baik yang sudah tidak digunakan dan/atau tidak direncanakan akan digunakan, meminimalisasi BMN *idle* dan meningkatkan potensi PNBPN melalui mekanisme sewa BMN, alih guna BMN, pengalihan status BMN, kerja sama pemanfaatan dan lain-lain. Adapun tujuan khusus yang menjadi inisiasi DJPb dalam program ini adalah pengembangan manfaat berupa memberikan peningkatan kenyamanan kepada pegawai dan mendukung peran dan fungsi sosial organisasi kepada masyarakat.

Optimalisasi BMN yang dilakukan pada tahun 2020 oleh kantor pusat dan kantor vertikal, antara lain adalah:

1. Alih status/guna dan utilisasi penggunaan BMN kepada kementerian/lembaga lain ataupun unit eselon I Kemenkeu lainnya;
2. Sewa BMN merupakan pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai;
3. Reutilisasi fungsi BMN, dengan mengoptimalkan penggunaan barang *meubelair* dan elektronik bekas pakai kepada pegawai untuk mengisi rumah negara/mess;
4. Mengoptimalkan penggunaan rumah negara yang sebelumnya diperuntukan bagi pejabat setingkat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) sehingga dapat digunakan oleh pejabat administrator (eselon III), pengawas (eselon IV) ataupun kepada beberapa pelaksana secara bersama/berbagi;

5. Satellite office sebagai upaya adaptif dan responsif terhadap kondisi pandemi *Covid-19* yang sekaligus mengakomodasi ABW dan FWS serta sekaligus diharapkan dapat membantu menekan mobilisasi pegawai menuju kantor; dan
6. Hibah yang merupakan salah satu bentuk pemindahtanganan BMN sebagai salah satu opsi optimalisasi BMN dengan pertimbangan dapat mendukung peran dan fungsi sosial organisasi kepada masyarakat, membangun hubungan positif yang diharapkan dapat memperkuat citra DJPb

Otomatisasi Maksimum Pencairan (MP) PNBPN Terpusat Fase II



Otomasi MP PNBPN Terpusat merupakan proses penetapan Maksimum Pencairan PNBPN yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang disebut dengan Aplikasi Modul Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Penerapan Otomasi MP PNBPN tersebut dilakukan dengan tujuan :

1. Mewujudkan mekanisme pelaksanaan anggaran belanja PNBPN yang efisien dan efektif;
2. *Time & cost saving* melalui simplifikasi proses bisnis administrasi pengajuan dan persetujuan;
3. Mempercepat kegiatan dan belanja Satker melalui penggunaan PNBPN secara langsung sehingga output kegiatan lebih optimal;
4. Mengeliminasi penumpukan pekerjaan pada akhir tahun; dan Meningkatkan pelayanan Satker kepada masyarakat.

Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) pada Kantor Perwakilan RI di Luar Negeri

KKP diperlakukan sebagai alat untuk melakukan pembayaran belanja barang dan modal yang dapat dibebankan pada APBN, di mana kewajiban pembayaran terlebih dulu dipenuhi oleh bank penerbit, selanjutnya satker berkewajiban melunasi pada waktu yang disepakati dengan pelunasan sekaligus.

Mempertimbangkan adanya perbedaan geografis, sosial, inklusi keuangan, dan ekosistem perbankan antar negara pada Perwakilan RI di luar negeri, uji coba penerapan KKP pada Satker Perwakilan RI secara bertahap. Sebagaimana diatur dalam PER-3/PB/2020 tentang Uji Coba Pembayaran dan Penggunaan KKP Pada Satuan Kerja Perwakilan RI di Luar Negeri, uji coba KKP di luar negeri adalah penggunaan KKP oleh Satker Perwakilan RI di luar negeri yaitu Kedutaan Besar RI atau Konsulat Jenderal RI. Penggunaan KKP oleh Satker Perwakilan RI di Luar Negeri tersebut memiliki beberapa tujuan, antara lain:

1. Mendukung pengelolaan likuiditas keuangan negara dengan instrumen keuangan modern;
2. Meminimalkan transaksi pembayaran dengan uang tunai;
3. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan anggaran di luar negeri; dan
4. Memastikan seluruh transaksi pembayaran di luar negeri dapat dilaksanakan tanpa bergantung pada ketersediaan UP.

Simplifikasi Pengelolaan Rekening Pemerintah

Sebagai inovasi dalam rangka mencapai tujuan restrukturisasi rekening, simplifikasi pengelolaan rekening pemerintah diharapkan dapat mengurangi jumlah rekening pemerintah dalam bentuk giro, membangun sistem monitoring rekening yang berbasis elektronik dan real time, mempermudah BUN dalam melakukan pengendalian (pembukaan, penutupan, dan penertiban) rekening, dan meningkatkan optimalisasi kas dari pengelolaan saldo rekening pemerintah. Selain itu, inovasi ini juga didukung oleh *update* Aplikasi SPRINT sebagai aplikasi pengelolaan rekening milik Kementerian Negara/Lembaga.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut di atas, dibangun pengelolaan rekening pengeluaran yang modern dengan konsep rekening pengeluaran berbasis rekening virtual yang terkonsolidasi dalam rekening induk. Rekening induk adalah rekening giro pemerintah yang mengkonsolidasikan seluruh rekening virtual yang dibuka pada bank umum. Rekening induk dibuka pada setiap Eselon I, sedangkan rekening Satker adalah rekening virtual berupa nomor identifikasi rekening pengeluaran Satker dan rekening pengeluaran pembantu Satker. Saldo serta transaksi yang terjadi pada rekening Satker dapat dipantau oleh Eselon I dan BUN melalui *dashboard* rekening yang berupa panel informasi berbasis laman (web) yang menampilkan data rekening yang terstandarisasi secara *realtime online*.

Piloting Penggunaan UP melalui Sistem *Digital Payment Marketplace* pada Satker K/L

DigiPay menjadi sebuah *platform* dengan banyak sisi (*multisided platform*) yang dapat diakses banyak pihak yang berkepentingan. Selain menjadi wadah transaksi bagi satuan kerja dan vendor rekanan satker (UMKM), dalam jangka panjang dapat pula menjadi *platform* yang memberikan informasi bagi pihak yang berkepentingan lainnya, seperti Bendahara Umum Negara, otoritas moneter, pemeriksa pajak, auditor, pembuat kebijakan, lembaga perencana pembangunan, perbankan, lembaga statistik Pemerintah, dan peneliti.

Dalam perkembangannya, pada masa penanganan pandemi *Covid-19* dan pemulihan ekonomi nasional seperti sekarang ini, isu *DigiPay* tidak hanya terkait dengan pengelolaan Keuangan Negara saja, tetapi mulai bergeser menjadi isu pemberdayaan dan digitalisasi UMKM. Para pelaku UMKM dapat bergabung dan mengambil manfaat dari ekosistem *Digital Payment-Marketplace* Pemerintah.

Progres *DigiPay* yang cukup menggembirakan menjadi pertimbangan untuk dilakukan perluasan kepada satker-satker lain di luar satker *piloting* yang akan mulai dilaksanakan sejak awal 2021. Perkembangan *DigiPay* yang semakin baik diharapkan memberikan dampak positif bagi seluruh pengguna *DigiPay*, khususnya UMKM. Dengan demikian, program pemberdayaan dan digitalisasi UMKM melalui *DigiPay* dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para pelaku UMKM.

Digitalisasi Impact Analysis Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) (Endline)

Sementara itu pada tahun 2020, Direktorat SMI menetapkan Digitalisasi *Impact Analysis* Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) (Endline) sebagai kelanjutan dari survei uji dampak Pembiayaan UMi yang bertujuan untuk mengukur perubahan Nilai Keekonomian Debitur.

Berdasarkan hasil kajian Uji Dampak Pembiayaan UMi dapat disimpulkan bahwa efektifitas program Pembiayaan UMi dapat dirasakan dan memberikan dampak positif kepada debitur. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran uji dampak pembiayaan UMi melalui *survey baseline* dan *endline* yang secara umum menunjukkan peningkatan Nilai Keekonomian Debitur, khususnya pada aspek Nilai Keekonomian Pribadi, sedangkan dari sisi aspek Nilai Keekonomian Usaha cenderung mengalami penurunan pada nilai omzet usaha dan jumlah tenaga kerja, hal ini sangat wajar mengingat kondisi pandemi *Covid-19* sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian di masyarakat.

BLUSimpel: Integrasi dan Simplifikasi Tata Kelola BLU

Dengan adanya penyederhanaan dan pemutakhiran regulasi BLU, diharapkan regulasi yang dihasilkan merupakan regulasi BLU yang komprehensif, sistematis, terstruktur, aktual, dan simpel. Regulasi BLU yang komprehensif artinya regulasi baru yang dihasilkan mencakup seluruh peraturan mengenai pelaksanaan pengelolaan BLU sesuai dengan lingkup Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 (PP 23/2005). PMK BLU baru juga akan menambah serta merevisi substansi peraturan agar BLU dapat menjadi lebih produktif, efektif, dan efisien.

Regulasi BLU yang simpel artinya penyederhanaan proses bisnis dan administratif BLU dengan mendorong pemanfaatan teknologi informasi. Di satu sisi, teknologi informasi dapat membantu proses administratif dalam pembinaan BLU seperti pengajuan usulan penetapan, usulan tarif layanan, dan remunerasi, melalui BLU *Integrated Online System* (BIOS). Di sisi lain, pemanfaatan teknologi informasi pada proses bisnis operasional BLU dapat mendorong efisiensi sehingga menghasilkan layanan yang lebih baik.

PMK BLU Sempel telah secara resmi ditetapkan pada tanggal 18 September 2020 dan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020. Dengan demikian, diharapkan PMK ini dapat mewujudkan regulasi BLU yang komprehensif, sistematis, terstruktur, aktual, dan simpel.

BLU *Integrated Online System* 2.1: Digitalisasi Pengelolaan BLU

Dit PPK BLU dalam membangun sebuah sistem informasi yang memberikan kecepatan dan kemudahan dalam menjalankan layanan kepada *stakeholder* dan melakukan digitalisasi proses bisnis yang sudah berjalan. Sistem tersebut berupa Aplikasi BLU *Integrated Online System* 2.0 (BIOS 2.0) yang membantu Dit PPK BLU dan *stakeholdernya* untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Hal ini bertujuan agar Aplikasi BIOS dapat menyediakan data dengan cepat, akurat, dan handal dalam pengambilan keputusan manajerial, sebagai informasi publik terkait dengan data satker BLU, maupun sebagai sarana digitalisasi proses bisnis agar lebih cepat. BIOS merupakan aplikasi berbasis web yang mengintegrasikan data layanan dan keuangan BLU yang berbasis elektronik. Syarat data menghasilkan informasi yang valid dan handal jika memenuhi syarat bahwa data dimaksud sudah

melalui proses verifikasi dan *approval* serta data yang disajikan cukup lengkap. Kebutuhan akan informasi oleh pimpinan yang sangat cepat memerlukan sarana teknologi untuk dapat memberikan dukungan dan menyajikan data dan informasi yang dimaksud.

Kerangka Penguatan Konsolidasi Statistik Fiskal Nasional (GFS)

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) menghasilkan statistik keuangan pemerintah yang dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antar negara (*cross country studies*), kegiatan pemerintahan, dan penyajian statistik keuangan pemerintah. Ditjen Perbendaharaan telah berhasil menyusun LSKP untuk tingkat Nasional dan LSKP Tingkat Wilayah yang disusun oleh Kanwil DJPb.

Dalam rangka meyakinkan keandalan data dalam penyusunan LSKP, dilakukan verifikasi untuk data pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya Pasal 8 dan 12 menyatakan bahwa terhadap data hasil verifikasi tersebut, kanwil DJPb dan Direktorat APK melakukan rekonsiliasi data dengan pihak-pihak terkait yang memiliki data pembandingan (*counterparty*). Adapun salah satu pihak yang menyediakan data pembandingan adalah Bank Indonesia dengan produknya yang bernama *Financial Account and Balance Sheet* (FABS).

Dalam praktiknya masih ditemukan adanya permasalahan dan kendala terkait verifikasi data tersebut, khususnya terkait *counterparty*. Disusunlah sebuah panduan dalam bentuk Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang komprehensif dalam menyelenggarakan rekonsiliasi dan fungsi verifikasi, analisis, dan penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum. Pedoman tersebut memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan konsistensi angka statistik fiskal nasional antara DJPb Kemenkeu dan Departemen Statistik Bank Indonesia sesuai rekomendasi G20 dalam hal *Data Gap Initiative* (DGI) dalam rangka menjaga kondisi ekonomi global dari risiko terjadinya krisis keuangan.
2. Dengan adanya rekonsiliasi data statistik fiskal antara DJPb Kemenkeu dan Departemen Statistik Bank Indonesia diharapkan data statistik keuangan sektor Pemerintah Umum menjadi lebih akurat dan konsisten.

Modul Pelaporan-SIKRI

Konsolidasi laporan keuangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK). Selanjutnya dari LKPK tersebut disusun statistik keuangan dalam bentuk Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan analisis kebijakan, menggambarkan kondisi fiskal secara nasional, pengelolaan dan analisis perbandingan antar negara (*cross country studies*).

Sebagai wujud perbaikan yang berkesinambungan, dan upaya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi yang berkembang di lingkungan DJPb, maka DJPb telah mengembangkan SIKRI Modul Pelaporan (SIKRI MP). SIKRI MP akan menghasilkan LKPK dan LSKP baik di Tingkat Wilayah maupun Nasional, serta berbagai informasi keuangan lainnya secara terotomasi dan menggantikan metode manual yang digunakan sebelumnya. Pada tanggal 28 Januari 2021 lalu, SIKRI MP telah di-*launching* secara resmi oleh Direktur APK sekaligus sebagai penanda awal penggunaan SIKRI MP dalam penyusunan LKPK dan LSKP. Informasi keuangan yang dihasilkan SIKRI dapat digunakan sebagai alat pengambilan kebijakan oleh pimpinan baik di Kemenkeu maupun stakeholders lain.

Penyelesaian Rekomendasi Pengangkatan Pejabat Fungsional di Bidang Perbendaharaan pada Kementerian Negara/Lembaga

Jabatan Fungsional di Bidang Perbendaharaan terdiri dari:

1. Jabatan fungsional yang bersifat terbuka untuk semua Kementerian Negara/Lembaga yaitu: JF Pranata Keuangan APBN dan JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN;
2. Jabatan Fungsional yang bersifat tertutup hanya di Ditjen Perbendaharaan yaitu JF Pembina Teknis Perbendaharaan Negara dan JF Analis Perbendaharaan Negara.

Sampai dengan Desember 2020, jumlah pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Perbendaharaan sebanyak 342 orang yaitu 271 pada Jabatan Fungsional Tertutup (JF Analis Perbendaharaan Negara dan JF Pembina Teknis Perbendaharaan Negara) dan 71 pada Jabatan Fungsional Terbuka (JF Pranata Keuangan APBN dan JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN). Melalui implementasi Jabatan Fungsional di bidang perbendaharaan, diharapkan terciptanya Sumber Daya Manusia pengelola keuangan pada K/L yang profesional dan berkompeten sehingga mendukung pengelolaan keuangan APBN yang semakin baik, profesional dan akuntabel.

Simplifikasi Peraturan di Bidang Perbendaharaan Lingkup Ditjen Perbendaharaan Fase I

Direktorat Sistem Perbendaharaan menginisiasi *Quickwins* Simplifikasi Peraturan di Bidang Perbendaharaan Fase I dalam rangka penyederhanaan peraturan di bidang perbendaharaan dari sisi jumlah melalui mekanisme pencabutan, penggantian, penggabungan, dan/atau penyederhanaan proses bisnis. Syarat penyelesaian (*acceptance criteria*) *Quickwins* tersebut yaitu berkurangnya kuantitas Peraturan Menteri Keuangan terhadap

penyusunan Peraturan Menteri Keuangan yang masuk dalam Program Perencanaan pada tahun 2020 sebanyak lebih dari 50%.

Telah ditetapkan 8 peraturan baru yang menghapus/mencabut 18 PMK lainnya, diharapkan peraturan perundang-undangan di bidang Perbendaharaan dapat menjadi lebih efektif, lebih mudah dipahami, menyeluruh, dan harmonis terhadap peraturan lainnya, serta implementatif.

Aplikasi Gaji Berbasis Web

Pengembangan aplikasi gaji berbasis *web* merupakan upaya Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam memperbaiki pengelolaan serta mempermudah proses pembayaran gaji pegawai dengan menggunakan aplikasi berbasis *web* yang digunakan sebagai alat perhitungan, pembayaran dan administrasi pengelolaan gaji pegawai.

Pada akhir Tahun 2020 *piloting* aplikasi telah sukses dilaksanakan oleh Setditjen Perbendaharaan dan Biro Umum Setditjen. Melalui implementasi penggunaan aplikasi gaji berbasis web diharapkan mempermudah dalam pembayaran gaji pegawai dalam hal simplifikasi proses bisnis serta penghematan tenaga administrasi dan mengkonsolidasi data transaksi dalam data terpusat sehingga dapat digunakan sebagai alat analisis data. Implementasi aplikasi gaji berbasis web ini secara tidak langsung telah mendukung pengelolaan keuangan APBN yang semakin baik, profesional dan akuntabel.

Quickwins DJPb Tahun 2021

Implementasi FRESH Office DJPb

Dalam rangka mewujudkan lingkungan kerja yang nyaman, aman, kolaboratif, dan modern untuk meningkatkan *output* dan kinerja pegawai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) melaksanakan penguatan budaya kerja yang sejalan dengan konsep *New Ways of Working* (NWOW) melalui implementasi *Activity Based Workplace* (ABW), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-453/ KMK.01/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan *Activity Based Workplace* di Lingkungan Kementerian Keuangan dilakukan pentahapan awal atas implementasi *Activity Based Workplace* (ABW) pada Kantor Pusat dan Instansi Vertikal DJPb, yaitu *FRESH* (*Flexible, Responsive, Smart, dan Healthy*) Office.

Hasil dari *output* yang telah dicapai oleh *FRESH Office* pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Disusun buku pedoman melalui Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-97/PB/2021 tentang Buku Pedoman Standar Layout dan Desain Bangunan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, telah diatur konsep ruang kerja yang *Flexible, Responsive, Smart, dan Healthy* (*FRESH*) Office, yang sejalan dengan konsep NWOW Kementerian Keuangan.
2. Pengalokasian anggaran dana untuk implementasi *FRESH Office* pada DIPA unit kerja *piloting* masing-masing.
3. Telah dilaksanakan survei kesiapan pola kerja ABW. Hasil survei telah disampaikan melalui Nota Dinas Kepala Bagian Kepatuhan Internal nomor ND-820/PB.15/2021 tanggal 19 Oktober 2021, hal penyampaian hasil survei kesiapan pola kerja ABW tahun 2021.

4. Peningkatan pemahaman pegawai atas konsep ABW dan perubahan mindset dan budaya kerja pegawai sesuai NWOW.
5. Dilaksanakan rehabilitasi/renovasi fisik bangunan gedung/ruangan *piloting* dan penyediaan peralatan dan mesin untuk *piloting* ABW, dengan dilakukannya renovasi fisik bangunan/ruangan telah dilaksanakan pada setiap unit implementasi dengan persentase pekerjaan telah selesai 100%, penyediaan peralatan dan mebel, serta distribusi sarana peralatan berupa laptop dari Kantor Pusat DJPb ke unit implementasi.

Implementasi *FRESH Office* di DJPb tahun 2021 telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan target pada seluruh capaian sebesar 100%. *FRESH Office* juga memberikan dampak yang positif kepada unit kerja di lingkup DJPb, satuan kerja/mitra kerja, Unit Eselon I lain di Kementerian Keuangan dengan merasakan peningkatan kenyamanan dalam bekerja dan mendapatkan layanan.

Digitalisasi Modul MP PNBP Tidak Terpusat

Maksud dilakukan pengaturan penetapan MP PNBP secara elektronik adalah untuk simplifikasi proses bisnis pelaksanaan anggaran belanja yang bersumber dari dana PNBP dengan memanfaatkan sistem teknologi yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Penetapan MP PNBP akan di generate secara otomatis melalui sistem setelah proses rekonsiliasi atas rekapitulasi dana PNBP dan pengajuan permohonan penetapan MP PNBP oleh Kementerian Negara/ Lembaga atau satker pengguna PNBP.

Kegiatan *launching* implementasi proses bisnis penetapan MP PNBP menggunakan Modul MP PNBP direncanakan dilakukan secara serentak di seluruh satker/K/L baik untuk pola penggunaan PNBP secara terpusat maupun pola penggunaan PNBP Tidak Terpusat. Target kegiatan *launching* proses bisnis penetapan MP PNBP menggunakan Modul MP PNBP dilaksanakan di bulan September 2021.

Digitalisasi Sistem Pembayaran Pemerintah

Digital payment adalah pembayaran dengan mekanisme *overbooking/* pemindahbukuan dari rekening pengeluaran secara elektronik dengan kartu debit/ *Cash Management System* (CMS) atau pendebetan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) ke rekening penyedia barang/jasa, dalam rangka penggunaan uang persediaan melalui sistem *marketplace*.

Digitalisasi Sistem Pembayaran Pemerintah mempunyai tujuan untuk menciptakan ekosistem yang mengintegrasikan satker K/L, penyedia barang/jasa (UMKM), perbankan dan kuasa BUN dalam proses pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan uang persediaan. Digitalisasi ini berguna untuk mendukung penerapan *shared service* dan *schedule payment date*.

Capaian Quickwins Digitalisasi Sistem Pembayaran Pemerintah sebagai berikut:

1. Capaian Implementasi *Digipay* telah dilakukan oleh 4.964 satker dari 76 K/L dan 920 vendor serta terdapat 11.467 transaksi senilai Rp25,35. Khusus internal Kemenkeu, dari 855 satker yang memiliki rekening himbara, capaiannya adalah 100,00%.
2. Hingga 31 Desember 2021, kanal bayar *Fintech/ eCommerce/*Lembaga lainnya yang telah *live* sebagai Lem-

baga Persepsi Lainnya (LPL) sebanyak 10 dari target 9 LPL (100%), terdiri dari: Tokopedia, Bukalapak, Finnet, Mitra Pajakku, Online Pajak, Indomaret, Dana, BMS, Nebula, dan Clickargo.

3. Proses restrukturisasi rekening pengeluaran dilakukan melalui tahapan pengajuan rekening induk, pengajuan rekening satker serta proses migrasi saldo dari rekening giro ke rekening virtual. Sesuai nota dinas Direktur PKN nomor ND-1014/PB.3/2021, restrukturisasi rekening pengeluaran telah dilaksanakan pada seluruh K/L.

Sistem pembayaran digital (*cashless*) yang terintegrasi dengan sistem pengadaan elektronik (*digital*) dalam satu platform, tidak hanya bermanfaat oleh satker saja, melainkan juga pihak-pihak terkait seperti vendor UMKM, bank, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), auditor/ aparat penegak hukum/ Direktorat Jenderal Pajak.

Digitalisasi Pembiayaan UMi

Digitalisasi pembiayaan UMi terdiri dari pengenalan debitur pembiayaan UMi kepada *marketplace online* dan pelaksanaan transaksi debitur pembiayaan UMi secara *cashless* menggunakan uang elektronik. Dalam rangka mendorong UMi bergabung ke dalam *marketplace online*, dilakukan pemanfaatan platform-platform yang telah ada dan dapat dimanfaatkan oleh UMKM secara langsung dalam melakukan transaksi usahanya, antara lain: platform belanja pemerintah melalui layanan Digipay yang diusung oleh Direktorat PKN, selain itu dapat juga melalui *marketplace online* lainnya.

Terobosan dalam implementasi Digitalisasi Pembiayaan UMi adalah pemanfaatan teknologi uang elektronik dimana debitur

tidak harus memiliki rekening bank, debitur pembiayaan UMi terbukti dapat mengadopsi teknologi uang elektronik dan juga *marketplace online* yang cukup *sophisticated*.

Implementasi *piloting* digitalisasi UMi untuk memanfaatkan *marketplace online* dan transaksi secara *cashless* dalam rangka meningkatkan daya saing debitur.

Go Live Investasi Pemerintah (Tahap I)

Melalui Investasi Pemerintah sesuai PP 63 Tahun 2022, Pemerintah akan memiliki fungsi regulator, supervisor dan operator. Fungsi supervisor akan dilaksanakan oleh Komite Investasi Pemerintah (KIP), untuk memberikan dukungan yang optimal kepada KIP maka dibentuklah Unit Kerja Pembantu (UKP) yang saat ini merupakan salah satu fungsi Direktorat SMI. Investasi Pemerintah akan dilaksanakan oleh Operator Investasi Pemerintah (OIP) yang terdiri atas Badan Layanan Umum, BUMN, Badan Hukum Lainnya dan dalam pelaksanaannya diperkenankan menggunakan Manajer Investasi. Keuntungan OIP dalam pelaksanaan investasi pemerintah melalui mekanisme PP 63 Tahun 2019 antara lain:

1. *Agility* bagi BLU: opsi instrumen lebih luas selain surat berharga (*equity participation*, akuisisi, pembiayaan model KPBU). Memiliki tujuan mitigasi risiko yang lebih luas.
2. *Added value*: optimalisasi *return*/imbal hasil terhadap investasi jangka panjang, mendukung PSN melalui investasi langsung.
3. Modernisasi pengelolaan investasi: memberikan kesempatan bagi BLU Pengelola Dana untuk berinvestasi selain instrument yang konservatif.

4. Keputusan investasi dilaksanakan secara lebih komprehensif dan arah investasi yang lebih jelas karena melibatkan KIP dengan strukturnya (*Task Force* dan UKP) dalam fungsi supervisi dan regulasi dan tidak hanya diputuskan oleh BLU/ BHL/ BUMN tersebut sendiri saja.
5. Implementasi *Business Judgement Rules* tersedia perlindungan bagi BLU, jika mengalami penurunan nilai investasi, sepanjang memenuhi kriteria/unsur dalam PP 63/2019 dan PMK 53/2020.

BLU Maturity Rating Assessment

Maturity Rating Assessment BLU disusun untuk memenuhi kebutuhan akan penilaian kinerja BLU yang bersifat komprehensif dan universal. Hasil akhir dari penilaian maturitas adalah rekomendasi perbaikan kinerja BLU agar pertumbuhan dan peningkatan kualitas layanan BLU dapat dilakukan secara berkelanjutan dan dimonitor secara berkala. Tidak hanya bagi BLU yang dilakukan penilaian *maturity rating*, peningkatan kapasitas internal juga menjadi kebutuhan bagi Direktorat PPK BLU dan instansi lain mendapatkan mandat untuk melakukan pembinaan dan penilaian *maturity rating* kepada BLU.

Secara keseluruhan kegiatan pada BLU *Maturity Rating Assessment* telah dilaksanakan 100% yang terdiri dari kegiatan *Internal Capacity Building*, Regulasi Peraturan dan Manual Pelaksanaan BLU *Maturity Rating Assessment*, sosialisasi dan diseminasi kepada BLU dan implementasi *Maturity Rating* ke 40 BLU. Implementasi Pengukuran *Maturity Rating Assessment* BLU secara bertahap dalam rangka meningkatkan kinerja BLU menjadi lebih baik dan profesional yang memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BIOS NextGen Maturity Rating BLU

Untuk memastikan kontinuitas dan perkembangan layanan BLU tersebut, maka dibutuhkan seperangkat *tools* yang diharapkan mampu menilai kinerja BLU secara komprehensif dan universal bagi seluruh BLU. *Tools* ini diharapkan dapat menghasilkan penilaian yang digunakan oleh Pembina Pengelola Keuangan BLU (PPKBLU), K/L teknis, maupun instansi BLU masing-masing dalam mengidentifikasi *area for improvement*.

Pada aplikasi BIOS-G2 dilakukan penyempurnaan dengan menambahkan modul *maturity rating* BLU yang berfungsi sebagai sarana untuk *Self Assessment Maturity Rating* yang dapat dilakukan oleh BLU secara terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan akan penilaian kinerja BLU. Pengembangan Aplikasi BIOS Modul *Maturity Rating* dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja BLU menjadi lebih baik dan profesional yang memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat, melalui Aplikasi BIOS.

Otomatisasi Telaah Laporan Keuangan

Otomatisasi telaah Laporan Keuangan merupakan sebuah fitur yang dikembangkan bersama oleh Direktorat APK dan Direktorat SITP yang ditanamkan pada aplikasi e-Rekon & LK untuk melakukan analisis laporan keuangan terbatas berupa analisis vertikal dan analisis horizontal secara otomatis dan sistematis dalam rangka memperoleh keyakinan atas kualitas penyajian LKKL.

Output utama yang menjadi terobosan dari Otomatisasi Telaah Laporan Keuangan adalah Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan terintegrasi yang dapat diunduh dalam format pdf ataupun excel. Manfaat:

1. Memudahkan dan mempercepat proses telaah Laporan Keuangan.
2. Melengkapi fungsi dan fitur Aplikasi e-Rekon & LK dalam menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) yang berkualitas dan meminimalisasi adanya salah saji.
3. Mendukung proses telaah dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Electronic Bank Guarantee (E-BG)

Masih terdapatnya potensi permasalahan dalam penggunaan Bank Garansi, seperti potensi gagal klaim Bank Garansi, dan potensi tidak validnya Bank Garansi yang dilampirkan. Dengan menggandeng bank-bank HIMBARA, Direktorat Sistem Perbendaharaan menciptakan inovasi yang diberi nama *Electronic Bank Guarantee* (E-BG) sehingga konfirmasi dan penatausahaan keabsahan Bank Garansi dapat dilakukan secara elektronik.

Tujuan dari implementasi *Electronic Bank Guarantee* (E-BG) adalah mengamankan uang negara yang dijamin dengan Bank Garansi sehingga mendukung pengelolaan keuangan APBN yang akuntabel dan kredibel. Adapun manfaat dari implementasi *Electronic Bank Guarantee* (E-BG) bagi Bendahara Umum Negara (BUN) adalah memastikan pengeluaran negara sudah dijamin dengan Bank Garansi yang valid dan mudah dalam proses klaim apabila terjadi wanprestasi. Sedangkan bagi perbankan adalah tersedianya data kontrak yang valid dari BUN.

Rancangan Treasury Big Data

Maksud dari *quickwins* ini adalah sebagai dasar untuk pembangunan *Treasury Big Data* Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk mengelola, mengolah dan menganalisis data-data yang ada di internal Direktorat SITP maupun data yang bersumber dari eksternal Direktorat SITP agar menjadi pendukung keputusan strategis maupun taktis Direktorat SITP. Rancangan *Treasury Big Data* sebagai acuan pengembangan *Treasury Big Data* menyeluruh untuk mendukung pengambilan keputusan strategis DJPb, memenuhi kebutuhan *stakeholders* akan analisis data dan informasi.

Treasury Big Data akan menjadi teknologi yang mendasari pengambilan keputusan strategis bagi pimpinan DJPb di area pelaksanaan anggaran, perencanaan kas, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), manajemen investasi, hingga pelaporan keuangan dan penyediaan informasi perbendaharaan berdasarkan data yang dimiliki dari berbagai sumber, yang akan berdampak ke masyarakat umum.

Quickwins DJPb Tahun 2022

Automatic Business Intelligence Dashboard (ABID)

Automatic Business Intelligence Dashboard mengintegrasikan data dari beberapa bagian di lingkungan Sekretariat Ditjen Perbendaharaan agar dapat memberikan rekomendasi kebijakan secara otomatis yang disajikan dalam sebuah *Business Intelligence (BI)*. Beberapa capaian signifikan dari ABID meliputi pengembangan *dashboard* infografis yang menampilkan kinerja realisasi belanja seluruh kantor vertikal, *tools* perencanaan anggaran untuk kebutuhan 5 tahun ke depan, serta estimasi kebutuhan dan penghapusan peralatan dan mesin. Hasil pengolahan data ini juga memungkinkan identifikasi potensi PNPB dan pemetaan gedung melalui tur virtual, memperkuat pengambilan keputusan pimpinan berbasis data.

Digitalisasi Bantuan Sosial melalui Penyempurnaan Mekanisme Penyaluran dan Penggunaan Platform Digital

Digitalisasi penyaluran bantuan sosial merupakan modernisasi penyaluran bantuan sosial melalui kanal platform digital untuk penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah. Sebagai payung hukum dalam pelaksanaan uji coba penyaluran bantuan sosial melalui Lembaga Keuangan Digital diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-21/PB/2022. Upaya ini bertujuan memperluas kanal penyaluran yang ramah penerima, meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pemantauan aliran dana, serta mendukung literasi keuangan dan inklusi keuangan masyarakat, sejalan dengan upaya menciptakan komunitas tanpa uang tunai yang terintegrasi secara digital.

Interoperabilitas Digipay pada Bank Umum

Dalam rangka meningkatkan fleksibilitas dan cakupan layanan, Direktorat PKN bersama Direktorat SITP mengembangkan Digipay Satu dengan fitur interoperabilitas antarbank. Hal ini memungkinkan transaksi antara satuan kerja dan vendor dilakukan lintas bank, sehingga memperluas penggunaan Digipay dan mendukung UMKM untuk masuk ke ekosistem digital pemerintah. Soft Launching Platform Digipay Satu telah dilaksanakan pada tanggal 23-25 November 2022 yang diikuti oleh seluruh Kanwil dan KPPN.

Implementasi Investasi Pemerintah (Tahap II)

Sebagai tindak lanjut Quickwin 2021 yang dimaksudkan untuk menandai Go Live Investasi Pemerintah, pada tahun 2022 ditetapkan Quickwins Implementasi Investasi Pemerintah (Tahap II). Adapun capaian yang telah dilakukan antara lain: penetapan anggota KIP, *Tim Task Force*, dan UKP untuk memastikan supervisi dan pengawasan dalam pelaksanaan investasi, serta penunjukan BLU pengelola dana sebagai OIP untuk memperkuat mekanisme pengelolaan investasi. Selain itu, terwujudnya sistem informasi berupa aplikasi untuk investasi pemerintah pada *use case* BP Tapera menunjukkan pencapaian dalam mendukung transparansi dan efektivitas proses investasi. Program ini diharapkan mendukung ekosistem investasi yang berkelanjutan dan berkontribusi pada pemulihan serta pertumbuhan ekonomi nasional.

Early Warning System: Pengukuran Kemampuan Debitur (BUMN dan Pemda) untuk Membayar Pinjaman

Pada tahun 2022, EWS difokuskan pada penyempurnaan metodologi penilaian dan model statistik untuk mengukur probabilitas pembayaran utang oleh debitur, dengan melibatkan analisis 10 rasio keuangan pada debitur BUMN dan tiga indikator utama pada debitur Pemda yaitu Individual Risk, DSCR, dan Kapasitas Fiskal Daerah. Dengan EWS diharapkan dapat mengukur probabilitas tingkat kemampuan bayar debitur sebagai *early warning system* mencegah terjadinya kegagalan bayar, sehingga Subdirektorat Investasi BUMN memiliki cukup waktu dalam memformulasi *exit strategy* mencegah terjadinya piutang negara yang berkualitas kurang lancar.

Sinergi Pembinaan BLUD

Sinergi Pembinaan BLUD meliputi pelaksanaan asistensi dan pembinaan oleh Direktorat PPK BLU kepada pemerintah daerah dan BLUD. Kegiatan tersebut mencakup asistensi mengenai *maturity rating* BLU, FGD terkait sistem remunerasi di RS/RSUD, serta pelaksanaan *coaching* mengenai Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penilaian Kinerja BLUD di Lingkungan Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Manfaat yang diperoleh adalah peningkatan sinergi antara DJPb, Pemda, dan Kemendagri guna memastikan implementasi tata kelola keuangan BLUD yang efisien, produktif, dan sesuai peraturan, sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang lebih baik.

Maturity Rating Satker BLU

BLU *Maturity Rating Assessment Tools and Evaluation* disusun sebagai perangkat untuk mengukur tingkat maturitas BLU pada seluruh aspek organisasi secara komprehensif, di mana *tools* ini bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan kondisi serta target pada tahun yang bersangkutan. Terdapat 6 (enam) aspek penilaian yang terdiri atas aspek penilaian *result based* dan *process based*. Penilaian dengan menggunakan BLU *Maturity Rating* yang dilakukan secara reguler dan berkelanjutan, diharapkan dapat mendorong BLU untuk terus bertumbuh mengikuti perkembangan dan kebutuhan pengguna layanan, hingga menghasilkan BLU yang kuat dengan kualitas layanan yang bersaing dan berstandar internasional.

Dashboard Flash Report Transaksi BUN

Dashboard Flash Report Transaksi BUN berhasil dikembangkan sebagai fitur di OMSPAN yang mempermudah dan mempercepat akses laporan manajerial terkait transaksi keuangan Bendahara Umum Negara (BUN). *Dashboard* ini dirancang untuk menampilkan pos-pos penting dalam Laporan Keuangan BUN secara *real-time*, lengkap dengan diagram dan grafik, sehingga mendukung pengambilan keputusan, bahan monitoring dan evaluasi, serta keperluan lainnya. *Dashboard* terdiri dari 7 menu utama, yaitu: *Highlight*, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Peta Sebaran Geospasial Transfer Keuangan Daerah.

Simplifikasi Rekonsiliasi dengan MONSAKTI

Simplifikasi rekonsiliasi dengan MONSAKTI dikembangkan untuk mendukung implementasi SAKTI khususnya pada Modul *General Ledger* dan Pelaporan dapat berhasil dengan baik. implementasi rekonsiliasi dengan MONSAKTI menyediakan fitur berupa validasi daftar (kesesuaian persamaan dasar akuntansi), validasi BMN (monitoring data BMN tidak normal), monitoring ketidaksesuaian akun belanja, monitoring transaksi yang belum tuntas, dan daftar rincian data keuangan dan BMN. Quickwins ini memiliki manfaat untuk pengawasan dan pengendalian internal dalam hal menganalisa hasil rekonsiliasi antara data SAI dan SiAP yang dilakukan pada MONSAKTI dan dapat dilakukan lebih cepat (*day to day*). Selain itu juga memudahkan dalam memonitoring proses penyusunan data laporan keuangan maupun laporan BMN secara *realtime* sehingga dapat mendukung analisa, perbaikan dan pengambilan keputusan.

Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN)

Salah satu bentuk kerja sama/kemitraan yang diinisiasi DJPb adalah pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN). Pada tahun 2022 telah terbentuk FKPKN di seluruh provinsi untuk memperkuat peran DJPb sebagai *Regional Chief Economist* (RCE). Forum ini bertujuan untuk membangun sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, sektor keuangan, dan akademisi, demi mendukung pengelolaan keuangan negara yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Selain itu, FKPKN menghasilkan laporan kegiatan yang tidak hanya memuat pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, namun juga *feedback*/masukan dan rekomendasi kepada para *stakeholders* di bidang pengelolaan keuangan negara.

Treasury Big Data

Dalam upaya pengelolaan organisasi yang unggul, terintegrasi, fleksibel dan ramah pengguna, Direktorat SITP melakukan pembangunan *Treasury Big Data* yang mencakup pengembangan sistem yang mampu mengelola data yang besar, beragam, dan berubah cepat, dengan menggunakan pendekatan *Online Analytical Processing* (OLAP). Melalui Dashboard TBD tersedia layanan akses data melalui mekanisme *data pooling*, *data warehouse*, dan *data lake*. Selain itu, tersedia layanan *data analytics* berbasis statistik dan *machine learning*. Layanan data visualisasi atas permodelan *data analytics* dalam bentuk *business intelligence* juga tersedia dalam dashboard tersebut. TBD menjadi sumber data utama di DJPb, sebagai platform utama dalam analisis dan sains data DJPb, mendukung rencana pengembangan bisnis DJPb seperti RCE dan ALCO regional yang memerlukan beragam data dari berbagai sumber.

Elektronifikasi Transaksi SAKTI

Pengembangan Elektronifikasi Transaksi SAKTI merupakan upaya DJPb untuk menyederhanakan proses bisnis pembayaran APBN dengan memperkenalkan dokumen digital dan penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi. Implementasi ini bertujuan untuk menghilangkan proses manual seperti cetak, tanda tangan, dan unggah dokumen, yang memperlambat alur kerja dan meningkatkan risiko kesalahan. Dengan mengintegrasikan TTE tersertifikasi, DJPb bekerja sama dengan BSSN untuk memastikan keamanan dan keabsahan hukum proses pembayaran secara elektronik. Dengan penerapan quickwins ini, pengajuan dokumen pembayaran menjadi lebih cepat dan efisien, sehingga mempercepat dan mempermudah proses administrasi keuangan negara.

Quickwins DJPb Tahun 2023

Dashboard ORGANISE (Organization and Governance Integrated System)

Dashboard ORGANISE merupakan pengembangan lebih lanjut dari ABID (*Automatic Business Intelligence Dashboard*) dengan fokus pengembangan data keorganisasian menjadi modul-modul dalam sebuah portal yang memuat data terkait karakteristik unit DJPb. Dashboard ini menyediakan beberapa segmen data antara lain: kinerja organisasi, profil satker, dan data UMi. Implementasi *dashboard* ini memperkuat mekanisme pelaporan dan monitoring kinerja dengan memungkinkan unit vertikal mengunggah dan mengakses data secara *real-time*, sehingga memudahkan proses pengambilan keputusan pimpinan yang berbasis data.

Modul Proyeksi Capaian Output (on SAKTI)

Modul Proyeksi Capaian Output (on SAKTI) merupakan pengembangan proses bisnis untuk mempermudah satuan kerja (Satker) dalam memproyeksikan target capaian output dan menyesuaikannya dengan jadwal pelaksanaan kegiatan secara mandiri. Modul ini diintegrasikan dalam aplikasi SAKTI dan telah diluncurkan pada server produksi sehingga dapat diakses oleh seluruh user mulai 10 Juli 2023. Modul ini juga mendukung evaluasi kinerja melalui pengumpulan data proyeksi capaian output sebagai basis monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan pelaksanaan anggaran.

Dashboard Fiskal Regional

Dashboard Fiskal Regional (DFR) bertujuan untuk mendukung monitoring, evaluasi, dan kajian fiskal regional serta memfasilitasi peran Regional Chief Economist (RCE). Pengembangan DFR telah diselesaikan pada Oktober 2023 dan dilakukan peluncuran resmi oleh Direktur Pelaksana Anggaran pada tanggal 17 November 2023. Dashboard ini menyediakan data pagu dan realisasi APBN/APBD, indikator penilaian IKPA, serta data indikator ekonomi. Penggunaan dashboard memungkinkan proses penyajian data/informasi fiskal dan ekonomi secara komprehensif, akurat, tersentralisasi, meminimalisasi human error, serta memberikan kemudahan bagi penggunaanya.

Implementasi Government E-Wallet dalam Transaksi Pemerintah

Dompot Digital Pemerintah merupakan salah satu perwujudan digitalisasi pengelolaan kas negara terutama dalam pembayaran belanja pemerintah dengan menggunakan sistem *cashless*. Pengembangan Aplikasi Government E-Wallet dilakukan melalui kerja sama dengan PT Nusa Satu Inti Artha (Doku) sebagai mitra penyedia layanan e-wallet. Uji coba telah dilakukan untuk pembayaran lembur pegawai di Direktorat PKN melalui LS bendahara untuk periode lembur bulan Februari 2023 dan sejak periode lembur bulan September 2023 dilakukan melalui LS penerima. Selain itu juga telah dilakukan uji coba di lingkup satuan kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk biaya operasional penyidik yang dikelola oleh Pemegang Uang Muka (PUM). Manfaat yang diperoleh atas implementasi quickwins ini adalah terwujudnya belanja negara melalui mekanisme *cashless* yang mengedepankan efisiensi dan efektivitas penyaluran dana, ketepatan waktu, jumlah, dan sasaran, serta kemudahan dalam monitoring dan manajemen (pengendalian kas).

Early Warning System (EWS) Pinjaman Debitur BUMN dan Pemda 2.0

EWS Pinjaman Debitur BUMN dan Pemda adalah suatu model prediksi untuk mengukur kemampuan bayar debitur sebagai upaya preventif atas terjadinya gagal bayar. Pada tahun 2023, telah dilakukan penerapan *modelling* proyeksi dalam EWS Pinjaman Pemda dan penyajian data hasil penilaian EWS seluruh debitur BUMN pada aplikasi Analisis dan Dashboard Investasi (ADI) Direktorat SMI. Manfaat dari EWS BUMN adalah menjadi pedoman dalam menganalisis kemampuan debitur BUMN untuk mengantisipasi kondisi gagal bayar. Adapun manfaat dari EWS Pemda yaitu untuk membangun sistem yang andal sebagai *tools* bagi Direktorat Sistem Manajemen Investasi untuk memitigasi risiko gagal bayar pinjaman Pemda, serta bagi Kanwil DJPb dan KPPN sebagai bahan dalam melaksanakan fungsi monitoring, analisis, dan pembinaan keuangan daerah.

Implementasi Tata Kelola *New Architecture Design for Investment Administration* (NADIA)

New Architecture Design for Investment Administration (NADIA) adalah cetak biru organisasi yang menyelaraskan visi, misi, dan strategi organisasi dengan peta proses bisnis, mengorelasikan seluruh aspek dimensi organisasi menggunakan satu *tool* terintegrasi. Pada tahun 2023, telah dirumuskan kajian Penyaluran dan Pelaporan Investasi Pemerintah dalam Rangka Penyempurnaan *New Architecture Design For Investment Administration* (NADIA). Kajian ini diharapkan menjadi masukan penyusunan peraturan teknis atas revisi PP 63/2019. Dengan adanya tata kelola NADIA, diharapkan Investasi Pemerintah dikelola dengan proses bisnis pruden, risiko operasional yang terpetakan, serta sistem informasi yang terintegrasi.

Pengembangan BLU DMS (Decision Making Support System) - Data Layanan BLU

BLU DMS bertujuan untuk melakukan integrasi data layanan pada BLU rumpun pendidikan dan BLU rumpun kesehatan dengan menjalin kerja sama pemanfaatan data, yang disimpan pada *Treasury Big Data* dan digunakan untuk mendukung fungsi pembinaan yang dilakukan oleh Direktorat PPK BLU dalam mendukung budaya *data-driven decision making*. Pencapaian quickwins ini adalah tersedianya Dashboard Monitoring pada BIOS. Dashboard tersebut telah dikembangkan dan di-*deploy* pada server BIOS Production dengan menggunakan data *sample* dari Satker BLU RS Fatmawati dan Poltekkes Bandung. Dengan pengembangan BLU DMS diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi BLU dengan dukungan data yang kredibel serta terbentuknya budaya sadar data pada BLU dan Kementerian Keuangan.

Konsolidasi Pengelolaan Kas BLU

Konsolidasi Pengelolaan Kas BLU bertujuan untuk mengumpulkan *idle cash* BLU agar dapat dioptimalkan dalam berbagai bentuk investasi maupun untuk kepentingan pembiayaan APBN apabila diperlukan. Dalam mendukung tujuan tersebut, telah dilakukan pemetaan BLU dan diperoleh sebanyak 20 BLU (8,62% dari jumlah BLU yang memiliki potensi *idle cash*), yang tersebar pada rumpun kesehatan, pendidikan, dan BLU lainnya. Potensi konsolidasi kas adalah Rp 3,82 triliun (55,16% dari total *idle cash* BLU sebesar Rp 6,9 triliun). Manfaat dari quickwins ini adalah optimalisasi saldo BLU dalam rangka peningkatan layanan, peningkatan pendapatan BLU, dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan kas BLU.

Percepatan Asersi Laporan Keuangan K/L yang Handal dan Akuntabel

Implementasi quickwins ini diawali dengan penetapan Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Dengan implementasi Perdirjen tersebut, diperoleh kualitas data Laporan Keuangan K/L telah mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan selisih data pada rekonsiliasi eksternal dan ketidaksesuaian data pada fitur *To Do List* aplikasi MonSAKTI semakin berkurang serta tutup periode yang lebih tertib pada aplikasi SAKTI.

Mekanisme Pembayaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran

Dengan penggunaan teknologi informasi pada tata kelola pemerintahan, memungkinkan adanya modernisasi pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran, salah satunya berupa mekanisme pembayaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Adapun output yang dihasilkan atas *quickwins* ini adalah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran.

Sistem Informasi Kepesertaan Jamkestama dan Jamkesmen (SIPRIMA)

SIPRIMA adalah aplikasi untuk mengakses, menambah, mengurangi, dan mengubah data kepesertaan program Jamkesmen dan Jamkestama. Pengembangan sistem telah

diselesaikan pada Agustus 2023 dan telah dilakukan *User Acceptance Test* (UAT) bersama PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) selaku badan penyelenggara dan perwakilan K/L. Sosialisasi telah dilaksanakan agar seluruh pengguna memiliki pengetahuan yang memadai untuk mengoperasikan SIPRIMA sesuai peran dan kewenangannya masing-masing.

Migrasi dan Utilisasi Gaji Web K/L

Dalam mewujudkan pengembangan sistem pengelolaan Gaji PNS Pusat yang lebih modern, perlu dilakukan migrasi dan utilisasi Gaji Web pada seluruh Kementerian/Lembaga yang sebelumnya menggunakan Aplikasi GPP Desktop menjadi Gaji Web (gaji.kemenkeu.go.id). Kegiatan Migrasi Aplikasi Gaji Web Sekaligus telah dilakukan pada 19 Juni 2023 sampai dengan 23 Juni 2023. Melalui implementasi *quickwins* ini, diharapkan dapat meningkatkan signifikan dalam efisiensi pengolahan data dan pembayaran gaji yang lebih akurat dan tepat waktu.

Pengembangan OM SPAN untuk Mendukung Penyaluran Seluruh TKD melalui KPPN Mitra Pemerintah Daerah

Substansi dari pengembangan TKD meliputi seluruh transaksi Belanja Transfer yaitu Dana Transfer Umum (DTU), Dana Transfer Khusus (DTK), dan DDIOKK (Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus dan Keistimewaan). Seluruh modul OM SPAN TKD telah diselesaikan namun demikian yang telah efektif digunakan untuk penyaluran sesuai target dan proyeksi *quickwins* adalah untuk modul DAU dan DBH. Interkoneksi dengan Aplikasi SIMTRADA telah dilakukan dengan komunikasi data melalui *Application Programming interface* (API). Komponen data utama yang disepakati untuk dialirkan meliputi Jenis TKD, Referensi Status, dan Referensi Periode dalam bentuk uraian.



Mengembangkan Sayap

Begitu keluar dari kepompong, kupu-kupu mulai memompa cairan tubuh yang disebut hemolimfa ke dalam pembuluh-pembuluh di sayapnya. Proses ini **membantu mengembangkan dan menghaluskan sayap yang sebelumnya kusut**. Proses ini sangat penting karena tanpa sayap yang berfungsi dengan baik, kupu-kupu tidak akan bisa mencari makanan sehingga kelangsungan hidupnya terancam. Sama seperti halnya proses transformasi yang penyampaianya harus dilakukan dengan tepat sehingga **tidak disalahartikan serta dapat dilangsungkan dengan tepat sasaran**, bahwa perubahan yang dilakukan untuk mendorong keseluruhan ekosistem organisasi menjadi lebih baik tidak terhenti karena adanya tantangan retensi para pegawai maupun pemangku kepentingan.

BAGIAN III: PLATFORM PEMBAYARAN PEMERINTAH

GAMBARAN UMUM

Platform Pembayaran Pemerintah (Government Payment Platform) adalah interkoneksi sistem antara core system dengan sistem pendukung, sistem mitra, dan sistem monitoring dalam rangka pelaksanaan pembayaran pemerintah. Platform bertujuan agar pembayaran dapat dilakukan secara elektronik dan dapat diakses pejabat yang berwenang dari berbagai kanal pembayaran.

Platform Pembayaran Pemerintah berfungsi sebagai konsolidator backend sistem elektronik yang bertujuan agar pembayaran

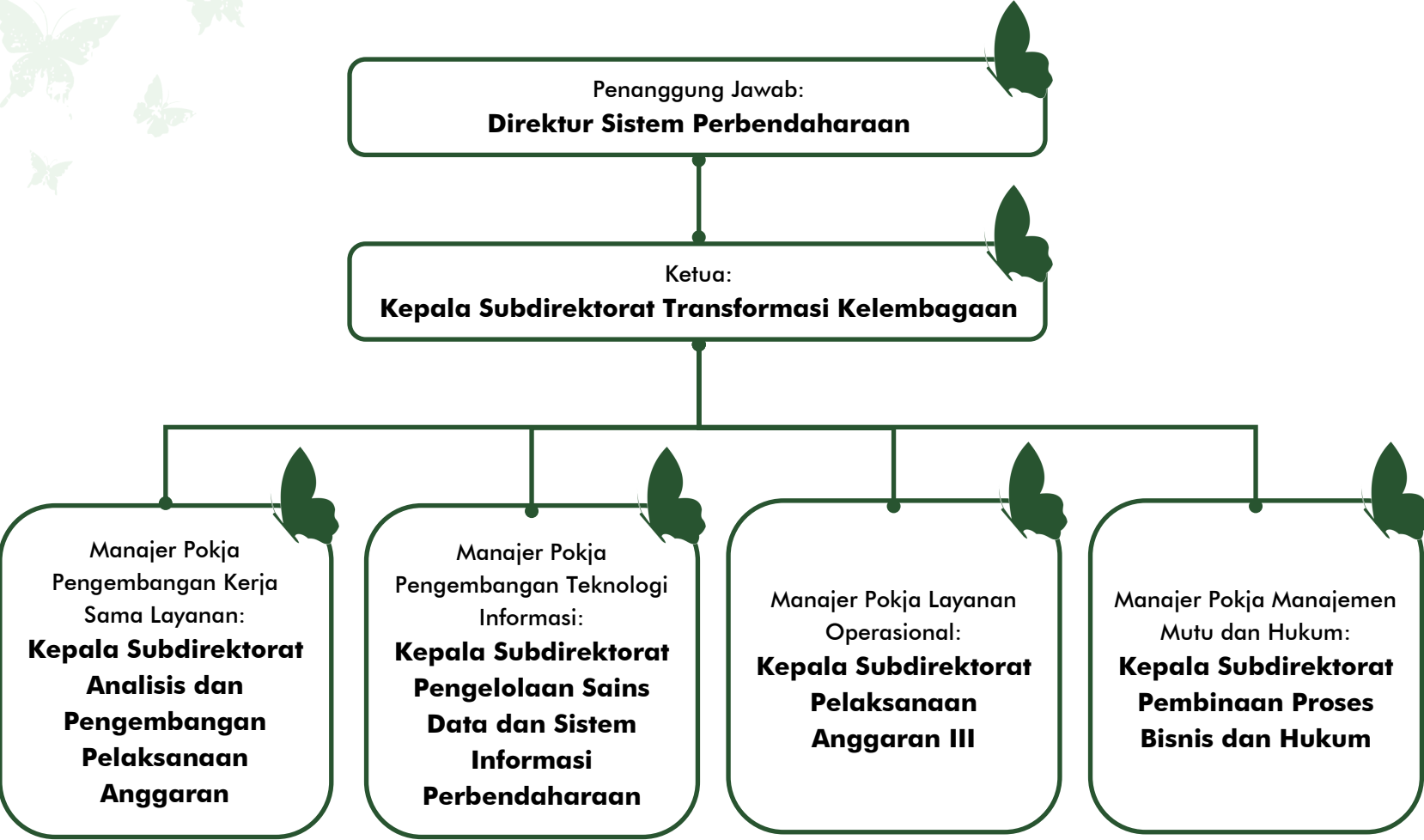
pemerintah dapat dilakukan secara elektronik dan dapat diakses pejabat yang berwenang dari berbagai kanal pembayaran. Hal tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) yang menyediakan dan mengelola core system pembayaran pemerintah (SPAN, SAKTI, Gaji Web).

Pengembangan dan implementasi layanan pembayaran melalui Platform Pembayaran Pemerintah merupakan bentuk respons Direktorat Jenderal Perbendaharaan terhadap faktor eksternal dan internal yang meliputi perkembangan teknologi informasi, peningkatan kualitas layanan, kebutuhan dan pengelolaan basis data, simplifikasi dan digitalisasi proses bisnis, serta mandat program Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan.



Gambar: Proses Bisnis Platform Pembayaran Pemerintah

**TIM PENGELOLA PLATFORM PEMBAYARAN
PEMERINTAH (AD HOC)**



DASAR HUKUM IMPLEMENTASI PLATFORM PEMBAYARAN PEMERINTAH



Penetapan Platform Pembayaran Pemerintah sebagai Inisiatif Strategis Kementerian

Platform Pembayaran Pemerintah ditetapkan sebagai Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan sejak tahun 2019 hingga saat ini, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tahun 2019, Platform Pembayaran Pemerintah ditetapkan sebagai bagian dari Inisiatif Strategis Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran melalui Penggunaan Teknologi Digital (*Shared Services and Government Platform*) melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 302/KMK.01/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan;
2. Pada tahun 2020, Platform Pembayaran Pemerintah ditetapkan sebagai bagian dari Inisiatif Strategis Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran melalui Penggunaan Teknologi Digital (*Shared Services and Government Platform*) melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 125/KMK.01/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan (yang telah direvisi dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 424/KMK.01/2020 tanggal 21 September 2020). Selanjutnya, tata kelola implementasi Inisiatif Strategis ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan nomor KEP-120/SJ/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor KEP-438/SJ/2019 tentang Tata Kelola Implementasi IS Program RBTK Kementerian Keuangan.
3. Pada tahun 2021, Platform Pembayaran Pemerintah ditetapkan sebagai bagian dari Inisiatif Strategis Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran melalui Penggunaan Teknologi Digital (*Shared Services and Government Platform*) melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 91/KMK.01/2021 tanggal 3 Maret 2021 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan. Selanjutnya, tata kelola implementasi Inisiatif Strategis ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan nomor KEP-59/SJ/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Tata Kelola Implementasi IS Program RBTK Kementerian Keuangan.
4. Pada tahun 2022, Platform Pembayaran Pemerintah ditetapkan sebagai bagian dari Inisiatif Strategis Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran Melalui Penggunaan Teknologi Digital (*Platform Pembayaran Pemerintah*) melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 88/KMK.01/2022 tanggal 17 Maret tentang Implementasi Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan. Selanjutnya, tata kelola implementasi Inisiatif Strategis ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan nomor KEP-35/SJ/2022 tanggal 17 Maret 2022 tentang Tata Kelola Implementasi Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan.
5. Pada tahun 2023, Platform Pembayaran Pemerintah ditetapkan sebagai bagian dari Inisiatif Strategis Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran Melalui Penggunaan Teknologi Digital (*Platform Pembayaran Pemerintah*) melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan. Selanjutnya, tata kelola implementasi Inisiatif Strategis ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan nomor KEP-332/SJ/2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Tata Kelola Implementasi Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan.

Penetapan Cetak Biru (Blueprint) Platform Pembayaran Pemerintah

Cetak Biru (Blueprint) Platform Pembayaran Pemerintah disusun sebagai pedoman pengembangan Platform Pembayaran Pemerintah. Penetapannya melalui Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-286/PB/2019 tanggal 27 November 2019 tentang Cetak Biru (Blueprint) Platform Pembayaran Pemerintah (Government Payment Platform) sebagai Pelaksanaan Layanan Shared Service Pembayaran Pemerintah.

Penetapan Tim Pengelola Platform Pembayaran Pemerintah

Untuk mendukung penyelenggaraan Platform Pembayaran Pemerintah sesuai dengan Cetak Biru (Blueprint) Platform Pembayaran Pemerintah yang telah ditetapkan dalam Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-286/PB/2019, perlu dibentuk Tim Pengelola Platform Pembayaran Pemerintah (Ad Hoc) yang ditetapkan melalui Kepdirjen Perbendaharaan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tahun 2020 penetapan Tim melalui Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-130/PB/2020 tanggal 9 Juni 2020 tentang Tim Pengelola Platform Pembayaran Pemerintah (Ad Hoc). Tim Pengelola terdiri dari beberapa unit lintas Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang terlibat dalam pengembangan Platform Pembayaran Pemerintah.
2. Sehubungan dengan adanya mutasi pejabat/pegawai anggota Tim Pengelola, maka pada tahun 2021 dilakukan perubahan susunan Tim Pengelola yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-115/PB/2021 tanggal 9 Juni 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP130/PB/2020 tanggal 9 Juni 2020 Tentang Tim

Pengelola Platform Pembayaran Pemerintah (Ad Hoc). Perubahan anggota Tim Pengelola kembali dilakukan melalui penetapan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-321/PB/2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-130/PB/2020 tanggal 9 Juni 2020 Tentang Tim Pengelola Platform Pembayaran Pemerintah (Ad Hoc).

3. Pada tahun 2022, perubahan Tim Pengelola ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-132/PB/2022 tanggal 15 Juni 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-130/PB/2020 tentang Tim Pengelola Platform Pembayaran Pemerintah (Ad Hoc).
4. Pada tahun 2023, perubahan Tim Pengelola ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-35/PB/2023 tanggal 21 Maret 2023 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-130/PB/2020 tentang Tim Pengelola Platform Pembayaran Pemerintah (Ad Hoc). Selain itu, juga ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-32/PB/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Tim Asistensi Platform Pembayaran Pemerintah Tahun 2023.

Penetapan Pengaturan Piloting Platform Pembayaran Pemerintah

Tata cara pembayaran dalam pelaksanaan APBN melalui Platform Pembayaran Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.05/2020 tentang *Piloting* Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Melalui Platform Pembayaran Pemerintah. Selanjutnya pada tahun 2022 diperlukan perubahan pada peraturan tersebut, sehingga ditetapkan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 182/PMK.05/2022 tentang *Piloting* Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Melalui Platform Pembayaran Pemerintah.

sehingga sampai dengan buku ini disusun, pelaksanaan Platform Pembayaran Pemerintah menggunakan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2023.

Penetapan Petunjuk Teknis Implementasi Platform Pembayaran Pemerintah

Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur terkait *Piloting* Platform Pembayaran Pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan Platform Pembayaran Pemerintah ditetapkan dengan Perdirjen Perbendaharaan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tahun 2020 ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-25/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Belanja Pegawai dan Belanja Operasional dalam *Piloting* Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Platform Pembayaran Pemerintah. Peraturan ini ditetapkan berdasarkan amanat dari PMK Nomor 204/PMK.05/2020.
2. Pada tahun 2022, dilakukan perubahan yang sekaligus mencabut Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-25/PB/2020. Perubahan tersebut dilakukan melalui penetapan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Belanja Pegawai dan Belanja Operasional dalam *Piloting* Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Platform Pembayaran Pemerintah.
3. Dalam rangka penyesuaian proses bisnis, pada tahun 2023 ditetapkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Belanja Pegawai dan Belanja Operasional dalam *Piloting* Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Platform Pembayaran Pemerintah. Peraturan ini mencabut Perdirjen Perbendaharaan PER-25/PB/2020,

Perjanjian Kerja Sama dengan Mitra

Implementasi Platform Pembayaran Pemerintah atas belanja jasa listrik dan telekomunikasi dilakukan dengan pihak mitra. Perjanjian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerja Sama Nomor PRJ-293/PB/2021 antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan PT PLN (Persero) tentang Interkoneksi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dengan Sistem Web Service terkait Mekanisme Pembayaran Tagihan Pemakaian Energi Listrik dalam Rangka Pelaksanaan Platform Pembayaran Pemerintah.
2. Perjanjian Kerja Sama Nomor PRJ-294/PB/2021 antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan PT Telekomunikasi Indonesia tentang Interkoneksi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dengan Sistem My Citra terkait Mekanisme Pembayaran Tagihan Jasa Telekomunikasi dalam Rangka Pelaksanaan Platform Pembayaran Pemerintah.

Penetapan Interkoneksi dengan Sistem Pendukung

Interkoneksi antara core system dengan sistem pendukung dalam ekosistem Platform Pembayaran Pemerintah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-300/PB/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Migrasi

Aplikasi Gaji Modul Satker Berbasis Web dan Interkoneksi Sistem Kepegawaian Kementerian Keuangan Dengan Aplikasi Gaji Modul Satker Berbasis Web Dalam Piloting Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Melalui Platform Pembayaran Pemerintah.

- Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-87/PB/2023 tentang Penetapan Interkoneksi Aplikasi Kepegawaian (Human Resources Information System/HRIS), Aplikasi Satu Kemenkeu, Sistem Informasi Laporan Absensi Pegawai, dan Aplikasi Tunjangan Kinerja (E-Tukin) Kementerian Keuangan dengan Aplikasi Gaji dalam rangka Pembayaran Belanja Pegawai secara Elektronik.

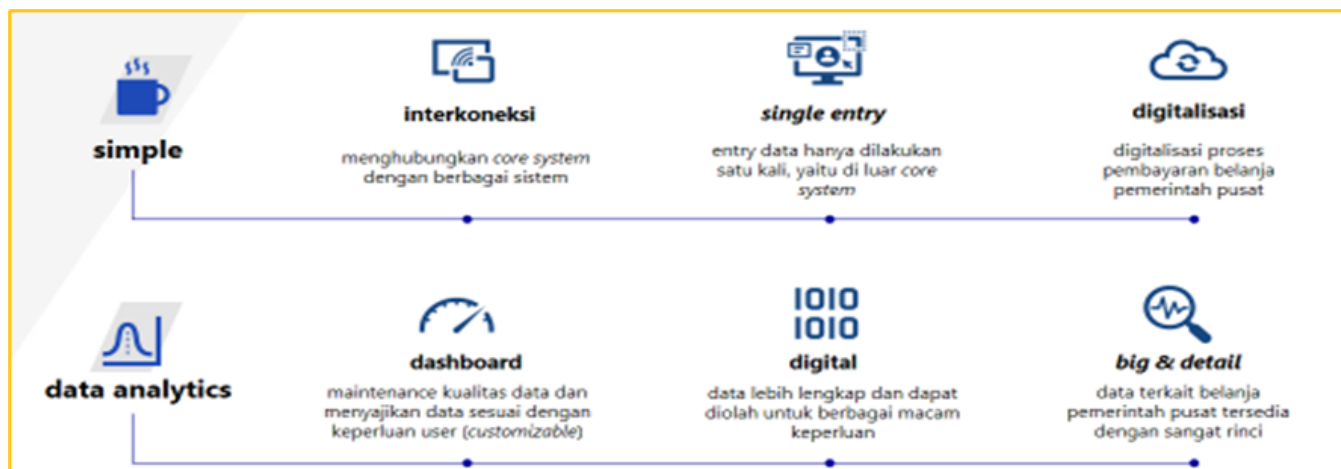
Penetapan Peserta Piloting Platform Pembayaran Pemerintah

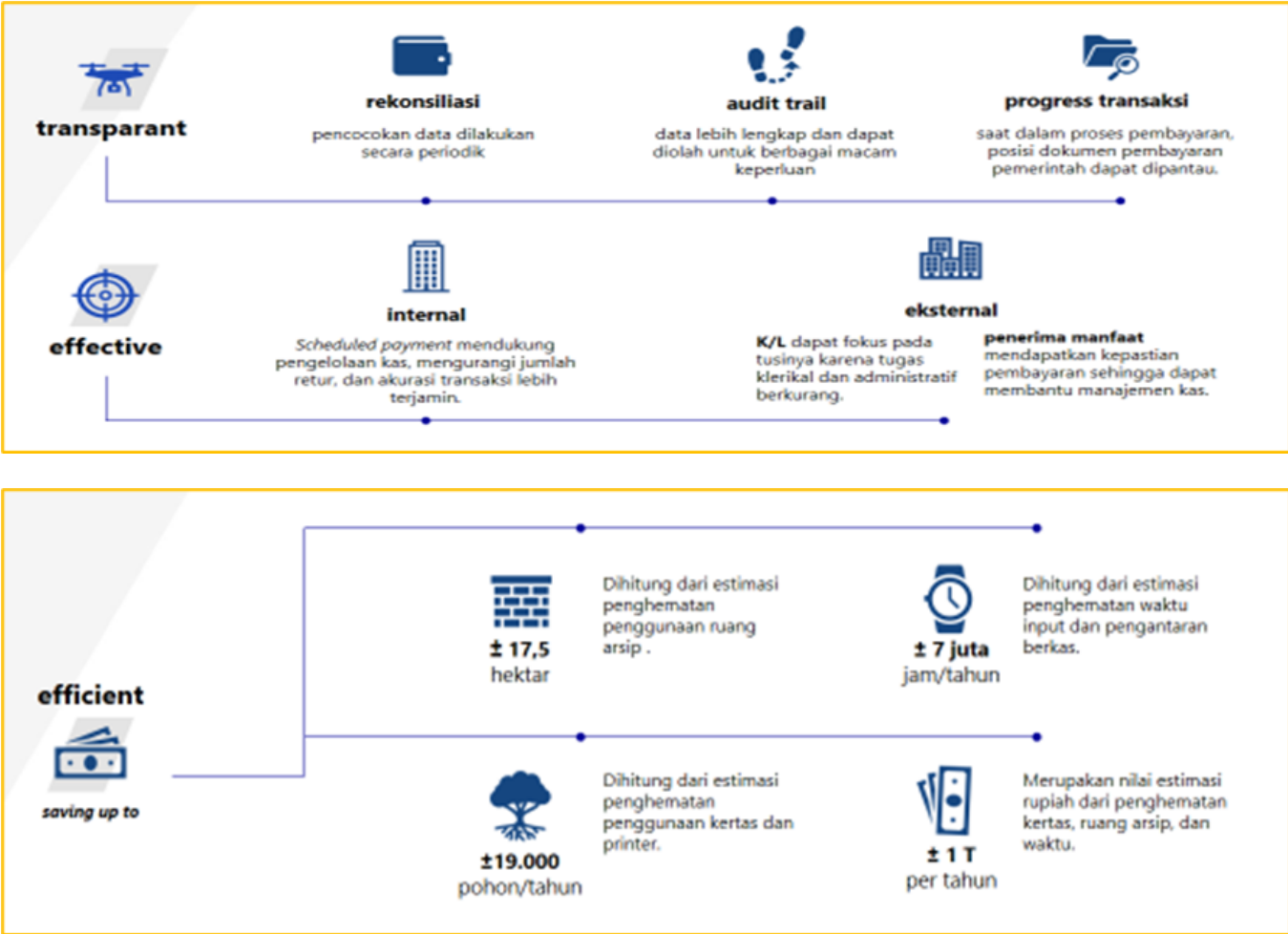
Berdasarkan peraturan yang mengatur terkait piloting pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara melalui Platform Pembayaran Pemerintah,

peserta piloting ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan. Keputusan Menteri Keuangan yang telah ditetapkan antara lain:

- Peserta Piloting pembayaran belanja pegawai dan belanja operasional ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KM-45/MK.5/2020 tentang Peserta Piloting Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Platform Pembayaran Pemerintah Tahap I.
- Pada tahun 2022, ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 3/KM.5/2022 tentang Peserta Piloting Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Platform Pembayaran Pemerintah Tahap I. Keputusan tersebut mencabut KMK Nomor KM-45/MK.5/2020.
- Peserta Piloting Platform Pembayaran Pemerintah Tahap II ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KM.5/2023 tentang Peserta Piloting Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Platform Pembayaran Pemerintah Tahap II.

MANFAAT PLATFORM PEMBAYARAN PEMERINTAH





Simple

Simplifikasi proses bisnis transaksi pembayaran pemerintah dilakukan melalui interkoneksi core system dengan sistem pendukung, sistem mitra, dan sistem monitoring. Kegiatan entry data pada layanan platform dilakukan secara single entry. Kegiatan transaksi pembayaran pemerintah melalui platform dilakukan secara digitalisasi.

Data analytics

Data transaksi pembayaran melalui Platform Pembayaran Pemerintah dilintaskan dan di-capture melalui Dashboard Platform. Data transaksi digital yang berisi informasi belanja pemerintah tersebut, dapat diolah dan dianalisis untuk mendukung pemerintah dalam pengambilan kebijakan efisiensi dan efektivitas belanja negara.

Transparent

Layanan pembayaran melalui Platform Pembayaran Pemerintah dilakukan secara transparan melalui pengaturan schedule payment, pengawasan proses & kepatuhan pembayaran, kegiatan rekonsiliasi pra dan pasca settlement, pelacakan histori transaksi melalui audit trail, dan penyimpanan dalam repository dalam bentuk digital.

Effective

Layanan pembayaran melalui Platform Pembayaran Pemerintah dapat memberikan manfaat bagi internal Ditjen Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Negara (BUN), dan bermanfaat bagi pihak eksternal seperti kementerian/lembaga dan pihak mitra. Manfaat bagi Ditjen Perbendaharaan selaku BUN antara lain mendukung pengelolaan kas dan akurasi kepastian transaksi pembayaran. Manfaat bagi pihak eksternal antara lain kementerian/lembaga dapat fokus pada penyelesaian tuisi utama, dan kepastian waktu serta jumlah bagi penerima pembayaran.

Efficient

Layanan pembayaran melalui Platform Pembayaran Pemerintah dapat memberikan manfaat berupa efisiensi dari penggunaan sumber daya. Efisiensi tersebut dapat diperoleh dari estimasi penggunaan ruang penyimpanan, penghematan waktu entry data, penghematan waktu pengantaran berkas, dan penghematan penggunaan kertas.

MILESTONE PENGEMBANGAN PLATFORM PEMBAYARAN PEMERINTAH

Milestones Tahun 2019

1. Penyelesaian desain Shared Service Center dan Government Platform.
2. Penyusunan dan penyelesaian regulasi (2019-2020).
3. Pembangunan Sistem SSC.
4. Pembentukan Unit Pengelola SSC (2019-2020).

Milestones Tahun 2020

1. Implementasi Platform Pembayaran Pemerintah pada pembayaran gaji di Kemenkeu.
2. Persiapan sertifikasi sistem Platform Pembayaran Pemerintah.
3. Development aplikasi DIGIT untuk fitur dashboard.
4. Pengembangan regulasi platform dan penyusunan PKS/SLA dengan PT PLN dan PT Telkom.
5. Penyusunan kajian tim pengelola platform dedicated.
6. Piloting pembayaran gaji lingkup Ditjen Perbendaharaan dan Setjen pada Desember 2020 untuk pembayaran gaji Januari 2021.
7. Kegiatan change management and communication.

Milestones Tahun 2021

1. *Piloting* pembayaran tagihan *common expenses* (listrik dan telekomunikasi) lingkup Ditjen Perbendaharaan dan Setjen Kemenkeu.
2. Reviu pelaksanaan *piloting* dan persiapan perluasan *piloting* tahap I.
3. Pengembangan layanan pembayaran tunjangan lingkup Setjen Kemenkeu dan DJPb.
4. Penyusunan kajian sertifikasi sistem dan tanda tangan elektronik tersertifikasi.
5. Kegiatan *change management and communication*.

Milestones Tahun 2022

1. Implementasi perluasan gaji melalui Back Office Terintegrasi (BOT) Kementerian Keuangan Tahap I-IV.
2. Perluasan layanan pembayaran *common expenses* (listrik & telekomunikasi) fase 2.
3. Penyempurnaan sistem *monitoring* (*dashboard*).
4. Monitoring dan evaluasi serta reviu terhadap pelaksanaan *piloting* layanan.
5. Penyusunan regulasi implementasi PPP untuk tunjangan.
6. Penyusunan kajian perjalanan dinas dan bantuan sosial.
7. Reviu Pelaksanaan Implementasi PPP.
8. Implementasi tanda tangan elektronik tersertifikasi pada SAKTI dan Gaji Web.
9. Penyusunan *Business Continuity Plan* (BCP) untuk implementasi PPP.
10. Kegiatan *change management and communication*.

Milestones Tahun 2023

1. Implementasi layanan pembayaran gaji Kemenkeu.
2. Perluasan layanan pembayaran *common expenses* (listrik & telekomunikasi) fase 3a dan 3b.
3. Persiapan dan implementasi *piloting* PPP untuk pembayaran tunjangan Fase 1 (satker DJPb).
4. Persiapan dan implementasi *piloting* PPP untuk pembayaran uang makan dan uang lembur Fase 1 (satker DJPb).
5. Monitoring, evaluasi, serta reviu terhadap pelaksanaan *piloting*.
6. Persiapan pembentukan unit *dedicated* pengelola platform.
7. Kegiatan *change management and communication*.

Milestones Tahun 2024

1. Pembentukan rancangan organisasi *dedicated* pengelola Platform Pembayaran Pemerintah.
2. Perluasan layanan *common expenses* kepada 10 K/L pengguna SAKTI.
3. Perluasan layanan transaksi tunjangan kinerja, uang makan, dan uang lembur ke seluruh satker Kemenkeu.
4. Persiapan dan implementasi *piloting* PPP untuk pembayaran perjalanan dinas fase 1.
5. Persiapan dan implementasi layanan pembayaran pengadaan sederhana fase 1.
6. Monitoring, evaluasi, serta reviu terhadap pelaksanaan *piloting*.
7. Kegiatan *change management and communication*.

PENCAPAIAN IMPLEMENTASI PLATFORM PEMBAYARAN PEMERINTAH

Belanja Pegawai-Gaji Induk

Transaksi Perdana

Transaksi perdana layanan Platform Pembayaran Pemerintah pada tahun 2020 telah berhasil dilaksanakan untuk piloting pembayaran gaji melalui platform untuk Satker lingkup Ditjen Perbendaharaan dan Satker Setjen Kemenkeu (Biro Umum) pada tanggal 23 Desember 2020. Pembayaran gaji melalui Platform Pembayaran Pemerintah dilakukan secara full elektronik melalui koneksi aplikasi HRIS, aplikasi Gaji web modul Satker, aplikasi Gaji web modul KPPN, aplikasi SAKTI web melalui Kemenkeu Service Bus. Hal ini untuk meningkatkan validitas data yang digunakan untuk pembayaran karena berdasarkan verifikasi dari berbagai sistem elektronik. Data mengalir secara elektronik dari aplikasi HRIS ke aplikasi Gaji web (modul Satker dan KPPN) untuk selanjutnya diproses pada aplikasi SAKTI web (penerbitan SPP/SPM).

Transaksi perdana pembayaran gaji melalui Platform Pembayaran Pemerintah merupakan tonggak sejarah bagi pola pembayaran APBN untuk memasuki dunia elektronik dan digital. Pola tersebut dapat diterapkan dalam sistem pembayaran pemerintah lainnya dengan menerapkan transaksi full elektronik. Pengembangan masih terus dilakukan untuk menguatkan kapasitas performance, legalitas dokumen dan transaksi elektronik, dan penguatan regulasi.

Pembahasan Regulasi terkait Pembayaran Gaji

Pembayaran gaji merupakan bagian dari konsep scheduled payment date yang telah disusun kajiannya oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Scheduled payment date merupakan penjadwalan pencairan anggaran secara otomatis pada tanggal tertentu. Penerapan scheduled payment date direncanakan untuk dilaksanakan pada belanja gaji induk dan penyaluran DAU. Pada gaji induk, penerapan scheduled payment date dilakukan dengan penyampaian gaji induk oleh satker yang dibatasi sampai dengan tanggal 15 pada setiap bulannya. Atas SPM yang telah masuk sampai dengan tanggal 15, dilakukan dropping dana dari RKUN yang ada pada BI ke rekening penyalur gaji yang ada pada Bank Umum. Dalam rangka implementasi scheduled payment date pada belanja gaji induk, diusulkan revisi pada PMK 190/PMK.05/2012 bahwa SPM belanja gaji induk yang disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 15 pada bulan sebelum bulan pembayaran dapat benar-benar dilaksanakan.

Pengembangan Aplikasi Gaji Web

Aplikasi Gaji berbasis web adalah upgrade Aplikasi GPP/BPP/DPP berbasis desktop menjadi Aplikasi Gaji berbasis web yang digunakan oleh Satuan Kerja dari seluruh Kementerian/Lembaga dalam pembuatan gaji, uang makan, uang lembur, dan lainlain secara online kepada KPPN. Tujuan pengembangannya, yaitu: a. Penggabungan basis data seluruh aplikasi GPP/BPP/DPP yang selama ini terpisah pada masing-masing satuan kerja yang dikelola oleh PPABP Satker. b. Integrasi data kepegawaian dari aplikasi HRIS/SIMPEG yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga/Satker dalam proses update data pegawai, keluarga, dan perubahan ke dalam Aplikasi Gaji. c. Proses update data kepegawaian melalui satu pintu yaitu via Aplikasi HRIS, sehingga tidak

double entry updating data pada aplikasi HRIS dan Gaji.

Perluasan Piloting Pembayaran Gaji melalui Platform Pembayaran Pemerintah ke Seluruh Satker lingkup Kemenkeu

Rancangan awal pada tahun 2022 akan dilaksanakan perluasan piloting gaji sampai tahap 3a (seluruh Kemenkeu kecuali DJP dan DJBC). Namun dalam perkembangannya terdapat inisiatif Back Office Terintegrasi (BOT) berupa pemusatan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Dampak implementasi BOT adalah adanya percepatan perluasan piloting gaji pada PPP. Pada Semester I 2022, Piloting layanan pembayaran gaji BOT melalui Platform Pembayaran Pemerintah telah berhasil dilakukan untuk pembayaran gaji bulan Mei sampai dengan Juni 2022, pembayaran gaji THR tahun 2022 bagi Satker Setjen Kemenkeu, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Inspektorat Jenderal, dan Badan Kebijakan Fiskal. Pada Semester II 2022, terus dilakukan perluasan transaksi gaji BOT tahap II (DJPb, DJKN, BPPK) pada bulan Juni, tahap III (DJBC dan LNSW), dan tahap IV (DJP) pada bulan September 2022. Dengan selesainya seluruh tahap BOT, maka seluruh satker Kemenkeu telah dibayarkan gajinya melalui PPP dengan skema pembayaran terpusat pada Setjen Kemenkeu. Pada bulan Desember 2022, telah dilakukan pembayaran kepada 79.200 pegawai Kemenkeu dengan nominal Rp246,7 M.

Belanja Pegawai-Tunjangan Kinerja

Implementasi Pembayaran Tunjangan Kinerja Fase 1

Pada bulan Oktober 2023 telah berhasil dilaksanakan pembayaran tunjangan kinerja melalui Platform Pembayaran Pemerintah (100%) untuk satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan (217 satker). Adapun implementasi yang dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut: 1. Seluruh satker menyampaikan data perhitungan tunjangan kinerja pada Aplikasi eTukin Unit Eselon I. 2. Bagian Keuangan DJPb melakukan verifikasi kelengkapan rekapitulasi tukin dan telah disampaikan kepada Biro Cankeu untuk diterbitkan daftar pembayaran tunjangan kinerja. 3. Daftar pembayaran tunjangan kinerja diproses. Atas daftar pembayaran tukin tersebut, telah diterbitkan 13 SPP dan 13 SPM. 4. KPPN Jakarta II melakukan verifikasi SPM dan seluruhnya telah berhasil validasi SPAN. 5. Seluruh SPM telah diterbitkan SP2D dan pada tanggal 1 Oktober 2023 telah sukses overbooking di Bank Operasional.

Belanja Pegawai-Uang Makan dan Uang Lembur

Implementasi Pembayaran Uang Makan dan Uang Lembur Fase 1

Telah diimplementasikan pembayaran uang makan dan uang lembur perdana bulan Oktober 2023, yang dibayarkan pada tanggal 10 November 2023, dengan satker piloting Fase 1 yaitu Direktorat Jenderal Perbendaharaan (217 satker). Tetapi dari 217 satker tersebut, sebanyak 15 satker terkonfirmasi tidak mengajukan pembayaran uang lembur bulan Oktober 2023, di antaranya karena pagu lembur untuk bulan Oktober tidak

cukup. Oleh karena itu, total satker yang melakukan pembayaran uang makan dan uang lembur Page | 32 sebanyak 202 satker, dengan penerbitan SP2D oleh KPPN sebanyak 202 satker. Dengan demikian pembayaran uang makan dan uang lembur perdana pada bulan Oktober 2023 melalui Platform Pembayaran Pemerintah Fase 1 telah berhasil SP2D 100%.

Regulasi iuknis pembayaran uang makan dan uang lembur melalui PPP

Ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Belanja Pegawai dan Belanja Barang Operasional dalam Piloting Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Platform Pembayaran Pemerintah. Mengatur mengenai petunjuk teknis pelaksanaan piloting tata cara pembayaran melalui Platform, yang meliputi Belanja Pegawai berupa belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, belanja tunjangan kinerja, belanja uang makan, dan belanja uang lembur serta Belanja Operasional berupa belanja jasa listrik dan belanja jasa telekomunikasi. Pembayaran belanja pegawai dilaksanakan setelah dilakukan interkoneksi antara Sistem Pendukung (Aplikasi Kepegawaian, Aplikasi Tunjangan Kinerja, Aplikasi Presensi, dan/atau Aplikasi Lembur) dengan Aplikasi Gaji. Untuk keperluan pengujian PPABP, PPK, dan PPSPM, sistem pendukung menyediakan akses ke dokumen sumber. Diatur mengenai pengelolaan tagihan dan penyelesaian tagihan untuk belanja pegawai dan belanja operasional secara detil. Namun, dalam hal pembayaran pada akhir tahun, jadwal penerbitan SPP dan jadwal pembayaran mengikuti ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.

Belanja Operasional

Pembahasan Perjanjian Kerja Sama dengan PT PLN dan PT Telkom

Tim Pengelola Platform Pembayaran Pemerintah telah melakukan pembahasan secara intensif dengan PLN dalam drafting MoU/PKS/SLA. Draft PKS memiliki banyak konten yang berkaitan dengan PMK nomor 204/PMK.05/2020. PT PLN mensyaratkan adanya MoU sebelum integrasi data dan sistem antara Ditjen Perbendaharaan dengan PT PLN. Tim Pengelola Platform Pembayaran Pemerintah juga telah melakukan pembahasan dengan PT Telkom secara intensif dalam drafting MoU/PKS/SLA.

Transaksi Perdana Pembayaran Tagihan Listrik dan Telekomunikasi melalui Platform Pembayaran Pemerintah

Transaksi perdana piloting pembayaran tagihan listrik dan telekomunikasi melalui platform diagendakan pada tanggal 9 Agustus 2021. Transaksi perdana tersebut melibatkan satker piloting yaitu Setjen Kemenkeu, Kantor Pusat DJPb, Kanwil DJPb, dan KPPN di seluruh Indonesia.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pembayaran Tagihan Listrik dan Telekomunikasi melalui Platform Pembayaran Pemerintah

Penandatanganan PKS antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan PT PLN (Persero) tentang Interkoneksi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dengan Sistem Web Service Terkait Mekanisme Pembayaran Tagihan Pemakaian Energi Listrik Dalam Rangka Pelaksanaan Platform Pembayaran Pemerintah dengan Nomor PRJ-293/PB/2021 dan Nomor 0371.PJ/HKM.02.01/C01000000/2021 tanggal 16 Juli 2021.

Penandatanganan PKS antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk tentang Interkoneksi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dengan Sistem Web Service Terkait Mekanisme Pembayaran Tagihan Jasa Telekomunikasi Dalam Rangka Pelaksanaan Platform Pembayaran Pemerintah dengan Nomor PRJ-294/PB/2021 dan Nomor K.Tel.23/HK.810/TEL-00000000/2021 tanggal 23 Juli 2021. Perjanjian tersebut menjadi dasar operasionalisasi pembayaran melalui platform dengan 1 siklus transaksi dimulai pada tanggal 26 Juli 2021 berupa perekaman data pelanggan oleh satker melalui aplikasi SAKTI. PT PLN (Persero) menyediakan data tagihan paling lambat tanggal 5 sedangkan PT Telekomunikasi Indonesia menyediakan data tagihan paling lambat tanggal 7 setiap bulannya. Atas tagihan tersebut, satker paling lambat menerbitkan SPP pada tanggal 9 setiap bulannya dan menerbitkan SPM paling lambat tanggal 13 setiap bulannya. Penerbitan SP2D atas dasar SPM yang disampaikan oleh satker paling lambat tanggal 19 setiap bulannya.

Perluasan Piloting Transaksi Common Expenses Fase II (Unit Eselon I Kemenkeu non Kantor Vertikal)

Pada tahun 2022 ditargetkan perluasan piloting transaksi common expenses sampai fase 3a (seluruh Satker Kemenkeu kecuali DJBC dan DJP). Adanya inisiatif BOT membuat sumber daya harus dialokasikan untuk perluasan transaksi gaji ke seluruh Kemenkeu, akibatnya perluasan piloting common expenses fase 3a (DJKN dan BPPK) diundur ke tahun 2023 dan perluasan fase 2 (Unit Eselon I Kemenkeu non Kantor Vertikal) diundur dari bulan September menjadi bulan Desember 2022. Perluasan piloting fase 2 diawali dengan serangkaian kegiatan sosialisasi dalam rangka pengenalan PPP serta persiapan piloting bagi Satker. Selanjutnya dilakukan tiga sesi pendampingan untuk perekaman ID pada tanggal 28 November 2022, pembuatan SPP pada tanggal

12 Desember 2022, dan pembuatan SPM pada tanggal 13 Desember 2022. Transaksi perdana pembuatan SPP dan SPM pada bulan Desember sekaligus menjadi transaksi perdana pula pada penggunaan TTE tersertifikasi pada aplikasi SAKTI. Dengan demikian, seluruh aplikasi yang terinterkoneksi dalam sistem pembayaran common expenses melalui Platform telah menggunakan TTE Tersertifikasi sesuai dengan rekomendasi dari Itjen Kemenkeu.

Implementasi Transaksi Piloting Common Expenses Fase 3a

Pada bulan Februari 2023 telah berhasil dilaksanakan perluasan ke satker Fase 3a dengan dilaksanakannya perekaman ID perdana. Pada implementasi transaksi piloting common expenses fase 3a, telah digunakan TTE tersertifikasi untuk satker. Adapun peserta piloting pada fase 3a adalah, BPPK, DJBC, dan DJKN, dengan jumlah peserta seluruhnya ialah 233 satker. Seluruhnya telah diterbitkan SPM (100%) dan KPPN telah memproses menjadi SP2D (100%) pada 19 Maret 2023 (100%). Adapun terdapat 13 satker yang menggunakan gedung bersama/ sewa sehingga pembayaran tagihan listrik/ telekomunikasi tidak dibayarkan pada satker tersebut. ID pelanggan yang terdaftar untuk PLN sejumlah 490 ID dan ID untuk Telkom sejumlah 1.633 ID.

Implementasi Transaksi Piloting Common Expense Fase 3b

Perluasan fase 3b (Direktorat Jenderal Pajak) berhasil dilaksanakan pada bulan April 2023. Jumlah satker piloting Fase 3b adalah 379 satker. Terdapat 13 satker yang tidak membayar tagihan melalui PPP karena menggunakan gedung bersama/ sewa. Seluruh satker telah menyampaikan data ID. Data ID tersebut telah disampaikan kepada PT. PLN dan PT. Telkom, seluruhnya telah dilakukan validasi (100%) dengan hasil ID valid sebanyak 6.428 ID (825 ID PLN dan 5.603 ID Telkom). Per tanggal 29 April 2023 seluruh satker (100%) telah melakukan perekaman ID listrik dan telekomunikasi di SAKTI. Berdasarkan

SPM yang disampaikan satker, seluruhnya telah diterbitkan SP2D oleh KPPN. Per tanggal 18 Mei 2023 telah diselesaikan siklus transaksi perdana untuk fase 3b.

Belanja Pengadaan Sederhana

Integrasi Digipay sebagai Mitra Toko Daring LKPP

Ditjen Perbendaharaan telah mengembangkan platform Digipay yang mengintegrasikan sistem pembayaran pemerintah (nontunai) dengan ekosistem pembelian barang/jasa oleh satker Kementerian Negara/Lembaga dengan menggunakan mekanisme Uang Persediaan (UP). Pengembangan ini dilakukan sejak tahun 2019. Dalam rangka perluasan dan akselerasi implementasi Digipay serta penguatan upaya pemberdayaan UMKM dan Program Bangga Buatan Indonesia, diperlukan sinergi dan kolaborasi konstruktif antar lembaga. Oleh karena itu, DJPb telah mengajukan permohonan melakukan integrasi Digipay sebagai mitra Toko Daring yang dikembangkan LKPP sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-146/PB/2023 tanggal 7 September 2023. Selanjutnya hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan hasil akhir, yaitu Pengenalan dan Pengujian Integrasi Digipay-Bela Pengadaan LKPP pada 2 November 2023 serta Pengujian Final Interkoneksi Digipay-SAKTI, pada 19 Desember 2023.



Penerbangan Pertama

Setelah sayap kering dan cukup keras, kupu-kupu akan melakukan penerbangan percobaan pertama untuk **memastikan bahwa sayapnya berfungsi** dengan baik. Mirip halnya dengan proses transformasi yang memerlukan penyampaian dan pendekatan change management secara tepat yang perlu diadopsi pada masing-masing unit kerja untuk **memastikan transformasi memberikan hasil yang sesuai**, yaitu tercapainya proses transformasi kelembagaan pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan pengaturan cetak biru Transformasi Kelembagaan.

TIM PENYUSUN ANNUAL REPORT TAHUN 2023

Pengarah

Sulaimansyah
(Direktur Sistem Perbendaharaan selaku Ketua PMO DJPb)

Ketua Tim

Achmad Rinaldi Hidayat
(Kepala Subdirektorat Transformasi Kelembagaan selaku Pelaksana Harian Ketua PMO DJPb)

Kontributor :

Deni Herdianto
Iskandar
Khiyarunnas
Elenyora Tsabita

Wawan Hadinata
Afina Razan
Firmansyah Wahyu Pratama
Radityo Agung Raharjanto
Omega Carladiva Murbarani
Julianda Rosyadi

Agustina Diprianti
Willyam Matra Wijaya
Sigit Pamungkas
Rizka Rahma Wijayanti
Andreas Meyka Aisetya
Andika Prameswari C.K.

Desain & Layout :

Bonny Adam

Martina Eka Hardyanti
Alib Hari Pratomo

Miftah Muhammad Wazni
Murti Pagar Intan

Kontak PMO

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III A, Lantai 4





PORTRAIT OF A DECADE

“Transforming Towards Excellence”

TRANSFORMASI KELEMBAGAAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo IIIA Lt. 4
Jl. Budi Utomo Nomor 6 Jakarta
Telp : (021) 3849670, 3449230
Faks: (021) 3849670